

**PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH (UMKM) MELALUI *CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY***

**(Studi Terhadap Program *Corporate Social Responsibility* Bank Indonesia di
Kampung Industri Tenun Ikat Bandar Kidul Kota Kediri)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Barawijaya**

JOKO SUGIONO

NIM. 125030107111060



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2017

MOTTO

**PENOLAKAN ATAU BELUM BERHASIL ITU TIDAK SAMA
DENGAN KEGAGALAN.**

KEGAGALAN ADALAH KETIKA KITA MENYERAH

JADI JANGAN PERNAH MENYERAH!

(Joko Sugiono)

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Melalui *Corporate Social Responsibility* (Studi Studi Terhadap
Program *Corporate Social Responsibility* Bank Indonesia di
Kampung Industri Tenun Ikat Bandar Kidul Kota Kediri)

Disusun oleh : Joko Sugiono

NIM : 125030107111060

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : Non Konsentrasi

Malang, 16 Desember 2016

Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. Rer. pol. Romy H S. Sos, M.AP
NIP. 19740725 200604 1 001

Anggota



Nurjati Widodo, S.AP, M.AP
NIK. 830129 03 1 1 0275

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan didepan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 17 Januari 2017

Jam : 09.00 – 10.00 WIB

Skripsi a/n : Joko Sugiono

Judul : Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Melalui *Corporate Social Responsibility* (Studi Terhadap Program
Corporate Social Responsibility Bank Indonesia di Kampung
Industri Tenun Ikat Bandar Kidul Kota Kediri)

dan dinyatakan **LULUS**

MAJELIS PENGUJI

Ketua Komisi Pembimbing



Dr.rer.Pol. Romy Hermawan, S.Sos, M.AP
NIP. 19740725 200604 1 001

Anggota Komisi Pembimbing



Nurjati Widodo, S.AP, M.AP
NIP. 2012018301291 001

Penguji I



Dr. Bambang Santoso H, MS
NIP. 19610204 198601 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 28 Desember 2016



Joko Sugiono
NIM. 125030107111060

RINGKASAN

Joko Sugiono, 2017, **Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui *Corporate Social Responsibility* (Studi Terhadap Program *Corporate Social Responsibility* Bank Indonesia di Kampung Industri Tenun Ikat Bandar Kidul Kota Kediri)** Dr.rer.Pol. Romy Hermawan, S.Sos, M.AP Nurjati Widodo, S.AP, M.AP

Pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, melainkan juga setiap insan manusiayang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.Salah satunya adalah dengan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat berpotensi. Dalam hal ini Bank Indonesia Kota Kediri berpartisipasi dalam mengimplementasikan *Corporate social Responsibility* dengan memberikan pemberdayaan masyarakat melalui Pengembangan UMKM di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul sebagai wujud kepedulian untuk meningkatkan sumber potensi dan peningkatan ekonomi rumah tangga. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pelaksanaan dan dampak *Corporate Social Responsibility* Bank Indonesia terhadap pengembangan UMKM di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul Kota Kediri.

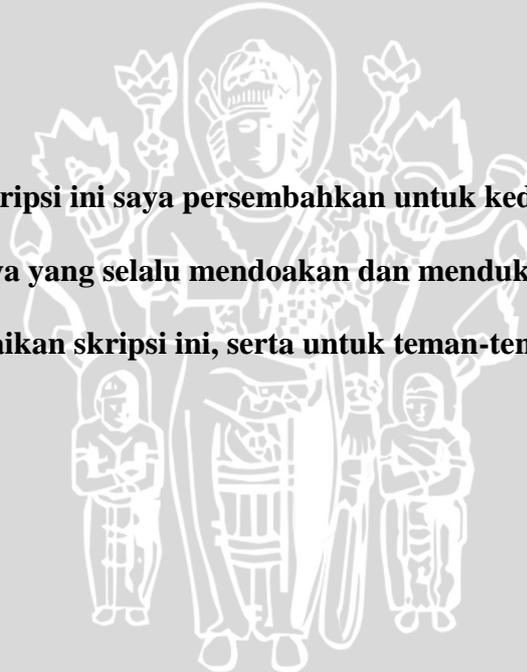
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dengan menggunakan metode analisis data interaktif yang diajukan oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Model ini terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengembangan UMKM tenun ikat oleh Bank Indonesia Kota Kediri dilakukan dengan berbagai macam pelatihan diantaranya adalah pelatihan desain model, pelatihan pewarnaan benang, pelatihan pemasaran, dan pelatihan pembukuan dan *entreprenuership*. Lebih dari itu dalam pelaksanaan pemberdayaan ini telah meningkatkan perekonomian rumah tangga masyarakat tenun ikat, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya produksi dan penjualan. Dalam pelaksanaannya aktor yang terlibat menggunakan hukum yang berlaku, sesuai, dan berhubungan secara sinergis. Selain itu tanggung jawab sosial masyarakat perajin adalah berpartisipasi pada kegiatan yang telah dilaksanakan dan mengikuti arahan. Indikator keberdayaan masyarakat tenun ikat dapat dilihat dari peningkatan taraf hidup dan perekonomian masyarakat dan telah dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dengan demikian pengembangan UMKM di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul oleh Bank Indonesia Kota Kediri dapat dikatakan sudah membuahkan hasil yang baik, hal ini dapat dilihat dari keadaan ekonomi masyarakat yang meningkat.

Kata Kunci: Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), *Corporate Social Responsibility*, Perekonomian Masyarakat

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Hasil Karya Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua dan keluarga saya yang selalu mendoakan dan mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini, serta untuk teman-teman FIA PUBLIK angkatan 2012



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah memelihara kehidupan dan melimpahkan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) MELALUI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (Studi Terhadap Program Corporate Social Responsibility Bank Indonesia di Kampung Industri Tenun Ikat Bandar Kidul Kota Kediri)**

Skripsi ini merupakan tugas akhir penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

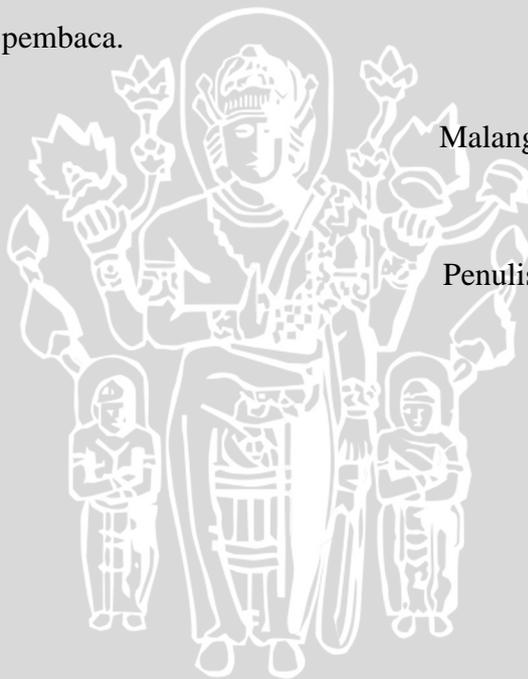
1. Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
3. Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik
4. Dr.rer.Pol. Romy Hermawan, S.Sos, M.AP selaku ketua komisi pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam pengerjaan hingga terselesainya skripsi ini.
5. Nurjati Widodo, S.AP, M.AP selaku anggota komisi pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam pengerjaan hingga terselesainya skripsi ini.
6. Jajaran Dosen dan Pegawai di Fakultas Ilmu Administrasi yang memberikan ilmu serta membantu penulis dalam proses belajar mengajar selama 8 (delapan) semester.
7. Ibu Merry Komala Dewi selaku Manajer perwakilan dari Bank Indonesia dan Bapak Joko Susilo selaku Asisten Manajer UMKM kantor perwakilan Bank Indonesia Kota Kediri yang telah berjasa memberi informasi terkait pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kampung Industri Tenun Ikat Bandar Kidul.

8. Bapak Eko Hariyanto selaku ketua kelompok tenun dari kampung industri tenun ikat Bandar Kidul yang telah berjasa dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Ibu Siti Ruqayah dan anggota perajin tenun ikat lainnya yang berada di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Demikian penulis menyelesaikan skripsi ini, demi memperbaiki skripsi ini kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan sangat berguna dan bermanfaat bagi penulis untuk meningkatkan pengetahuan penulis. Penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat secara maksimal dan memberikan wacana pengetahuan baru bagi pembaca.

Malang, 17 Januari 2017

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	I
MOTTO	Ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	Iii
TANDA PENGESAHAN	Iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	V
RINGKASAN	Vi
SUMMARY	Vii
LEMBAR PERSEMBAHAN	Viii
KATA PENGANTAR	Ix
DAFTAR ISI	X
DAFTAR TABEL	Xi
DAFTAR GAMBAR	Xii
DAFTAR LAMPIRAN	Xiii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kontribusi Penelitian	14
E. Sistematika Penelitian	14
BAB II	
KAJIAN PUSTAKA	16
A. <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	16
1. Pengertian <i>Good Corporate Governance</i>	16
2. Lingkup <i>Good Corporate Governance</i>	18
3. Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	19
B. <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	23
1. Pengertian <i>Corporate Social Responsibility</i>	23
2. Manfaat <i>Corporate Social Responsibility</i>	24
3. Bentuk <i>Corporate Social Responsibility</i>	25
4. Prinsip <i>Corporate Social Responsibility</i>	30
5. Tahap Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i>	34
6. Rekomendasi <i>Corporate Social Responsibility</i>	35
C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	39
1. Pengertian UMKM	39
2. Karakteristik UMKM	41
3. Peran UMKM bagi Perekonomian	42



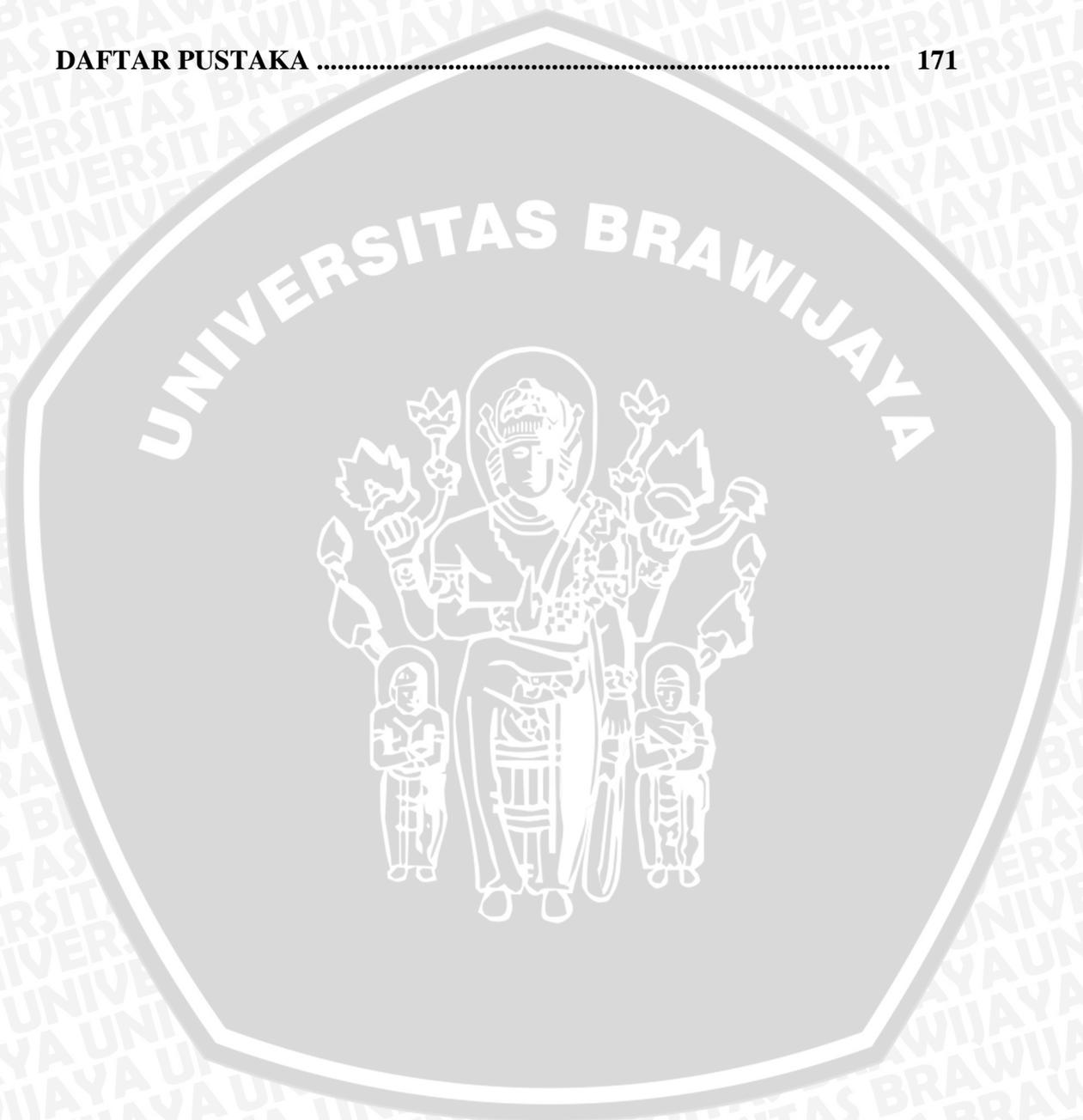
D. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	44
1. Pengertian, Strategi, dan Tahapan Pengembangan UMKM	44
2. Aktor Pengembangan UMKM	51
3. Dampak Pengembangan UMKM	51
E. Perekonomian Masyarakat	53
1. Pengertian Perekonomian Masyarakat	53
2. Pengembangan Ekonomi Rakyat	56

BAB III	METODE PENELITIAN	58
A. Jenis Penelitian		58
B. Fokus Penelitian		59
C. Lokasi dan Situs Penelitian		60
D. Jenis dan Sumber Data		61
E. Teknik Pengumpulan Data		63
F. Instrumen Penelitian		66
G. Analisis Data		68

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian		71
1. Gambaran Umum Kota Kediri		71
a) Sejarah Kota Kediri		71
b) Keadaan Geografis		73
c) Pembagian Administratif		74
d) Visi dan Misi		75
e) Lambang Kota Kediri		76
2. Gambaran Umum Bank Indonesia		77
a) Sejarah Bank Indonesia		77
b) Logo Bank Indonesia		78
c) Status dan Kedudukan Bank Indonesia		81
d) Visi dan Misi		82
e) Tujuan Bank Indonesia		83
f) Struktur Bank Indonesia		84
g) Tugas dan Fungsi Bank Indonesia Terhadap Pengembangan UMKM di Kampung Industri Tenun Ikat Bandar Kidul		86
3. Gambaran Umum Kampung Industri tenun Ikat Bandar Kidul		89

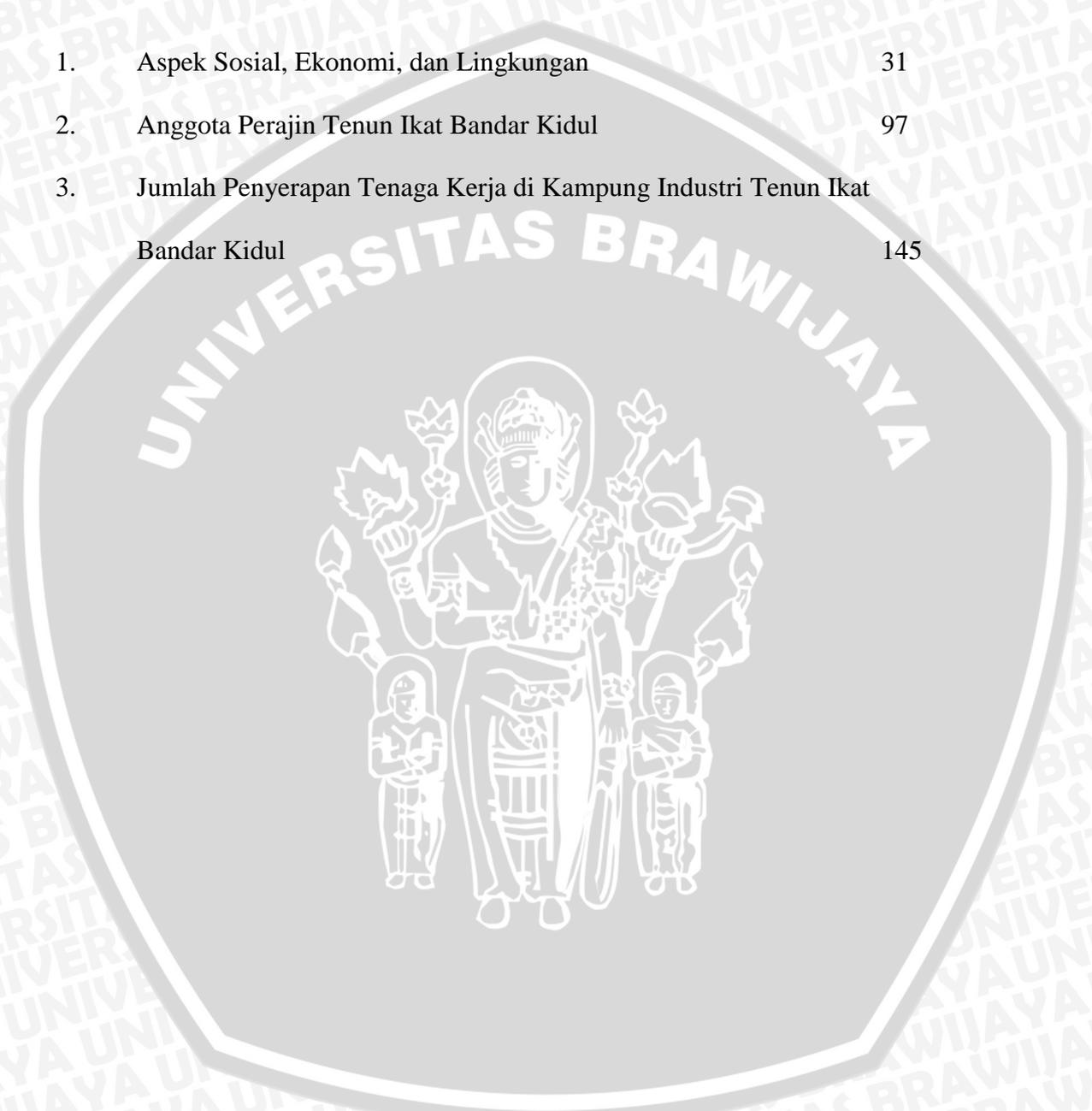
B. Penyajian Data	93
1. Pelaksanaan Pengembangan UMKM di Kampung Industri Tenun Ikat Bandar Kidul melalui <i>Corporate Social Responsibility</i> Bank Indonesia Kota Kediri	93
a) Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> dalam aspek ekonomi	93
b) Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan UMKM	108
c) Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> kepada masyarakat dan sarana dalam pengembangan UMKM	123
2. Dampak Pengembangan UMKM di Kampung Industri Tenun Ikat Bandar Kidul melalui <i>Corporate Social Responsibility</i> Bank Indonesia Kota Kediri	130
a) Meningkatnya kesejahteraan ekonomi pelaku usaha dan masyarakat	130
b) Meningkatnya tenaga kerja yang diserap dalam Pengembangan UMKM	139
C. Pembahasan	142
1. Pelaksanaan Pengembangan UMKM di Kampung Industri Tenun Ikat Bandar Kidul melalui <i>Corporate Social Responsibility</i> Bank Indonesia Kota Kediri	142
a) Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> dalam aspek ekonomi	142
b) Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan UMKM	148
c) Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> kepada masyarakat dan sarana dalam pengembangan UMKM	153
2. Dampak Pengembangan UMKM di Kampung Industri Tenun Ikat Bandar Kidul melalui <i>Corporate Social Responsibility</i> Bank Indonesia Kota Kediri	155
a) Meningkatnya kesejahteraan ekonomi pelaku usaha dan masyarakat	155
b) Meningkatnya tenaga kerja yang diserap dalam Pengembangan UMKM	159

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	164
	A. Kesimpulan	164
	B. Saran	168
DAFTAR PUSTAKA		171



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Aspek Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan	31
2.	Anggota Perajin Tenun Ikat Bandar Kidul	97
3.	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja di Kampung Industri Tenun Ikat Bandar Kidul	145



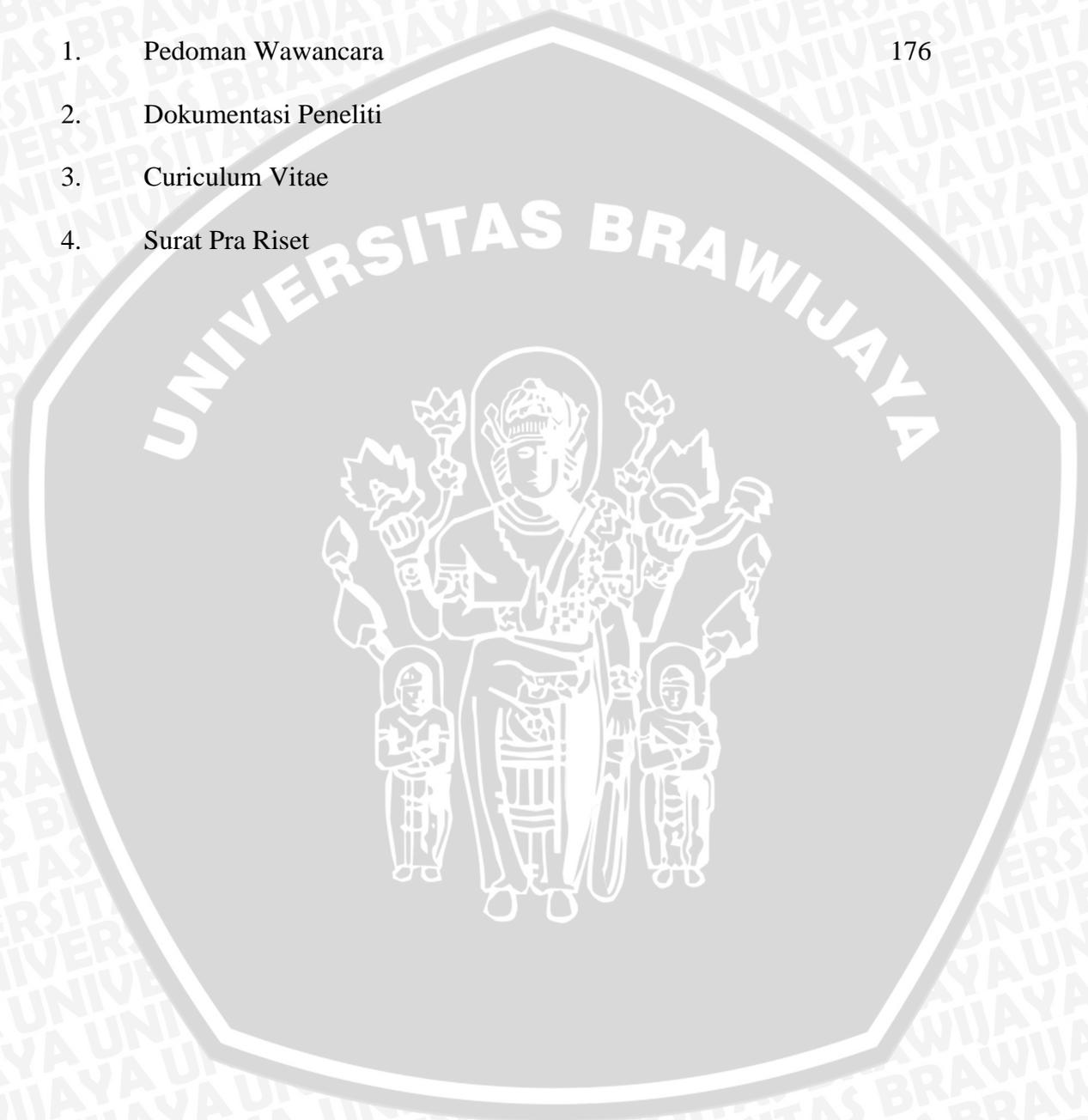
DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Pola Stewardship Principle	27
2.	Model Pengembangan Ekonomi Lokal dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	49
3.	Model Analisis Data Miles, Huberman, Saldana (2014:10)	73
4.	Peta Kota Kediri	74
5.	Lambang Kota Kediri	79
6.	Logo Bank Indonesia	83
7.	Perkembangan Logo Bank Indonesia	85
8.	Struktur Organisasi Bank Indonesia	90
9.	Peta Kecamatan Mojoroto	95



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Pedoman Wawancara	176
2.	Dokumentasi Peneliti	
3.	Curriculum Vitae	
4.	Surat Pra Riset	





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, setiap insan manusia berperan dalam hal mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Keberhasilan suatu negara dalam mencapai suatu pembangunan dapat dilihat dari bagaimana keadaan yang nyata pada masyarakat. Apabila didalam kehidupan masyarakat masih banyak hal yang belum bisa terpenuhi seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan yang bersih dan lain-lain maka dapat dikatakan bahwa pembangunan di negara tersebut belum berjalan dengan baik. Pembangunan harus memiliki tujuan yang tepat dan berjangka panjang, tidak hanya berfokus pada keadaan saat ini saja melainkan juga harus berpikir untuk masa yang akan datang. Selain itu dunia usaha ikut berperan dalam hal mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Perusahaan sebagai sebuah sistem dalam keberlanjutan dan keseimbangannya tidak bisa berdiri sendiri. Eksistensi sebuah perusahaan tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat sebagai lingkungan eksternalnya. Adanya hubungan timbal balik antara perusahaan dengan masyarakat. Para pemimpin perusahaan menghadapi tugas yang menantang dalam menerapkan standar-standar etis terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab. Perusahaan berusaha untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat bersaing dengan perusahaan lainnya.

Pada saat ini banyak perusahaan yang berlomba untuk dapat melaksanakan praktik bisnis yang bertanggung jawab, yaitu dengan melakukan dan menerapkan

standar-standar yang etis pada setiap operasinya, selain itu sudah menjadi seharusnya perusahaan melakukan tanggung jawab sosial atau yang dikenal saat ini adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR) karena dalam setiap operasinya memberikan dampak kepada masyarakat serta lingkungan sekitar perusahaan. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai CSR, berikut merupakan sebuah definisi CSR sangat menentukan pendekatan audit program CSR. Sayangnya, belum ada definisi CSR yang secara universal diterima oleh berbagai lembaga. Beberapa definisi CSR dibawah ini menunjukkan keberagaman pengertian CSR menurut berbagai organisasi: Menurut *World Business Council for Sustainable Development* mendefinisikan bahwa CSR merupakan sebuah komitmen yang berkelanjutan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberikan sumbangan pada pembangunan ekonomi sekaligus memperbaiki mutu hidup angkatan kerja dan keluarganya serta komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas (Wibisono, 2007:7). Sedangkan CSR Asia mendefinisikan CSR sebagai komitmen perusahaan untuk beroperasi secara berkelanjutan berdasarkan prinsip ekonomi, sosial, dan lingkungan, seraya menyeimbangkan beragam kepentingan para stakeholders. (Jalal, 2008)

Selain itu, Standar Kualitas Internasional (ISO) 26000 mengenai *Guidance on Social Responsibility* juga memberikan definisi CSR. Pedoman CSR standar Internasional ini ditetapkan tahun 2010, ini bisa menjadi salah satu rujukan. Menurut ISO 26000 (draft 3, 2007) CSR adalah tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan

dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional; serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh.

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. CSR berhubungan erat dengan “pembangunan berkelanjutan” (*sustainable development*), dimana ada argumentasi bahwa suatu perusahaan atau institusi dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya yang tidak semata berdasarkan faktor keuangan, misalnya keuntungan atau *dividen* melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan untuk saat ini maupun dalam jangka panjang. Pembangunan berkelanjutan menghendaki adanya hubungan harmonis antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat (*stakeholders*). Masing-masing *stakeholders* memegang peranan yang cukup penting, karena potensinya dalam hal modal dan sumber daya manusia. Partisipasi dunia usaha dalam pembangunan berkelanjutan adalah dengan mengembangkan program kepedulian perusahaan kepada masyarakat. CSR merupakan salah satu upaya untuk menciptakan keberlangsungan usaha dan memelihara kesinambungan. Karena salah satu tujuan yang penting khususnya di negara yang sedang berkembang adalah peningkatan kualitas pendidikan dan ekonomi masyarakat. Karena itu penerapan CSR di Indonesia pada dasarnya dapat

diarahkan pada penguatan ekonomi rakyat yang berbasis usaha kecil dan menengah serta peningkatan kualitas SDM masyarakat.

Ada 5 (lima) peraturan yang mewajibkan perusahaan tertentu untuk menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR: 1) Keputusan Menteri BUMN tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PBKL), 2) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, 3) Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, 4) Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001, dan 5) Guidance ISO 26000.

Institusi seperti Bank Indonesia memberikan tindakan secara nyata dalam kegiatan CSR. Tujuan dari CSR Bank Indonesia adalah sebagai bentuk kepedulian terhadap masalah yang dialami masyarakat dan ikut mempersiapkan generasi muda agar siap menghadapi tantangan didepan secara khusus dibidang ekonomi dan keuangan di Indonesia. Institusi yang merupakan regulator perbankan di Indonesia adalah Bank Indonesia. Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum pada industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Sehubungan dengan hal tersebut Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana diubah dengan PBI No.8/14/PBI/2006 serta Surat Edaran No. 9/12/DPNP tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum. Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance*, bank diwajibkan

secara berkala melakukan *self assesment* terhadap kecukupan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan menyusun laporan pelaksanaannya dan apabila masih terdapat kekurangan-kekurangan dapat dilakukan tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan. Untuk mencapai investasi sosial diperlukan CSR yang baik atau *Good CSR*. CSR yang baik memadukan empat prinsip *Good Corporate Governance* yakni: *fairnes*, *transparancy*, *accountability*, dan *responsibility* secara harmonis (Suharto 2008: 9). Lebih lanjut *Good CSR* juga memadukan kepentingan *shareholders* dan *stakeholders*. Karenanya, CSR tidak hanya fokus pada hasil yang ingin dicapai melainkan pada proses untuk mencapai hasil tersebut (Suharto 2008: 9). Terdapat lima langkah dalam perencanaan program yang dilakukan *Public Relation* yaitu *fact finding*, *programming*, *communicating*, *taking action*, dan *evaluation*.

Salah satu saluran komunikasi yang digunakan adalah dengan melakukan program CSR yang dinamakan sebagai Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). PSBI merupakan satu bentuk program atau rangkaian kegiatan sebagai wujud kepekaan, kepedulian, dan tanggung jawab Bank Indonesia terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Secara umum PSBI dilaksanakan dalam bentuk bantuan yang diarahkan antara lain dibidang peningkatan kualitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, penanggulangan bencana alam, dan gerakan nasional.

Kegiatan yang dibiayai melalui PSBI adalah terkait dengan pengembangan ekonomi dan edukasi yaitu melalui pemberdayaan masyarakat dan dukungan terhadap komoditas ketahanan pangan dan komoditas unggulan daerah.

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat sekarang ini menjadi semakin kompleks, sehingga hal ini merupakan salah satu subjek yang tidak bisa berdiri sendiri, namun adanya suatu keterkaitan dengan persoalan-persoalan lain seperti kemiskinan, sosial, lingkungan, *good corporate governance*. CSR saat ini bukan sekedar menjadi tren sosial, namun merupakan sinergi dari upaya yang berkelanjutan untuk menginformasi program-program sosial demi menciptakan ekonomi masyarakat yang lebih berkualitas dengan melibatkan para pelaku pembangunan untuk bekerja sama dalam mengembangkan ekonomi lokal yang lebih baik.

Adapun sasaran yang menunjukkan bentuk pembangunan berkelanjutan yaitu kepedulian Bank Indonesia terhadap masyarakat. Kepedulian Bank Indonesia diimplementasikan dalam sebuah kebijakan, kebijakan tersebut adalah CSR Bank Indonesia. CSR Bank Indonesia diimplementasikan dalam bentuk kegiatan yang mengarah pada bentuk program kepedulian sosial terhadap masyarakat. Bentuk kepedulian kepada masyarakat sekitar/relasi komunitas yang dilakukan Bank Indonesia dapat diartikan sangat luas, namun secara singkat dapat dimengerti sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya bersama bagi organisasi dan komunitas. CSR BI ini selain wujud penerapan prinsip *Good Corporate Governance* juga terkait untuk pencapaian tujuan *Millenium Goals Development*, peningkatan taraf pendidikan masyarakat melalui CSR dengan konsentrasi edukasi dan pelestarian kuantitas. CSR BI merupakan sebuah tanggung jawab Bank Indonesia untuk

menyesuaikan diri terhadap kebutuhan dan harapan *stakeholders* sehubungan dengan isu-isu etika, sosial, pendidikan, dan lingkungan disamping ekonomi.

CSR yang dilakukan oleh Bank Indonesia Kota Kediri untuk masyarakat disekitar memberikan manfaat yang besar. Manfaat tersebut bisa dirasakan oleh karyawan maupun Bank Indonesia itu sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Untung (2009:6-7) yakni kegiatan CSR dapat memperbaiki hubungan *stakeholders* maupun dengan *regulator*. Selain itu juga dapat meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan studi pada Bank Indonesia Kota Kediri yang merupakan salah satu bank di Indonesia yang melaksanakan program CSR.

Pengembangan UMKM merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang pada saat ini menjadi perhatian serius oleh Pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Peningkatan perekonomian juga berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan kemampuan pendapatan masyarakat miskin, mengembangkan usaha mikro dan kecil dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan dengan program-program yaitu program bantuan sosial berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha mikro dan kecil, dan program yang lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dan yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. Seperti

berikut salah satu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dapat dilakukan dengan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah. Tujuan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bahwa menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan dengan salah satu prinsipnya adalah penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri. Dengan demikian selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan.

Pengembangan UMKM perlu mendapatkan perhatian yang serius baik dari pemerintah, institusi atau lembaga, masyarakat dan lainnya agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku usaha lainnya. Dalam mewujudkan praktek CSR, Bank Indonesia melakukan pengembangan terhadap pendekatan kebijakan CSR. Implementasi kebijakan CSR Bank Indonesia dilakukan serangkaian program atau tindakan kedermawanan (*philanthropic*). Dasar dari program kepedulian sosial tersebut adalah Bank Indonesia menunjukkan komitmen kepada masyarakat bahwa Bank Indonesia sungguh-sungguh ingin membina hubungan dan berpartisipasi ditengah masyarakat untuk memajukan masyarakat dan memberikan kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat.

Kota Kediri merupakan kota terbesar ketiga di Jawa Timur setelah Surabaya dan Malang, dimana belum semua kecamatan dan kelurahan di kota ini

telah berdaya. Salah satunya adalah Kecamatan Mojojoto yang didalamnya terdapat Kampung Industri Tenun Ikat di Kelurahan Bandar Kidul. Bank Indonesia Kota Kediri memberikan dukungan kepada masyarakat perajin tenun ikat Bandar Kidul dengan memberikan program sosial melalui pengembangan UMKM sejak awal tahun 2015. Pengembangan UMKM di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul telah berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat perajin tenun ikat dan masyarakat akademisi lainnya.

Kampung industri tenun ikat di Bandar Kidul sebagai kampung unggulan dalam bidang tenun ikat yang berada di Kecamatan Mojojoto. Di kampung ini memiliki aktivitas dalam pembuatan kain tenun ikat, selain itu juga melayani dalam pembuatan baju, seragam baik kantor maupun seragam sekolah, dan sarung. Lebih dari itu, Kampung industri tenun ikat juga menghasilkan berbagai *handycraft* (kerajinan tangan) seperti sepatu, sandal, topi dan lain-lain. Produk unggulan yang ada di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul tersebut berupa kain tenun ikat dengan bahan dasar katun, semi sutera, sutera dan sarung dengan dijadikan barang jadi seperti busana pria, busana wanita, seragam kantor maupun seragam sekolah, serta produk kerajinan tangan yang lainnya.

Kampung industri tenun ikat memiliki 10 anggota aktif yang siap menerima pemesanan dalam hal pengerjaan aneka ragam pakaian dan yang lainnya. Produk yang dijual adalah karya dengan desain model yang dilakukan sendiri, bukan kain tenun yang sudah jadi dari perusahaan konveksi, pengerjaannya pun dilakukan oleh karyawan yang terampil dengan menggunakan mesin tenun tradisional atau Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM). Salah satu

pemilik usaha tenun ikat Bandar Kidul bercerita bahwa tenun ikat disini sudah berdiri sejak lama sekitar tahun 1960-an. Pada waktu itu, ada puluhan hingga ratusan warga yang berprofesi sebagai perajin tenun ikat. Namun bisnis tersebut merosot karena munculnya perusahaan konveksi yang memproduksi kain tenun ikat dengan harga yang jauh lebih murah dibanding dengan harga kain tenun ikat tradisional dan terjadinya krisis moneter pada tahun 1998 di Indonesia, hal ini menyebabkan perajin tenun ikat di Bandar Kidul gulung tikar. Meski begitu masih ada yang bertahan menekuni kerajinan tenun ikat dan perlahan-lahan dapat mengembangkan usahanya, selang beberapa waktu kemudian muncul generasi baru dan membuka usaha penenunan di Bandar Kidul. Kini ada sekitar 10 (sepuluh) pelaku usaha penenunan di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul. Kampung tenun ikat ini memproduksi kain tenun ikat dan sarung. Kain tenun ikat ini dibuat dengan berbagai bahan dasar yang berbeda, mulai dari bahan katun, semi sutera, dan sutera serta dengan harga yang berbeda pula. Mulai dari Rp 50.000 per meter hingga ratusan ribu per meternya dan sarung dijual dengan kisaran Rp 180.000. Kini pelaku usaha yang ada disana sudah banyak memiliki karyawan yang rutin mengerjakan 450 potong hingga 550 potong kain tenun ikat dan menjual lebih dari 1000 potong kain tenun ikat dalam satu bulan. Dari usaha tenun ikat tersebut, pelaku usaha bisa mengantongi omzet 25 juta rupiah hingga 30 juta rupiah dalam satu bulan. Pemasukan tersebut bukan termasuk dalam orderan seragam dan lain sebagainya yang bisa mencapai ratusan potong dalam sekali pesan. Usaha tenun ikat di Bandar Kidul ini semakin hari semakin

meningkat, dengan upaya yang dilakukan melalui pengembangan UMKM dalam meningkatkan ekonomi masyarakat pelaku usaha. (tibk.web.id)

Seiring dengan perkembangannya, pada tahun 2015 Pemerintah Kota Kediri telah membuat peraturan melalui Surat Keputusan Walikota Kota Kediri bahwa Kampung industri tenun ikat sebagai kampung unggulan yang berada di Kelurahan Bandar Kidul. Kampung industri tenun ikat dibentuk supaya para perajin tenun ikat yang berada di kawasan tersebut bisa bertumbuh bersama dan saling mendukung. Salah satunya dengan cara berbagi pesanan jika sedang banjir pesanan. Sesuai dengan keputusan Pemerintah Kota Kediri mengenai kampung tenun ikat sebagai kampung unggulan, dimulai dari Pemerintah Kota Kediri yang membuat peraturan bahwa semua kantor dinas pemerintah maupun kantor swasta dan sekolah diwajibkan untuk memakai baju dengan bahan kain tenun ikat produksi Bandar Kidul. Hal ini dapat membantu para perajin untuk dapat mengembangkan usahanya.

Adanya pengembangan UMKM di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul ini agar lebih terkoordinasi terlebih juga dalam keikutsertaan dalam pelatihan-pelatihan maupun ide-ide pengembangan usaha. Pengembangan UMKM dilakukan dengan memberikan fasilitas berupa tenaga pendamping. Tenaga pendamping ini berperan sebagai fasilitator, motivator, serta alat penghubung antara perajin tenun ikat dengan Bank Indonesia sebagai pemberdaya masyarakat perajin tenun ikat. selain itu, fasilitas yang lain adalah dengan melakukan studi banding ke sentra UMKM yang sudah maju untuk meningkatkan keterampilan para perajin. Lebih dari itu, perajin tenun ikat Bandar Kidul juga

diberikan akses untuk mengikuti pameran dagang, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta. Bank Indonesia juga membuka akses promosi pada pelaku UMKM. Pengembangan UMKM ini dilakukan dengan mengintegrasikan beberapa konsep yang diarahkan untuk membantu pelaku UMKM agar dapat berkembang. Pengembangan UMKM di kampung industri tenun ikat dilakukan dengan mengikutsertakan pelaku usaha secara langsung agar masyarakat mampu menjadi pengusaha yang mandiri dan mampu bersaing dengan baik di pasar lokal maupun mancanegara. Dengan membentuk kelompok usaha yang baik, hal ini akan membantu para perajin untuk bisa terus berkembang dan maju.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas maka Bank Indonesia Kota Kediri memiliki komitmen dalam mengimplementasikan CSR dengan memberikan pengembangan UMKM di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul Kota Kediri. CSR Bank Indonesia merupakan sebuah bentuk kepedulian kepada masyarakat dan lingkungan disekitar. Selain itu, untuk melihat proses pelaksanaan CSR melalui program pengembangan UMKM serta apakah CSR melalui program pengembangan UMKM di Bank Indonesia Kota Kediri sudah berjalan efektif dan tepat sasaran untuk meningkatkan perekonomian dan edukasi masyarakat. Selain itu, mengetahui bagaimana dampak dari pelaksanaan program tersebut kepada masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti bermaksud untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul **“PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) MELALUI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (Studi Terhadap Program**

Corporate Social Responsibility Bank Indonesia di Kampung Industri Tenun Ikat Bandar Kidul Kota Kediri

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pengembangan UMKM Kampung Industri Tenun Ikat di Bandar Kidul melalui *Corporate Social Responsibility Bank Indonesia Kota Kediri*?
2. Bagaimana dampak pengembangan UMKM Kampung Industri Tenun Ikat di Bandar Kidul melalui *Corporate Social Responsibility Bank Indonesia Kota Kediri*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini memiliki tujuan, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan pengembangan UMKM di Kampung Industri Tenun Ikat Bandar Kidul melalui *Corporate Social Responsibility Bank Indonesia Kota Kediri*.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan dampak pengembangan UMKM di Kampung Industri Tenun Ikat Bandar Kidul melalui *Corporate Social Responsibility Bank Indonesia Kota Kediri*.

D. Kontribusi Penelitian

1. Bagi Teoritis

Dapat menjadi sumber informasi, referensi, dan kajian bagi kalangan akademis yang berminat untuk membahas lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan dampak pengembangan UMKM di Kampung Industri Tenun Ikat Bandar Kidul melalui *Corporate Social Responsibility Bank Indonesia Kota Kediri*.

2. Bagi Praktis

Dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan yang obyektif bagi organisasi atau perusahaan dalam mengambil keputusan untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan dan dampak *Corporate Social Responsibility*.

E. Sistematika Penulisan

Untuk dapat menyampaikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi-informasi dan hal-hal yang dibahas tiap bab. Proposal skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian baik secara teoritis maupun praktis serta sistematika penulisan yang mencakup mengenai utaian tentang substansi skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori sebagai kerangka acuan pemikiran dalam pembahasan yang akan diteliti dan sebagai dasar analisis yang diambil dari berbagai literatur yang terkait dengan penelitian ini, kerangka pikir teoritsi, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang pengertian beberapa variabel penelitian yang sudah ditentukan, jumlah sampel yang diteliti, jenis sumber data, cara pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan untuk menguji kebenaran penelitian ini.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti atau hasil dari penelitian yang didalamnya menguraikan d gambaran umum lokasi penelitian serta membahas dan menganalisis data-data yang didapat dari hasil penelitian dan pengolahan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah disusun dan saran yang diberikan oleh penulis yang diharapkan mampu menjadi masukan bagi Bank Indonesia Kota Kediri dalam pelaksanaan pengembangan UMKM di Kampung Industri Tenun Ikat Bandar Kidul Kota Kediri maupun di Kampung Unggulan lain dalam masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Good Corporate Governance* (GCG)

1. Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)

Governance dalam terjemahannya adalah pengaturan yang dalam konteks *Good Corporate Governance* (GCG) adalah tata pamong. *Corporate governance* dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan seperti pemegang saham atau pemilik modal, komisaris atau dewan pengawas, dan Direksi guna untuk meningkatkan keberhasilan suatu usaha dan akuntabilitas dari perusahaan terhadap perwujudan nilai pemegang saham dalam jangka waktu yang panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, yang berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika perusahaan.

Terdapat beberapa pengertian tentang *corporate governance* yang dikeluarkan oleh beberapa pihak baik dalam perspektif yang sempit (*shareholder*) dan dalam perspektif yang luas (*stakeholder*), namun pada umumnya menuju pada suatu maksud dan pengertian yang sama. Definisi lain, memandang *corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang mengacu kepada hubungan diantara tiga kelompok dalam menentukan arah dan kinerja perusahaan (Monks dan Minow dalam Djanegara, 2008:8). Konsep tata kelola perusahaan menurut Solomon dan Solomon yaitu *corporate governance* adalah “sistem *check dan*

balance antara pihak-pihak internal dan eksternal perusahaan yang memberikan keyakinan bahwa perusahaan menjalankan akuntabilitasnya kepada semua *stakeholders* dan bertindak dalam kerangka pertanggungjawaban untuk seluruh area aktivitas perusahaan” (Solomon dan Solomon dalam Djanegara 2008:8).

Dengan kata lain *corporate governance* mengacu pada metode dimana suatu organisasi diatur, dikelola, diarahkan, atau dikendalikan dan tujuan-tujuannya dapat tercapai. Berdasarkan pasal 1 surat KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMN, Effendi dalam Tadikapury (2011:6) menyatakan :

“*Corporate Governance* merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka waktu yang panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, dan dengan berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”.

Secara definitif *Good Corporate Governance* merupakan sebuah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, yakni pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk dapat memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya, dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Secara singkat, ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG ini, yaitu *fainess*, *tranparancy*, *accountability*, dan *responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena dalam penerapannya secara konsisten dapat terbukti guna meningkatkan kualitas laporan keuangan, dan juga dapat mencatat prinsip GCG yang diterapkan dengan konsisten dapat

menjadi penghambat dari aktivitas rekayasa kinerja yang akan mengakibatkan laporan keuangan dengan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.

Di Indonesia mulai menerapkan prinsip GCG sejak menandatangani *letter of intent* (LOI) dengan IMF, yang salah satu bagian pentingnya adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia. (YPPMI & SC, 2002). Sejalan dengan hal tersebut, maka Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menerapkan standar GCG yang telah diterapkan di tingkat internasional. Namun, menyadari bahwa masih banyak pelaporan mengenai rendahnya tanggungjawab perusahaan yang tidak menerapkan GCG dengan baik. Banyak perusahaan yang menerapkan prinsip GCG hanya karena dorongan regulasi dan menghindari sanksi yang ada dan dibandingkan dengan yang menganggap dari prinsip tersebut sebagai bagian dari budaya perusahaan.

2. **Lingkup *Good Corporate Governance***

The Organization for Economic and Development atau sering disebut dengan OECD memberikan suatu pedoman tentang hal-hal yang perlu diperlukan agar tercipta *good corporate governance* dalam suatu perusahaan dalam Sutedi (Tadikapury, 2012:12), sebagai berikut :

- a. Perlindungan terhadap hak-hak dalam *corporate governance* yang harus mampu melindungi hak-hak dari pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas.
- b. Perlakuan yang setara kepada seluruh pemegang saham.

- c. Peranan dari pemangku kepentingan yang berkaitan dengan perusahaan yang dikelola.
- d. Pengungkapan dan transparansi.
- e. Tanggung jawab dewan komisaris atau direksi

3. **Prinsip *Good Corporate Governance***

Pada prinsipnya *corporate governance* menyangkut kepentingan para pemegang saham, perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, peranan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam *corporate governance*.

Terdapat berbagai macam peraturan dan sistem yang mengatur tentang keseimbangan dalam pengelolaan perusahaan, sehingga perlu dibentuk prinsip-prinsip yang harus dipatuhi untuk menuju tata kelola perusahaan yang baik. Menurut Sutedi (Tadikapury, 2011:8-9) terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam *good corporate governance*, yaitu:

a. *Transparency* (Keterbukaan)

Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada *stakeholders* harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan transparan. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap resiko dan keuntungan dari investasinya. Kurangnya pernyataan yang berkaitan dengan keuangan sehingga menyulitkan pihak luar dalam menentukan apakah perusahaan tersebut memiliki uang yang menumpuk dalam tingkat yang akan mengkhawatirkan.

b. *Accountability* (Pertanggung jawaban)

Akuntabilitas adalah suatu kejelasan dalam fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban pada organ tubuh perusahaan sehingga dalam pengelolaan perusahaan dapat terlaksana dengan efektif. Pengelolaan perusahaan harus didasarkan pada pembagian kekuasaan pada manajer perusahaan, yang bertanggung jawab pada pengoperasian perusahaan setiap hari, dan pemegang saham yang diwakili oleh dewan direksi. Dewan direksi diharapkan untuk menetapkan kesalahan dan pengawasan.

c. *Fairness* (Kesetaraan)

Kesetaraan merupakan suatu perlakuan yang sama atau adil dan setara dalam memenuhi hak-hak dari *stakeholder*. Selain itu, dalam pengelolaan perusahaan perlu menekankan kesetaraan, terutama untuk pemegang saham minoritas. Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya.

d. *Sustainability* (Kelangsungan)

Kelangsungan adalah bagaimana perusahaan dapat terus beroperasi dan menghasilkan suatu keuntungan. Ketika perusahaan negara dapat menghasilkan keuntungan mereka juga harus dapat memberikan insentif bagi para pegawainya agar tetap terus bertahan dan berhasil. Selain itu juga mereka juga harus tanggap terhadap lingkungan, memperhatikan hukum, memperlakukan pekerja secara adil, dan menjadi karyawan yang

baik. Dengan demikian, akan menghasilkan keuntungan yang lama bagi *stakeholder*-nya.

Sedangkan berdasarkan KEPMEN BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 yang dirumuskan oleh OECD (Trager, 2003:53) mengenai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, sebagai berikut :

- a. Transparansi atau keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan sebuah keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai suatu perusahaan.
- b. Kemandirian, yakni suatu keadaan atau kondisi dimana perusahaan perusahaan dikelola dengan profesional tanpa benturan kepentingan pribadi dan penaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- c. Akuntabilitas yaitu mengenai kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif.
- d. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuain dalam suatu pengelolaan pada perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- e. Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak dari *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan definisi tentang prinsip tentang *Good Corporate Governance* yang telah ditulis diatas yakni bahwa perusahaan harus memiliki sikap yang bertanggung jawab, terbuka, adanya kesetaraan, kemandirian, dan keberlanjutan kepada semua *stakeholder* agar tercipta pada perusahaan yang baik.

B. Corporate Social Responsibility (CSR)

1. Pengertian Corporate Social Responsibility (CSR)

Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah ada sejak dahulu dan makin populer saat ini, namun definisi tunggal dari CSR itu sendiri belum ada. Terdapat banyak definisi mengenai konsep CSR. *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) misalnya, mendefinisikan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan sebagai “*Continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large.* Maksudnya adalah “komitmen dunia usaha untuk terus menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas” (Wibisono, 2007).

Magnan dan Ferrel (2004) dalam Susanto (2007), memberi definisi CSR sebagai “*A bussiness acts in socially responsible manner when its decision and account for and balance diverse stakeholders interest*”. Dalam definisi tersebut ditekankan bahwa perlunya memberikan perhatian secara seimbang terhadap kepentingan *stakeholders* yang beragam dalam setiap keputusan dan tindakan

yang diambil oleh para pelaku bisnis melalui perilaku yang secara sosial bertanggung jawab.

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu konsep dimana perusahaan memutuskan secara sukarela untuk berkontribusi pada suatu masyarakat agar menjadi lebih baik (Lubis, dkk, 2006). Pada dasarnya CSR menggambarkan suatu konsep dimana perusahaan mengintegrasikan perhatian sosial dan lingkungan dalam operasional bisnisnya dan dalam interaksi perusahaan dengan stakeholders-nya berdasarkan prinsip sukarela. *Corporate Social Responsibility* (CSR) memiliki implikasi penting untuk seluruh pelaku ekonomi, sosial, dan pemerintah.

Banyaknya definisi CSR tersebut, konsep ini menawarkan sebuah kesamaan, yaitu keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis dan perhatian terhadap aspek sosial serta lingkungan (Wibisono, 2007). Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan dalam kegiatannya juga harus memperhatikan tiga hal yaitu profit, masyarakat dan lingkungan. Ketiganya harus berjalan secara sinergis dan berkesinambungan agar tercipta iklim perusahaan yang baik sehingga eksistensi perusahaan juga terjamin dengan citra atau reputasi positif yang didapatnya dari konsumen dan masyarakat.

2. **Manfaat *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Seperti yang dikemukakan oleh Untung (2009:6-7) mengenai manfaat dari *Corporate Social Responsibility* bagi perusahaan yakni sebagai berikut :

- a. Mempertahankan dan mendongkrak citra merk bagi perusahaan yang bersangkutan
- b. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial
- c. Mereduksi resiko bisnis pada perusahaan
- d. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha
- e. Membuka peluang pasar yang lebih luas
- f. Mereduksi biaya, misalnya seperti yang terkait pada dampak pembuangan limbah perusahaan
- g. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*
- h. Memperbaiki hubungan dengan *regulator*
- i. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan
- j. Peluang dalam mendapatkan pekerjaan.

Sedangkan menurut Gurvy Kavei seperti yang dikutip dalam Wahyudi (2008:124-125) yang menegaskan bahwa dalam setiap perusahaan yang mengimplementasikan *Corporate Social Responsibility* dalam aktivitas usahanya akan mendapatkan 5 (lima) manfaat utama yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan profitabilitas dan kinerja financial yang akan lebih kokoh.
- b. Meningkatkan akuntabilitas, assesment, dan komunikasi investasi.
- c. Mendorong komitmen karyawan, karena mereka merasa diperhatikan dan dihargai.
- d. Menurunkan kerentanan gejolak dengan komunitas.
- e. Mempertinggi reputasi perusahaan dan *corporate branding*.

3. **Bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Pemahaman tentang CSR pada umumnya berkisar pada tiga hal pokok, yang pertama, suatu peran yang sifatnya sukarela (*voluntary*) dimana suatu perusahaan dapat membantu mengatasi masalah sosial dan lingkungan, oleh karena itu perusahaan memiliki kehendak bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perain ini; yang kedua, kedermawanan (*filanthropi*) dengan tujuan memberdayakan sosial dan perbaikan lingkungan akibat eksplorasi. Dan yang ketiga, CSR sebagai bentuk kewajiban (*obligation*) perusahaan untuk peduli terhadap dan mengentaskan krisis kemanusiaan dan lingkungan yang terus meningkat.

Pemahaman tentang CSR selanjutnya didasarkan oleh pemikiran bahwa bukan hanya Pemerintah melalui penetapan kebijakan publik (*public policy*), tetapi juga perusahaan harus bertanggung jawab terhadap masalah-masalah sosial. Bisnis didorong untuk mengambil pendekatan pro terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Konsep CSR juga dilandasi oleh argumentasi moral. Tidak ada satu perusahaan pun yang hidup terisolasi. Perusahaan hidup di dalam dan bersama suatu lingkungan. Perusahaan dapat hidup dan dapat tumbuh berkat masyarakat dimana perusahaan itu berada menyediakan berbagai infrastruktur umum bagi kehidupan perusahaan tersebut, antara lain dalam bentuk jalan, transportasi, listrik, pemadam kebakaran, hukum dan penegakannya oleh penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim).

Pola atau bentuk CSR berkembang dari yang bentuk *charity principle* kepada *stewardship principle* (Anne, 2005). Berdasarkan *charity principle*,

kalangan masyarakat mampu memiliki kewajiban moral untuk memberikan bantuan kepada kalangan kurang mampu. Jenis bantuan perusahaan ini sangat diperlukan dan penting, khususnya pada masa atau sistem negara dimana tidak terdapat sistem jaminan sosial, jaminan kesehatan bagi orang tua, dan tunjangan bagi penganggur. Sedangkan dalam *stewardship principle*, korporasi diposisikan sebagai *public trust* karena menguasai sumber daya besar dimana penggunaannya akan berdampak secara fundamental bagi masyarakat. Oleh karenanya perusahaan dikenakan tanggung jawab untuk menggunakan sumber daya tersebut dengan cara-cara baik dan tidak hanya untuk kepentingan pemegang saham tetapi juga untuk masyarakat secara umum.



Gambar 2.1 Pola *Stewardship Principle*, Sumber: (Anne, 2005)

Dengan demikian korporasi dewasa ini memiliki beberapa aspek tanggung jawab. Korporasi harus dapat mengelola tanggung jawab ekonominya kepada pemegang saham, memenuhi tanggung jawab hukum dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertanggung jawab sosial kepada para *stakeholder* (pemegang kepentingan).

Dalam menyikapi CSR, terdapat pendapat yang setuju dan juga yang menolaknya. Argumentasi yang mendukung dan menyatakan bahwa CSR diperlukan untuk hal-hal sebagai berikut (Anne, 2005):

1. Menyeimbangkan antara kekuatan korporasi dengan aspek tanggung jawab;
2. Mengurangi adanya regulasi pemerintah (yang berlebihan);
3. Meningkatkan keuntungan jangka panjang;
4. Meningkatkan nilai dan reputasi korporasi;
5. Memperbaiki permasalahan sosial yang disebabkan oleh perusahaan.

Sedangkan argumentasi yang menentang menyatakan bahwa pada dasarnya CSR hanya (Anne, 2005):

1. Menurunkan efisiensi ekonomi dan keuntungan usaha;
2. Membuat biaya perusahaan lebih tinggi dibandingkan kompetitornya
3. Menimbulkan biaya tersembunyi yang secara tidak langsung akan dibebankan kepada stakeholder;
4. Mensyaratkan tambahan kemampuan sosial yang sebenarnya tidak dimiliki oleh perusahaan; dan
5. Membebankan tanggung jawab kepada perusahaan yang seharusnya dibebankan kepada individu.

Bentuk tanggung jawab sosial yang ideal tentunya bukan hanya muncul semata-mata untuk bisa membangun reputasi, namun justru sudah muncul sejak sebuah organisasi berdiri. Sehingga turut pula tertuang dalam visi, misi, dan tujuan organisasi. Sehingga pada akhirnya aktivitas tanggung jawab sosial adalah bagian integrasi; dari manajemen strategik. Dengan turut ambil bagian dalam isu sosial, maka organisasi menunjukkan cerminan dari realitas organisasi yang peduli terhadap fenomena sosial, sudah pasti akan melibatkan publiknya. Dengan demikian harmonisasi dari sebuah hubungan yang dibina oleh organisasi memperoleh wujud nyata yang akan memberikan manfaat bukan hanya bagi nama baik organisasi namun juga kepada masyarakat luas.

Seperti yang dikemukakan oleh Kotler dan Lee (2005) yang dikutip oleh Marnelly (2012:23) ada enam bentuk program yang dijalankan oleh perusahaan guna mendukung masalah-masalah sosial dan memenuhi komitmen untuk tanggung jawab sosial perusahaan yaitu sebagai berikut :

a. *Cause Promotion*

Salah satu bentuk dari program CSR yang ditunjukkan dengan kepedulian perusahaan terhadap isu-isu tertentu yang sedang beredar dalam masyarakat, kemudian perusahaan mengajak seluruh masyarakat untuk ikut berpartisipasi peduli pada isu tersebut.

b. *Cause Related Marketing*

Bentuk CSR yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, yakni dimana suatu ketika kita membeli sebuah produk tertentu dan atau kita disarankan untuk membeli produk tertentu yang ternyata beberapa persen dari penjualan produk tersebut akan disumbangkan untuk mengatasi dan mencegah masalah tertentu.

c. *Corporate Social Marketing*

Merupakan bahwa sebuah perusahaan memiliki target atau sasaran untuk mengubah perilaku masyarakat terhadap isu-isu yang berkembang kurang baik menjadi baik.

d. *Corporate Philanthropy*

Adalah salah satu bentuk CSR yang berupa pemberian kontribusi atau bantuan kepada masyarakat perorangan maupun lembaga atau kelompok yang membutuhkan bantuan baik dalam bentuk dana ataupun jasa.

e. *Corporate Volunteering*

Bahwa perusahaan akan melibatkan karyawannya dalam kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan tempatnya bekerja, perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk mengikuti kegiatan CSR tersebut pada jam kerja dan tetap mendapatkan gaji

f. *Social Responsibility Bussiness Practice*

Yakni adalah sebuah inisiatif dari sebuah perusahaan untuk mengadopsi dan mengatur praktik bisnis seperti sistem kerja dan investasinya guna untuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melindungi lingkungan.

4. **Prinsip *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Pada prinsipnya CSR merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan para *stakeholder* dalam arti luas daripada sekedar kepentingan perusahaan belaka. Meskipun secara moral adalah baik suatu perusahaan mengejar keuntungan, bukan berarti perusahaan dibenarkan mencapai keuntungan tersebut dengan mengorbankan kepentingan-kepentingan pihak lain yang terkait. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan kegiatan dari usahanya yang mempunyai dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap *stakeholder*-nya dan lingkungan dimana perusahaan melakukan aktivitas usahanya. Sehingga secara positif, hal ini bermakna bahwa setiap perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya sedemikian rupa, pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan para *stakeholders*-nya dengan memerhatikan kualitas lingkungan kearah yang lebih baik.

Berkaitan dengan hal tersebut, John Elkngston's berdasarkan pengertian CSR mengelompokkan CSR atas tiga aspek yang lebih dikenal dengan istilah “*Triple Bottom Line (3BL)*”. Ketiga aspek itu meliputi kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi (*economic prosperity*), peningkatan kualitas lingkungan (*environmental quality*), dan keadilan sosial (*sosial justice*). Ia juga menegaskan bahwa suatu perusahaan yang ingin menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) harus memperhatikan “triple P” yaitu *profit, planet, and people*. Bila dikaitkan antara 3BL dengan “triple P” dapat disimpulkan bahwa “*Profit*” sebagai wujud aspek ekonomi, “*Planet*” sebagai wujud aspek lingkungan dan “*People*” sebagai aspek sosial (Wibisono, 2007).

Pada tahun 2002, *Global Compact Initiative* menegaskan kembali tentang triple P sebagai tiga pilar CSR dengan menyatakan bahwa tujuan bisnis adalah untuk mencari laba (*profi*), mensejahterakan orang (*people*), dan menjamin keberlanjutan kehidupan (*planet*). Ketiga aspek itu diwujudkan dalam kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Aspek Sosial, Ekonomi, dan lingkungan.

No	Aspek	Muatan
1.	Sosial	Pendidikan, pelatihan, kesehatan, perumahan, penguatan kelembagaan (secara internal, termasuk kesejahteraan karyawan) kesejahteraan sosial, olahraga, pemuda, wanita, agama, kebudayaan, dan sebagainya
2.	Ekonomi	Kewirausahaan, kelompok usaha bersama/unit mikro kecil dan menengah (KUB/UMKM), agrobisnis, pembukaan lapangan kerja, infrastruktur ekonomi dan usaha produktif lainnya.

3.	Lingkungan	Penghijauan, reklamasi lahan, pengelolaan air, pelestarian alam, ekowisata penyehatan lingkungan, pengendalian polusi, serta penggunaan produksi dan energi secara efisien.
----	------------	---

Memahami begitu luasnya cakupan ruang lingkup CSR tersebut, sedangkan masing-masing perusahaan mempunyai karakter dan kondisi yang berbeda-beda. Kondisi ini akan berdampak pada implementasi CSR yang berbeda-beda pula. Namun bila dilihat secara komprehensif dapat dikelompokkan atas enam bidang, yaitu (Busyra, 2010):

a. Bidang Ekonomi

CSR di bidang ekonomi dapat dirumuskan sebagai kewajiban untuk berperan serta dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, bukan hanya internal, akan tetapi juga eksternal. Implikasinya pun banyak, seperti penciptaan lapangan kerja, produksi barang dan jasa yang bermanfaat bagi konsumen, tidak memperlebar jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin, dan secara internal memberikan imbalan yang adil, wajar, dan layak bagi para anggota organisasi.

b. Bidang Politik

Para manajer dan seluruh karyawan suatu organisasi adalah warga suatu masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana warga lainnya. Oleh karena itu, mereka mempunyai kewajiban dibidang politik seperti turut menjaga stabilitas politik dimasyarakat dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah.

c. Bidang Sosial

Sebagaimana halnya dengan bidang-bidang lainnya, perusahaan pun mempunyai kewajiban di bidang sosial yang mencakup berbagai aspek, seperti tanggung jawab untuk turut serta memajukan kegiatan pendidikan pada semua jenjang mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah lanjutan, pendidikan tinggi, mendorong dan mendukung terselenggaranya kegiatan pendidikan non-formal yang berlangsung seumur hidup, mendukung program pemberantasan tuna aksara, mendorong kreativitas masyarakat di bidang seni, termasuk seni musik, seni tari, dan seni lukis. Hal penting dari bidang sosial ialah kebiasaan menggunakan bahasa nasional dengan cara yang benar, seperti dalam proses berkomunikasi antar individu dan antar kelompok dalam perusahaan.

d. Bidang Legal

Logika dan rasa tanggung jawab sebagai warga negara menyatakan bahwa ketaatan pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesungguhnya bukan hanya merupakan salah satu tanggung jawab sosial seseorang, akan tetapi merupakan keharusan mutlak. Dengan ketaatan itu, tertib sosial akan terpelihara dan keseimbangan antara hak dan kewajiban seseorang dapat diwujudkan. Apabila seorang usahawan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, sesungguhnya ia melakukan sesuatu yang akhirnya merugikan perusahaan sendiri.

e. Bidang Etika

Sudah umum diakui dan diterima sebagai kenyataan bahwa dalam kehidupan bersama, terdapat norma moral dan etika yang mengikat semua anggota masyarakat, termasuk kalangan dunia usaha. Meskipun sulit mengatakan bahwa norma moral dan etika tersebut berlaku secara universal, akan tetapi di lingkungan suatu masyarakat tertentu biasanya terdapat kesempatan tentang norma moral dan etika yang berlaku bagi mereka. Dan kondisi ini pun berlaku pada dunia perusahaan, karena perusahaan merupakan anggota dari suatu komunitas yang dalam artifisial sama dengan manusia sendiri.

f. Diskresi (kebebasan mengambil keputusan)

Berkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen dalam penyelenggaraan kegiatan perusahaan, termasuk dalam pengambilan keputusan tentang kewajiban sosial yang akan ditunaikan. Penggunaan diskresi tersebut berbeda antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya, karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Akan tetapi, penggunaan diskresi harus digunakan untuk memperkuat komitmen manajemen untuk memikul tanggung jawab sosialnya.

5. **Tahap Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Pelaksanaan CSR terdapat beberapa tahapan. Tahap pertama, perusahaan disebut *economic animal* yang concer-nya bersifat ekonomis dengan fokus hanya diprofit. Tahap berikutnya, perusahaan mulai *social awards*, tapi mungkin masih merupakan derma. Donasi-donasi untuk *charity* kemudian ke *community affairs*, yaitu pemberian strategis berlatar belakang bisnis (termasuk *cause-related*

marketing). Tahap berikutnya adalah *corporate community investment*, yaitu kemitraan strategis yang diinisiasi oleh perusahaan. Perusahaan bersama masyarakat desa membuat program membersihkan kali, membuat kompos, dan menanam ikan gurame; ada edukasi dalam program ini. Pada akhirnya perusahaan akan menjadi *sustainable business integrated into business function, goals, strategy*. *Corporate Social Responsibility (CSR)* semacam ini tetap memikirkan *bottom line profit* (Tim We Pe, 2005 dalam Mulyadi, 2007).

Besarnya tanggung jawab sosial yang harus dipikul oleh perusahaan terhadap lingkungannya tidak berarti bahwa perusahaan kemudian berdiri sendiri. Sementara dalam *community development* itu sendiri erat kaitannya dengan pihak-pihak terkait yang dinamakan *stakeholders*. Penamaan tersebut digunakan karena program *community development* juga menuntut partisipasi para *stakeholder* untuk memaksimalkan peran mereka masing-masing, sehingga tercipta suatu sinergi yang harmonis.

6. **Rekomendasi *Corporate Social Responsibility (CSR)***

Dalam rangka menciptakan *Good CSR* harus memadukan empat prinsip *good corporate governance*, yakni *fairness transparency, accountability dan responsibility* secara harmonis. Ditambah dengan harus menggabungkan kepentingan *shareholders* dan *stakeholders*. Karenanya, CSR tidak hanya fokus pada hasil yang ingin dicapai. Melainkan pula pada proses untuk mencapai hasil tersebut. Lima langkah di bawah ini bisa dijadikan panduan dalam merumuskan program CSR:

- a. *Engagement*. Pendekatan awal kepada masyarakat agar terjalin komunikasi dan relasi yang baik. Tahap ini juga bisa berupa sosialisasi mengenai rencana pengembangan program CSR. Tujuan utama langkah ini adalah terbangunnya pemahaman, penerimaan dan *trust* masyarakat yang akan dijadikan sasaran CSR. Modal sosial bisa dijadikan dasar untuk membangun ”kontrak sosial” antara masyarakat dengan perusahaan dan pihak-pihak yang terlibat.
- b. *Assessment*. Identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat yang akan dijadikan dasar dalam merumuskan program. Tahapan ini bisa dilakukan bukan hanya berdasarkan *needs-based approach* (aspirasi masyarakat), melainkan pula berpijak pada *rights-based approach* (konvensi internasional atau standar normatif hak-hak sosial masyarakat).
- c. *Plan of action*. Merumuskan rencana aksi. Program yang akan diterapkan sebaiknya memerhatikan aspirasi masyarakat (*stakeholders*) di satu pihak dan misi perusahaan termasuk *shareholders* di lain pihak.
- d. *Action and Facilitation*. Menerapkan program yang telah disepakati bersama. Program bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat atau organisasi lokal. Namun, bisa pula difasilitasi oleh LSM dan pihak perusahaan. Monitoring, supervisi dan pendampingan merupakan kunci keberhasilan implementasi program.
- e. *Evaluation and Termination or Reformation*. Menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program CSR di lapangan. Bila berdasarkan evaluasi, program akan diakhiri (*termination*) maka perlu adanya semacam

pengakhiran kontrak dan *exit strategy* antara pihak-pihak yang terlibat.

Misalnya, melaksanakan CSR melalui *capacity building* terhadap masyarakat (*stakeholders*) yang akan melanjutkan program CSR secara mandiri. Bila ternyata program CSR akan dilanjutkan (*reformation*), maka perlu dirumuskan *lessons learned* bagi pengembangan program CSR berikutnya. Kesepakatan baru bisa dirumuskan sepanjang diperlukan.

Dalam prakteknya, upaya CSR dapat ditelaah dan dilakukan dengan mengacu pada tiga sisi yaitu (Kartasasmita, 1996):

- a. *Enabling*. Adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena, kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
- b. *Empowering*. Adalah memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum

yang berlaku untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.

- c. *Protecting*. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Ketiga kerangka pemikiran tersebut harus ditambah dengan konsep *sustainability dan integrated development*. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, salah satu aspek mendasar dari CSR adalah *sustainability* atau berkelanjutan. Dimana setiap program dan kegiatan CSR tidak hanya dilaksanakan untuk jangka waktu pendek. Melainkan dapat diterapkan dalam kurun waktu tertentu dengan membuat serangkaian kegiatan, dengan memperhatikan faktor-faktor lain seperti lingkungan, sosial, religi. Sebagai contoh setelah masyarakat mendapatkan bantuan modal usaha, perusahaan membuat pelatihan dan pengusaha kecil dan mikro ini juga diajarkan cara untuk menjaga kelestarian lingkungan. Setelah usaha cukup maju masyarakat juga diajarkan bagaimana caranya untuk mengembangkan usaha tersebut, sehingga sumber daya lokal dapat terserap. Dengan pola pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi diharapkan dapat memberikan alternatif terobosan baru untuk

memberdayakan masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial dan lingkungan yang semakin kompleks dan rumit dalam dekade terakhir.

C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah pada Bab 1 Pasal 1 ayat (1, 2, 3, dan 4) menjelaskan tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar, yaitu:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, dan menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah dan Usaha Besar yang memenuhi kriteria usaha kecil
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, dan menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hal penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik

negara atau swasta, usaha patungan, dan daya asing yang meliputi kegiatan ekonomi di Indonesia.

Lebih lanjut UMKM menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Bab IV pasal 6 ayat (1, 2, dan 3) yaitu:

- 1) Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki usaha penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).

Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia kepada semua Bank Umum di Indonesia No. 17/19/DPUM, tanggal 8 Juli 2015 perihal pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam rangka pencapaian pangsa kredit atau pembiayaan UMKM oleh bank umum, diperlukan ketentuan pelaksanaan yang mengatur mengenai tata cara perhitungan dan pemantauan atas pencapaian pangsa kredit dan pembiayaan UMKM, pelaksanaan pola kerja sama yang ditetapkan,

kriteria dan prosedur penyediaan bantuan teknis, pemberian insentif dan pengenaan disinsentif, tata cara publikasi atas pencapaian kredit dan pembiayaan UMKM, kriteria dan tata cara pemberian penghargaan (*award*) kepada bank umum, pemantauan terhadap kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh bank umum syariah, serta tata cara penyampaian laporan pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum.

Dari penjelasan yang berkaitan dengan pengertian tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatas bahwa pada dasarnya definisi tentang Usaha Kecil adalah volume penjualan per tahun dan nilai riset diluar tanah dan bangunan.

2. Karakteristik UMKM

Karakteristik UMKM dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek permodalan dan aspek sumber daya manusia. Aspek ini merupakan faktor yang penting dyang dapat mendorong perkembangan usaha kecil menengah.

a) Aspek Permodalan

Permodalan pada UMKM merupakan salah satu hal yang penting dan salah satu hambatan juga dalam pengembangan UMKM hal ini terjadi karena ketersediaan modal yang terbatas. Modal adalah sumber-sumber ekonomi yang diciptakan oleh manusia dalam bentuk uang maupun barang. Modal dalam bentuk uang dapat digunakan oleh sektor produksi untuk membeli modal baru dalam bentuk barang baru lagi (Cahyono, 1983) dikutip dalam Tejasari (2008: 17-18). Salah satu bentuk permodalan bagi suatu usaha yaitu dalam bentuk kredit.

Berdasarkan tujuan penggunaannya, Bank Indonesia (1999) dikutip dalam Tejasari (2008: 18) yang membedakan kredit menjadi:

1. Kredit Konsumtif merupakan sebuah jenis kredit yang diberikan, misalnya saja kendaraan, peralatan, dan lain-lain yang sifatnya untuk tujuan konsumtif. Kredit ini digunakan untuk konsumsi secara pribadi dan dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.
2. Kredit modal kerja yaitu kredit yang digunakan untuk menambah modal kerja untuk membiayai pembelian modal bahan baku, biaya-biaya produksi, biaya pemasaran dan lain-lain dalam jangka waktu pendek, yaitu biasanya dalam jangka waktu satu tahun. Kredit ini digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
3. Kredit investasi merupakan kredit jangka menengah dan atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal beserta dengan jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, maupun ekspansi proyek yang sudah ada atau pendirian proyek baru.

b) Aspek Sumber Daya Manusia

UMKM merupakan usaha yang masuk dalam kategori usaha informal.

Sektor informal menurut Cahyono (1983) dikutip oleh Tejasari (2008: 19)

memiliki karakteristik, sebagai berikut:

- 1) Kegiatan usaha umumnya sederhana;
- 2) Skala usaha relatif kecil;
- 3) Usaha sektor informal umumnya tidak memiliki izin usaha;
- 4) Tingkat penghasilan sektor informal umumnya rendah jika dibandingkan dengan sektor formal.

Tenaga kerja sektor informal memiliki karakteristik tertentu, yaitu: 1) tenaga kerja sektor informal mudah keluar masuk pasar; 2) tidak memiliki ketrampilan yang memadai; 3) biasanya tidak atau memiliki sedikit pendidikan formal; 4) biasanya tenaga kerja dirangkap produsen dengan dibantu tenaga kerja keluarga.

3. Peran UMKM Bagi Perekonomian

UMKM memiliki peran yang penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satu peran UMKM yang paling krusial dalam peningkatan ekonomi adalah mengembangkan potensi dan dukungan penuh baik pemerintah,

swasta, dan masyarakat. Karakter yang fleksibel membuat UMKM dapat menggantikan dunia bisnis pada perusahaan-perusahaan besar.

Selain itu menurut Kuncoro (2002) yang dikutip oleh Tejasari (2008: 22) mengemukakan bahwa peran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada perekonomian Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

- 1) Kedudukan utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor;
- 2) Penyedia lapangan pekerjaan terbesar;
- 3) Pemain penting dalam kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat;
- 4) Pencipta pasar baru dan sumber inovasi;
- 5) Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor.

Kuncoro (2002) mengemukakan bahwa peran koperasi dan UMKM pada saat ini menjadi langkah yang sangat strategis dalam perekonomian nasional, sehingga perlu menjadi fokus dalam pembangunan ekonomi nasional pada masa yang akan datang. Pada umumnya UMKM berbasis pada ekonomi lokal dan kandungan impor yang rendah, serta hasilnya mampu untuk diekspor karena keunikannya, maka keberhasilan dalam pembinaan dan pengembangan UMKM dapat diyakini bahwa dapat memperkuat fondasi struktur dalam perekonomian nasional (Liana 2008: 104).

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi masyarakat karena sebagian jumlah penduduk memiliki pendidikan yang rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik tradisional maupun modern. Oleh karenanya, perlu dilakukan pemberdayaan UKM yang terstruktur dan berkelanjutan yang diharapkan dapat menyeleraskan struktur perekonomian

nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional diatas enam persen per tahun. Selain itu juga dapat mengurangi pengangguran terbuka, menurunkan angka kemiskinan, mendinamisasi sektor rill, dan dapat memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan UKM diarahkan pada upaya meningkatkan produktivitas dan daya saingnya, serta secara sistematis diarahkan pada upaya menumbuhkan wirausaha baru disektor-sektor yang memiliki produktivitas tinggi yang berbasis pengetahuan, teknologi, dan sumberdaya lokal (Gie Kian, K, 2003) dikutip dalam Tejasari (2008: 23).

D. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian, Strategi, dan Tahapan Pengembangan UMKM

Menurut Moekijat dalam Wijayanti (2002: 32) Pengembangan merupakan setiap usaha untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan sekarang maupun yang akan datang dengan mempengaruhi sebuah sikap atau menambah kecakapan. Sementara itu definisi lainnya adalah menurut Pamudji (1985: 7) yaitu:

“Pengembangan adalah suatu pembangunan yaitu untuk merubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi. Demikian juga mengandung makna sebagai pembaharuan yaitu melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu untuk menjadi lebih sesuai dan cocok dengan kebutuhan, menjadi lebih baik dan bermanfaat”.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengembangan merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam rangka memajukan, memperbaiki, meningkatkan, sesuatu yang sudah ada secara teratur dan bertahap menjadi sesuatu yang lebih baik dan bermanfaat. Adapun pengembangan usaha mikro

kecil dan menengah menurut Kartasasmita (1996: 5) meliputi beberapa aspek, antara lain:

1. Peningkatan akses kepada aset produktif, terutama modal, disamping teknologi, manajemen, dan segi lainnya.
2. Peningkatan akses pasar, yang meliputi suatu *spectrum* kegiatan yang luas, mulai dari pencadangan usaha hingga informasi pasar, bantuan produksi, serta sarana dan prasarana pemasaran. Khususnya bagi usaha kecil di pedesaan, serta sarana dan prasarana mendasar akan sangat membantu adalah sarana perhubungan.
3. Pelatihan-pelatihan mengenai pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk berusaha teramat penting. Namun, bersamaan juga perlu ditanamkan semangat jiwa wirausaha.
4. Kelembagaan ekonomi dalam arti luas adalah pasar. Maka memperkuat pasar adalah hal yang sangat penting, hal tersebut harus disertai dengan pengendalian agar proses berjalannya pasar tidak keluar dari apa yang diinginkan yang nantinya justru mengakibatkan kesenjangan. Untuk diperlukan intervensi-intervensi yang tepat dan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang mendasar dalam suatu ekonomi bebas, tetapi tetap menjamin terjadinya pemerataan sosial (*social equity*).
5. Kemitaraan usaha merupakan jalur yang penting dan strategis dan telah terbukti berhasil bagi pengembangan usaha ekonomi rakyat.

Perhatian untuk mengembangkan UMKM dilandasai oleh tiga hal, yaitu

- (1) UMKM intensif dalam menggunakan sumberdaya alam lokal, menyerap banyak tenaga kerja, penggunaan jumlah kemiskinan, pemerataan dalam distribusi pendapatan, dan pengembangan ekonomi di pedesaan; (2) merupakan penyumbang terbesar dalam sektor non migas terutama sektor industri pengolahan, garmen, tekstil, kerajinan lainnya; (3) adanya urgensi untuk struktur ekonomi yang berbentuk piramida yang menunjukkan adanya ketimpangan yang lebar antara pelaku usaha kecil dan besar dalam ekonomika Indonesia (Kuncoro, 2009: 326)

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 disimpulkan bahwa terdapat dua pendekatan utama dalam pengembangan UMKM, yaitu penciptaan iklim usaha, dan pembinaan dan pengembangan. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah melalui berbagai peraturan dan kebijakan diberbagai apek kehidupan ekonomi agar UMKM memperoleh kepastian, kesempatan, dan dukungan berwirausaha yang seluas-luasnya. Sementara pembinaan dan pengembangan adalah upaya perkuatan unit usaha untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan UMKM agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Tujuan dari pembinaan UMKM adalah (a) meningkatkan akses pasar dan memperbesar pangsa pasar; (b) meningkatkan akses terhadap sumber-sumber modal dan memperkuat struktur modal; (c) meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen; dan (d) meningkatkan akses dan penguasaan teknologi (Partomo dan Soedjoeno, 2002: 207). Strategi pembinaan yang dilakukan dapat diklarifikasikan dalam aspek manajerial, aspek permodalan, pengembangan program kemitraan, pengembangan sentra industri kecil dalam suatu kawasan dan pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu melalui kelompok usaha bersama dan koperasi (Kuncoro, 2004)

Partomo dan Soedjoeno (2002: 29) mengemukakan bahwa *teori dynamic* dan teori *resource-based strategy* adalah strategi perusahaan untuk pengembangan UMKM. *Resource-based strategy* adalah strategi perusahaan yang memanfaatkan sumber daya internal superior untuk menciptakan kemampuan inti dalam menciptakan nilai tambah untuk mencapai keunggulan komparatif dan kompetitif. Menurut Suparno (2009: 99) keunggulan komparatif adalah suatu prinsip umum

yang menerangkan keadaan dimana peniagaan yang menguntungkan, dapat timbul antara dua daerah ekonomi. Keunggulan komparatif timbul oleh karena *endowments* yang berbeda meliputi sumberdaya alam, modal, penduduk, dan sebagainya. Keunggulan kompetitif adalah suatu bentuk keunggulan yang tidak hanya bertumpu pada keberadaan sumberdaya yang dimiliki oleh suatu daerah, tetapi juga yang didapatkan dari daya saing yang dimiliki terhadap saingannya. Suatu daerah memiliki keunggulan kompetitif pada dasarnya memiliki kemampuan dalam hal produksi yang lebih efisien, walaupun tidak banyak sumberdaya yang dimilikinya.

Strategi pengembangan UMKM yang disampaikan oleh Partomo dan Soedjoeno (2002: 30-39) yaitu:

- 1) Kemitraan usaha, yaitu hubungan kerjasama antara berbagai pihak yang sinergis, bersifat sukarela, dan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, mendukung, dan menguntungkan dengan disertai pembinaan dan pengembangan UKM oleh usaha besar.
- 2) Bantuan keuangan. Pada umumnya permodalan UKM sangat lemah, baik ditinjau dari mobilisasi modal awal (start-up capital) dan akses modal kerja jangka panjang untuk investasi. Untuk memobilisasi modal awal perlu dipadukan tiga aspek yaitu bantuan keuangan, bantuan teknis, dan program penjaminan, sedangkan untuk meningkatkan akses permodalan perlu pengoptimalan peranan bank dan lembaga keuangan mikro untuk UMKM.
- 3) Model ventura. Pada umumnya UMKM kurang paham atau tidak menyukai prosedur atau persyaratan yang diwajibkan oleh lembaga perbankan, hal ini menimbulkan terjadinya distorsi dalam pembiayaan UMKM. Oleh karena itu, modal ventura dapat dijadikan sebagai alternatif sumber pembiayaan UKM. Menurut Keppres No. 61 Tahun 1998, perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pengembangan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Usaha modal ventura memberikan pembiayaan dengan cara ikut

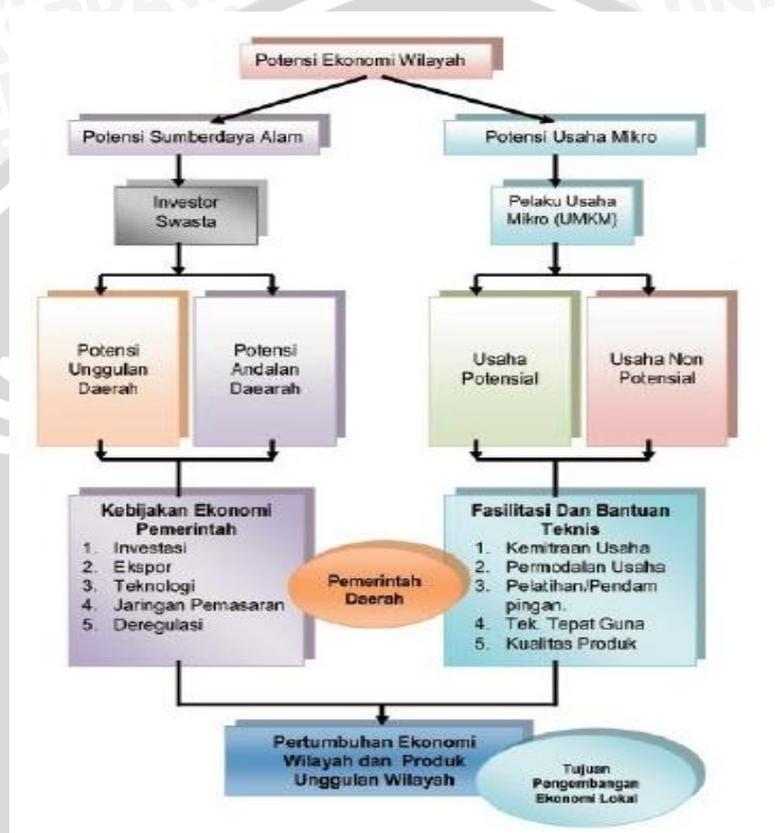
melakukan penyertaan modal langsung ke dalam perusahaan yang dibiayai. Perusahaan yang dibiayai tersebut disebut perusahaan pasangan usaha (*investee company*), sedangkan pemodal yang membiayai disebut perusahaan pemodal (*investment company* atau *venture capitalist*).

Sama halnya seperti yang dikemukakan oleh Sriyana (2010) mengenai pengembangan UMKM yang dapat dilakukan strategi (1) kemudahan dalam akses permodalan; (2) bantuan pembangunan prasarana; (3) pengembangan skala besar; (4) pengembangan jaringan usaha; (5) pengembangan SDM; (6) peningkatan akses teknologi; dan (7) mewujudkan iklim bisnis yang lebih kondusif.

Dalam pembinaan terhadap UMKM diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan UMKM sehingga semakin memperkokoh ketahanan prekonomian dalam era globalisasi dan perdagangan bebas. Afifah (2009) mengemukakan bahwa ada dua langkah strategis yang bisa diusulkan untuk pengembangan UMKM, yaitu *demand pull strategy* dan *supply push strategy* mencakup strategi perkuatan sisi permintaan, yang bisa dilakukan dengan perbaikan iklim bisnis, fasilitasi mendapatkan HAKI (paten), fasilitasi pemasaran domestik dan luar negeri, dan menyediakan peluang pasar. Langkah strategi lainnya adalah *supply push strategy* yang mencakup strategi pendorong sisi penawaran, bantuan teknologi/mesin/alat, dan peningkatan kemampuan SDM.

Menurut Hidayatullah dan Thomas (2011: 36) langkah konkrit yang perlu dilakukan dalam pengembangan UMKM adalah dengan pelatihan dan pendampingan masyarakat dalam menciptakan atau mengelola usaha ekonomi di pedesaan, memikirkan bentuk-bentuk kemitraan usaha bagi usaha ekonomi, memfasilitasi akses permodalan usaha, penggunaan teknologi tepat guna dan

peningkatan kualitas. Detail langkah pengembangan ekonomi lokal dan UMKM dapat dilihat pada Gambar 2.2 Model Pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti berikut:



Sumber: Hidayatullah dan Thomas (2011: 36)

Selanjutnya dijelaskan bahwa detail model tersebut diatas dibagi menjadi empat tahap. Setiap tahapan merupakan bagian program yang harus diselesaikan dengan baik dan utuh, sehingga dapat menjadi dasar bagi tahapan selanjutnya. Adapun empat tahapan tersebut adalah:

- 1) Tahap perencanaan, meliputi (a) Identifikasi Prioritas Kegiatan Ekonomi yang Memiliki Daya Saing; (b) Identifikasi Prioritas dalam Menciptakan

- Lingkungan Usaha yang Kondusif; (c) Perumusan Rencana Pengembangan Ekonomi Kawasan; (d) Petunjuk Pedoman dan Petunjuk Teknis Operasional;
- 2) Tahap Pelaksanaan dan Penguatan, meliputi (a) Sosialisasi Program Tingkat Kabupaten; (b) Musyawarah Desa (Mudes); (c) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan; (d) Memfasilitasi dan mendampingi masyarakat; (e) Membentuk Kemitraan Stakeholders; (f) Mempromosikan Klaster; (g) Penguatan Kelembagaan Pengelola Pengembangan Ekonomi Lokal;
 - 3) Tahap Pemandirian, tahapan ini bertujuan untuk mendorong kinerja kelembagaan ekonomi masyarakat agar dapat menjalankan kegiatan pengembangan ekonomi kawasan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal. Tahap pemandirian difokuskan pada pengembangan SDM, modal usaha dan jaringan pemasaran produk. Pengelolaan pada tahap ini dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat, dengan pembinaan dan pengawasan berkala.
 - 4) Pengendalian Program, dilaksanakan untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan prinsip, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan, berhasil secara optimal, dan mempunyai dampak yang cukup strategis. Pengendalian program meliputi pelaporan, pengawasan publik, monitoring, dan evaluasi.
 - 5) Pendampingan, dilaksanakan untuk memfasilitasi pengelolaan program sehingga dapat berjalan secara optimal sesuai dengan mekanisme, sistem, dan prosedur yang ada.

2. Aktor Pengembangan UMKM

Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah sebagai salah satu kebijakan nasional yang memiliki peran penting dalam membangun dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Sumbangan usaha mikro kecil dan menengah dalam sektor pembangunan nasional merupakan wujud nyata yang tidak perlu disangsikan lagi, seperti dapat menyerap banyak tenaga kerja. Disisi yang lain adalah potensi yang dimiliki oleh pengusaha UMKM cukup besar dan tersebar dipelosok tanah air; terutama di pedesaan. Berdasarkan Pasal 16 UU No. 20 Tahun 2008 menjelaskan tentang aktor yang berperan dalam pengembangan UMKM, sebagai berikut:

- a) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai pihak yang memfasilitasi usaha dalam bidang:
 - 1) Produksi dan pengolahan
 - 2) Pemasaran
 - 3) Sumber daya manusia, dan
 - 4) Desain dan teknologi
- b) Dunia usaha dan masyarakat berperan secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1.
- c) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan, prioritas, interensitas, dan jangka waktu pengembangan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3. Dampak Pengembangan UMKM

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (dalam Purwati, 2012: 147) dampak merupakan suatu pengaruh yang menimbulkan suatu akibat, atau benturan yang cukup besar sehingga dapat menimbulkan perubahan baik secara positif maupun negatif. Pengaruh itu sendiri merupakan suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.

Definisi lain mengenai dampak menurut Soemarwoto (dalam Purwati, 2012: 147) adalah suatu perubahan sebagai aktivitas dan aktivitas itu dapat dilakukan oleh manusia yang mengarah kepada perubahan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa dampak merupakan suatu perubahan keadaan baik secara positif maupun negatif akibat adanya aktivitas manusia yang mempengaruhi kehidupannya. Dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah dampak lebih diartikan sebagai luaran yang diperoleh akibat adanya pengembangan usaha, luaran yang dimaksud berhubungan dengan kesejahteraan ekonomi pelaku usaha.

Dalam penelitian terdahulu ada berbagai macam dampak yang muncul akibat adanya pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Hasil penelitian dilakukan oleh Tejasari (2008: 61) tentang peranan sektor usaha kecil, dan menengah dalam penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menyimpulkan bahwa jumlah unit usaha UKM, kredit modal kerja, dan PDB UKM secara signifikan mempunyai pengaruh yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Selain itu, penelitian lainnya dilakukan oleh Rifa'i (2013: 136) tentang efektivitas pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) krupuk ikan dalam program pengembangan labsite pemberdayaan masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, menyimpulkan bahwa pengembangan UMKM krupuk ikan berdampak pada eksistensi usaha itu sendiri. Dari hasil-hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pengembangan yang dilakukan terhadap UMKM berdampak signifikan pada perekonomian masyarakat khususnya pada

penyerapan tenaga kerja dan juga pada peningkatan produksi yang dihasilkan UMKM yang nantinya mempengaruhi pendapatan pelaku usaha.

E. Perekonomian Masyarakat

1. Pengertian Perekonomian Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perekonomian berasal dari kata “ekonomi” yang ditambahkan dengan awalan “per” dan akhiran “an” yang merupakan kata benda dan memiliki arti tindakan (aturan atau cara) berekonomi. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Dengan demikian perekonomian masyarakat adalah tindakan atau tata cara dalam melakukan tindakan ekonomi dari sejumlah orang di suatu tempat yang memiliki kebudayaan tertentu.

Pengertian ekonomi rakyat muncul sebagai akibat dari adanya kesenjangan sosial ekonomi masyarakat. Adanya kesenjangan ekonomi rakyat yang muncul pada perbedaan pendapat dan kesejahteraan yang mencolok antara satu kelompok yang lain dalam masyarakat. Ada kelompok masyarakat yang tingkat pendapatan dan kesejahteraannya sangat tinggi, ada kelompok masyarakat yang pendapatan dan kesejahteraannya rendah, dan ada pula kelompok masyarakat yang tingkat pendapatan dan kesejahteraannya sangat rendah atau miskin. Kegiatan ekonomi masyarakat lapisan bawah inilah yang disebut dengan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat memiliki ciri-ciri yang bersifat tradisional, skala usaha kecil, dan kegiatan usaha ekonomi bersifat sekedar untuk bertahan hidup (*survival*) dalam (Kartasmita, 1996: 217).

Sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia disebut dengan demokrasi ekonomi atau ekonomi Pancasila. Dalam demokrasi ekonomi, produksi dilakukan sebagai usaha bersama untuk kepentingan bersama. Emokrasi ekonomi mengutamakan peranan aktif dalam masyarakat dalam kaitannya dengan kegiatan pembangunan. Pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Sedangkan dunia usaha berkewajiban memberi tanggapan yang positif terhadap pengarahan, bimbingan, dan berusaha menciptakan iklim yang sehat dalam kegiatan yang dilakukan. Landasan demokrasi ekonomi adalah Pancasila, sedangkan landasan konstitualnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 merupakan dasar demokrasi ekonomi yang menjelaskan bahwa:

- 1) Perkonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Berdasarkan Undang-Undang tentang Perekonomian Nasional pasal 33 Tahun 1945 bahwa perekenomian nasional dimaksudkan sebagai rambu-rambu yang sangat penting dalam upaya mewujudkan demokrasi ekonomi di Indonesia. Hal tersebut dipandang sangat penting agar seluruh sumber daya ekonomi nasional dapat digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan paham demokrasi ekonomi sehingga mendatangkan manfaat optimal bagi seluruh warga negara dan

penduduk Indonesia. Lebih lanjut, sumber-sumber yang ada dapat dialokasikan secara efisien untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara sehat dan sekaligus mencapai keadilan. Kemajuan ekonomi di seluruh wilayah tanah air harus diperhatikan keseimbangannya dan dalam pelaksanaan otonomi daerah harus pula dijaga kesatuan ekonomi nasional.

Seperti yang dikemukakan oleh Aminoto dalam Bahari (1997: 217) yang menyatakan bahwa:

“Pengembangan ekonomi rakyat bagi LSM adalah suatu upaya untuk mengembangkan suatu sistem, cara atau tata kehidupan sehari-hari rakyat kecil dan tingkat kehidupan menengah kebawah dalam suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan utuhnya. Sistem ini mengandung norma-norma yang mampu mengatur perilaku dan pola pikir pelaku-pelaku ekonomi baik sebagai produsen, distributor, maupun sebagai konsumen barang dan jasa”.

Lebih lanjut Aminoto menjelaskan tentang pengembangan ekonomi rakyat, yaitu bahwa golongan rakyat kecil menengah kebawah pada umumnya berada di wilayah perdesaan (85% dari masyarakat desa) serta di wilayah perkotaan (di kawasan kumuh dan kampung) yang dapat diukur dari perekonomiannya (pendapatan, pengeluaran, skala usaha, kekayaan, penguasaan sumber daya) yang rendah atau pada tingkat menengah ke bawah, yang terdiri dari petani, pengebun, nelayan, pekerja, karyawan, prajurit, pegawai, pedagang, perajin, pengusaha, penjual jasa, koperasi yang memiliki skala kegiatan kecil dan menengah kebawah.

Penjelasan yang lebih luas lagi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan perekonomian rakyat menurut Aminoto dalam Bahari, 1997: 18) yakni sebagai berikut:

“Motif ekonomi dan watak kewirausahaan golongan rakyat kecil dan menengah kebawah berkembang lambat karena terpengaruh oleh 3 (tiga) faktor yaitu, kultural, natural, dan struktural. Faktor yang pertama adalah faktor kultural, yakni dimana perilaku dan pola pikir mereka yang sebagian besar masih berdasarkan pada watak pembawaan asli rakyat desa, seperti bekerjasama, gotong royong, saling membantu, dan partisipasi dalam musyawarah. Faktor yang kedua adalah natural yang artinya masih bersifat alami (karena keadaan sumber daya tidak mendukung). Dan yang ketiga adalah faktor yang bersifat struktural yakni sesuatu hal yang disebabkan oleh sistem dan struktur sosio-ekonomi-politik nasional dan global yang kurang menguntungkan. Ketertinggalan dalam pengetahuan, ketrampilan, keahlian, teknologi, dan manajemen juga mempersulit langkah mereka untuk maju bersama-sama”

Aminoto juga menambahkan 6 (enam) bidang utama yang menjadi landasan dalam ekonomi rakyat, sebagai berikut:

- a. Kelembagaan ekonomi rakyat
- b. Perangkat kebijaksanaan dan pengaturan
- c. Pola pemanfaatan sumber daya
- d. Distribusi sumber daya dan pendapatan
- e. Proses pengambilan keputusan ekonomi
- f. Sistem insentif.

Sesuai dengan penjelasan mengenai perekonomian nasional atau perekonomian masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa perekonomian masyarakat merupakan suatu bagian sistem dari ekonomi nasional yang berusaha untuk mengejar ketertinggalan pengetahuan, keterampilan, keahlian, teknologi, dan manajemen untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa merugikan yang lain.

2. Pengembangan Ekonomi Rakyat

Pengembangan Ekonomi Rakyat (*Community Economic Development*) merupakan sebuah strategi utama dalam pengembangan masyarakat tetapi tidak semata-mata merespon kemerosotan ekonomi lokal dan lemahnya harapan untuk

merevitalisasi dari luar, baik dari pasar swasta melalui investasi maupun dari dukungan program-program pemerintah. (Shragge, 1997 dalam Lessy, 2012: 78)

Seperti yang dikemukakan oleh Aminoto dalam Bahari (1997: 210) mengenai strategi dan kebijaksanaan ekonomi rakyat adalah memusatkan dana dan daya untuk perbaikan kehidupan dan nasib rakyat (pedesaan dan kampung) tersebut walaupun demikian strategi dan kebijaksanaan juga harus didukung oleh kemajuan wilayah perkotaan, terutama industrialisasi yang berkaitan dengan produksi pertanian dan sektor informal (agro industri). Industrialisasi pedesaan berfungsi melancarkan seluruh mekanisme kegiatan ekonomi kerakyatan yang mencakup sektor pertanian, industri, jasa angkutan dan aspek produksi, distribusi, dan konsumsi lainnya.

Lebih lanjut, Aminoto menjelaskan 6 (enam) strategi pengembangan ekonomi rayat yang mengikuti beberapa prinsip dasar:

- a. Orientasi oada kebutuhan utuh masyarakat, dan bukan pasar bebas kapitalistik, tetapi pasar yang terencana sesuai dengan kebutuhan rakyat banyak dengan tahap-tahap industrialisasi dan modernisasi.
- b. Mengutamakan manfaat bagi rakyat banyak yang dihasilkan, bukan laba yang sebesar-besarnya bagi persorangan atau kelompoknya.
- c. Melibatkan rakyat banyak dan melestarikan lingkungan, bukan produksi massal yang termurah biayanya
- d. Meningkatkan tanggung jawab sosial dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, bukan promosi pasar yang direkayasa.

- e. Peningkatan kualitas hidup rakyat banyak, bukan akumulasi dan pemusatan modal serta sumber daya pada sekelompok kecil orang per orang.
- f. Memperhatikan etika kehidupan ekonomi untuk menjamin rasa keadilan, moral, disiplin, dan keamanan usaha.

Pengembangan ekonomi rakyat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Prinsip dasarnya adalah untuk mengembangkan kemampuan rakyat secara mandiri dalam berusaha mencapai peningkatan kesejahteraan tersebut. Dasar utamanya adalah apresiasi terhadap kemampuan rakyat yaitu sendiri, dilanjutkan dengan usaha untuk memperkuat dan meningkatkan keberdayaannya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam melakukan penelitian. Dengan metode penelitian, peneliti dapat menentukan secara pasti arah kegiatan dan urutan-urutan bagaimana peneliti tersebut dilakukan, sehingga dapat tercapai maksud dan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sebagaimana dikatakan oleh Bogdan Dan Taylor (1975: 5) yang dikutip dalam Moleong (2010: 4) menjelaskan, bahwa metodologi kualitatif sebagai sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata terlulis maupun lisan dan perilaku yang dapat diamati.

Menurut Moleong (2010: 11) dalam metode penulisan diskriptif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan karena adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan akan berkemungkinan untuk menjadi sebuah kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi sebuah gambaran dalam penyajian laporan tersebut.

Melalui pendekatan kualitatif pada tahap awal peneliti akan melakukan sebuah pengamatan (observasi), selanjutnya akan dilakukan pengumpulan data yang mendalam sehingga dapat ditemukan hipotesis yang berupa hubungan antara gejala dalam hal ini yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis secara

mendalam terkait dengan dampak *corporate social responsibility* Bank Indonesia terhadap pengembangan UMKM di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul Kota Kediri. Fenomena yang diangkat merupakan hal yang dinamis dan dapat berubah sesuai dengan data yang terdapat di lapangan, maka dari itu dipilihlah metode deskriptif kualitatif.

B. Fokus Penelitian

Penetapan fokus pada penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi sebuah objek kajian, agar peneliti tidak terjebak pada banyak data di lapangan dan untuk menghindari dari data yang tidak relevan dengan permasalahan serta tujuan penelitian. Spradley dalam Sugiyono (2008: 377-379) menyatakan bahwa fokus ini merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Fokus penelitian adalah masalah utama yang ingin peneliti amati dan deskripsikan. Dalam penelitian kualitatif ini, penentuan fokus lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang diperoleh oleh peneliti. Fokus penelitian ini meliputi :

1. Pelaksanaan pengembangan UMKM di Kampung Industri Tenun Ikat Bandar Kidul melalui *Corporate Social Responsibility* Bank Indonesia Kota Kediri, meliputi:
 - a. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* dalam aspek ekonomi
 - b. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan UMKM
 - c. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* kepada masyarakat dan sarana dalam pengembangan UMKM

2. Dampak Pengembangan UMKM di Kampung Industri Tenun Ikat Bandar Kidul melalui *Corporate Social Responsibility* Bank Indonesia Kota Kediri:
 - a. Meningkatnya kesejahteraan ekonomi pelaku usaha dan masyarakat
 - b. Meningkatnya tenaga kerja yang diserap dalam pengembangan UMKM

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan keadaan yang sebenarnya dari objek yang akan diteliti, guna memperoleh data yang akurat atau mendekati kebenaran. Disini peneliti memilih dan menetapkan tempat penelitian pada Bank Indonesia Kota Kediri. Pemilihan ini di dasarkan pada pertimbangan dan alasan bahwa penulis ingin mengetahui dampak CSR Bank Indonesia terhadap pengembangan UMKM di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul Kota Kediri, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kota Kediri merupakan salah satu kota terbesar ketiga di Jawa Timur setelah kota Surabaya dan kota Malang menurut jumlah penduduk. Kota Kediri dikenal sebagai pusat perdagangan utama terbesar di Indonesia dan pernah dinobatkan sebagai *Most Recommended City for Investement* pada tahun 2010. Sebagai kota yang sedang mempersiapkan diri dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berdaya saing, berakhlak, dan sebagai pusat pendidikan.
- 2) Lokasi ini dipilih karena Bank Indonesia merupakan Bank Sentral Republik Indonesia yang memiliki tujuan utama untuk menjaga kestabilan

nilai rupiah, sepatutnya apabila Bank Indonesia memiliki program CSR yang baik sebagai kepekaan dan kepedulian kepada masyarakat dan Kampung Industri Tenun Ikat Bandar Kidul Kota Kediri merupakan sebuah ikon baru sebagai kampung unggulan di Kota Kediri, sehingga sudah sepatutnya industri tersebut bisa lebih berkembang dengan baik.

- 3) Situs penelitian menunjukkan dimana sebenarnya peneliti dapat menangkap keadaan dari obyek yang akan diteliti, sehingga data-data yang dipeoleh benar-benar relevan dan akurat. Situs penelitian ini adalah kantor Bank Indonesia Kota Kediri Jl. Brawijaya No. 2 Kediri 64123 Telp (0354) 68112, 696655 dan Kampung Industri Tenun Ikat Bandar Kidul Kota Kediri Jl. KH Agus Salim VIII, Email tibk@gmail.com.

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland sebagaimana yang telah dikutip oleh Moleong (2010: 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan untuk selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen dan lai-lain. Dalam penelitian ini digunakan dua macam data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber atau responden dan dicatat untuk pertama kalinya. Data ini meliputi informasi yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian, dalam hal ini adalah data mengenai dampak *Corporate Social Responsibility* Bank Indonesia terhadap pengembangan UMKM di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul Kota Kediri.

Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai sumber data primer adalah:

- a. Ibu Merry Komala Dewi selaku perwakilan dari Bank Indonesia Kota Kediri.
- b. Bapak Joko Susilo selaku Asisten Manajer UMKM dari Bank Indonesia Kota Kediri.
- c. Bapak Eko Hariyanto selaku ketua kelompok dalam pemberdayaan Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul Kota Kediri.
- d. Ibu Siti Ruqayah selaku anggota kelompok Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul Kota Kediri.
- e. Bapak Khaerul Anam selaku anggota kelompok Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul Kota Kediri.
- f. Bapak Erwin Wahyu selaku anggota kelompok Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul Kota Kediri.
- g. Bapak Sudarmanto selaku anggota kelompok Kampung tenun ikat Bandar Kidul Kota Kediri.

2. Data sekunder

Data sekunder menurut Rochmah dan Nugroho (2009: 162) adalah data yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti, artinya melalui satu atau lebih yang bukan menurut peneliti sendiri. Dalam hal ini data sekunder diperoleh melalui jurnal dan studi pustaka, catatan-catatan dari instansi terkait yang berkaitan dengan penelitian yang mendukung isi dan pembahasan yang akan diperlukan dalam penelitian ini. data-data sekunder dalam penelitian ini antara lain:

- a. Gambaran umum mengenai wilayah Kota Kediri meliputi sejarah, keadaan geografis, pembagian administratif, dan data pemerintahan.
- b. Gambaran umum mengenai Bank Indonesia Kota Kediri yang meliputi tugas pokok dan fungsi dan program kerja Bank Indonesia Kota Kediri.
- c. Gambaran umum mengenai Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul Kota Kediri.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sebelum melakukan penelitian, penulis harus tahu mengenai apa yang harus diteliti dan data-data apa saja yang harus diambil dan dikumpulkan untuk melengkapi laporan penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Bank Indonesia Kota Kediri dan untuk kelancaran pengambilan/ pengumpulan data-data dari Bank Indonesia tersebut, penulis meminta surat pengantar atau surat izin penelitian dari Universitas untuk diberikan di Bank Indonesia Kota Kediri. Dalam pengumpulan data tersebut penulis melakukan teknik-teknik pengumpulan data agar data yang diperoleh valid dan lengkap dalam menyusun laporan penelitian.

Dikemukakan Gunawan (2014: 142), teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dibagi menjadi empat bagian yaitu observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Menurut Kartono (Gunawan, 2014: 143) pengertian observasi ialah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis

dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Selanjutnya, dikemukakan tujuan observasi adalah mengerti ciri-ciri dan luasnya signifikansi dari interelasinya elemen-elemen tingkah laku manusia pada fenomena sosial serba kompleks dalam pola-pola kultur tertentu. Patton (2001) berpendapat bahwa observasi merupakan metode pengumpulan data esensial dalam penelitian, apalagi penelitian dengan pendekatan kualitatif.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi di Lingkungan Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dengan menggunakan pengamatan, peneliti sebagai pemeran serta. Hal ini dipilih, agar segala macam informasi dapat dengan mudah peneliti peroleh.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Lincoln dan Guba dalam (Moloeng, 2015:186) menegaskan maksud dari wawancara, antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain.

Ada dua cara membedakan tipe wawancara dalam tataran yang luas, yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur (Gunawan, 2014:162).

a. Wawancara terstruktur

Merupakan jenis wawancara yang digunakan untuk keperluan penelitian yang sudah pasti. Proses wawancara terstruktur dilakukan dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara tertulis yang bersisi pertanyaan yang akan

diajukan kepada informan. Dalam wawancara terstruktur, pertanyaan-pertanyaan, runtunannya, dan perumusan kata-katanya sudah “harga mati”, artinya sudah ditetapkan dan tak boleh diubah-ubah.

b. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara ini bersifat lebih luwes dan terbuka. Wawancara tidak terstruktur dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur karena dalam melakukan wawancara dilakukan secara alamiah untuk menggali idea tau gagasan informan secara terbuka dan tidak menggunakan pedoman wawancara

Dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dilakukan yang dilakukan untuk menanyakan sejumlah pertanyaan kepada beberapa narasumber antara lain;

1. Manajer Bank Indonesia Kota Kediri selaku pengawas jalannya Program Sosial Bank Indonesia di Kota Kediri.
2. Asisten Manajer Bidang UMKM Bank Indonesia Kota Kediri selaku pelaksana program sosial Bank Indonesia Kota Kediri.
3. Masyarakat Kampung Industri Tenun Ikat Bandar Kidul sebagai penerima bantuan atau program corporate social responsibility Bank Indonesia Kota Kediri.

3) Dokumentasi

Menurut Bungin (Gunawan, 2014: 177) teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah

berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2007: 82). Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber noninsani. Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman. Lincoln dan Guba (1994) mengartikan rekaman sebagai setiap tulisan atau pernyataan yang dipersiapkan oleh dan untuk individual atau organisasi dengan tujuan membuktikan adanya suatu peristiwa. Sedangkan kata dokumen digunakan untuk mengacu setiap tulisan selain rekaman, yaitu tidak dipersiapkan secara khusus untuk tujuan tertentu, seperti surat-surat, buku harian, naskah pidato, dan sebagainya.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk memperoleh atau menggunakan data dalam rangka memecahkan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Instrumen penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dan juga memiliki kedudukan yang strategis didalam proses kegiatan penelitian yang digunakan sebagai alat bantu bagi peneliti untuk mengumpulkan data (Arikunto, 2009:134). Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Peneliti sendiri

Peneliti sebagai instrumen utama (*instrument guide*) dan mendasar. Didalam melakukan pengamatan mengenai implementasi analisis jabatan dan analisis beban kerja. Secara langsung peneliti menggunakan panca

indera untuk melihat, mendengar, serta merasakan fenomena yang ada disekitarnya, terutama yang berhubungan dengan fokus penelitian.

2. Pedoman wawancara (*interview guide*)

Pedoman wawancara atau *interview guide* merupakan rangkaian daftar pertanyaan untuk meleakukan pengumpulan data, yang berkaitan dengan implementasi analisis jabatan dan analisis beban kerja hal ini berfungsi agar wawancara yang dilakukan sesuai dengan topik penelitian. Peneliti menggunakan pedoman wawancara yang berisikan serangkaian pokok-pokok pertanyaan yang diajukan kepada informan.

3. Catatan lapangan (*field note*)

Catatan lapangan atau *field note* merupakan sebuah catatan peneliti yang didapatkan dari hasil mencatat ataupun meng-*copy file* atau data yang berkaitan dengan dampak program CSR terhadap masyarakat. Catatan lapangan memiliki fungsi untuk mencatat hasil wawancara atau pengamatan yang berisi tentang data atau informasi yang didapat dari Bank Indonesia Kota Kediri terkait fokus penelitian.

4. Perangkat penunjang

Perangkat penunjang yaitu berupa alat tulis untuk membantu dalam mencatat hal-hal penting dilapangan, kamera untuk pengambilang gambar yang ada kaitannya penelitian dan *tape recorder* untuk merekam saat wawancara dengan informan di Bank Indonesia Kota Kediri.

G. Analisis Data

Analisis data hasil merupakan tahapan dan bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian ilmiah, karena dengan menggunakan analisis data akan memberikan pemaknaan bagi data dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir peneliti. Menurut Miles dan Huberman (1984) yang dikutip Sugiyono (2011: 246) mengemukakan bahwa analisis data merupakan suatu kegiatan pengolahan data agar dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Berikut adalah penjelasan analisis data yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014:10). Maksudnya adalah analisis data terdiri dari empat alur kegiatan, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut uraian empat alur tersebut menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014: 10):

1. Kondensasi data

Dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terperinci yang meliputi proses penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, peringkasan, dan mengubah data yang bersumber dari kumpulan catatan, *interview*, dokumen, dan sumber data empiris lainnya. Dengan cara penyederhanaan, data yang kita peroleh menjadi lebih kuat dan akurat. Data dan laporan lapangan yang sudah

disederhanakan, dirangkum, dan dipilah-pilah hal yang pokok, kemudian difokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode dan pentabelan). Pada tahap ini setelah data dipilah dan disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.

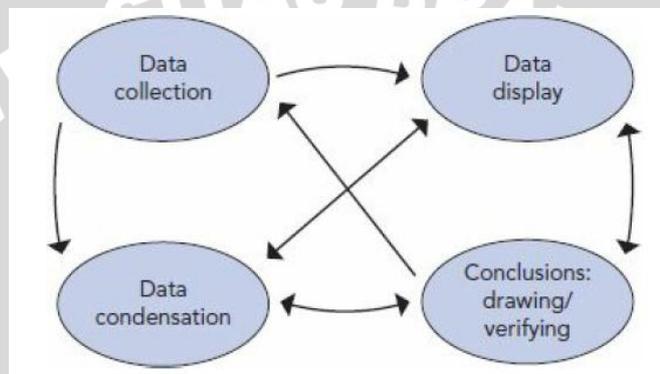
2. Penyajian data

Penyajian data dimaksudkan agar lebih mempermudah peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh. Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah dan disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai katagori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data kondensasi.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama kali memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, penjelasan-penjelasan serta alur sebab-akibat dan kemudian dituangkan dalam bentuk kesimpulan. Kesimpulan juga merupakan pembuktian sebagai proses analitis.

Pembuktian tersebut bisa saja sesingkat ide yang hanya lewat beberapa detik saja dalam pikiran saat sedang menulis, bisa juga datang dari ingatan tentang catatan lapangan, bisa sepenuhnya dan terperinci, dengan argumen yang panjang dan beberapa tinjauan dikembangkan kembali atau dengan usaha yang lebih luas mencari berbagai macam informasi kemudian menyalin penemuan tersebut kedalam kumpulan data yang lain.



Gambar 3.1 Model Analisis Data Miles, Huberman dan Saldana (2014:10)

BAB IV

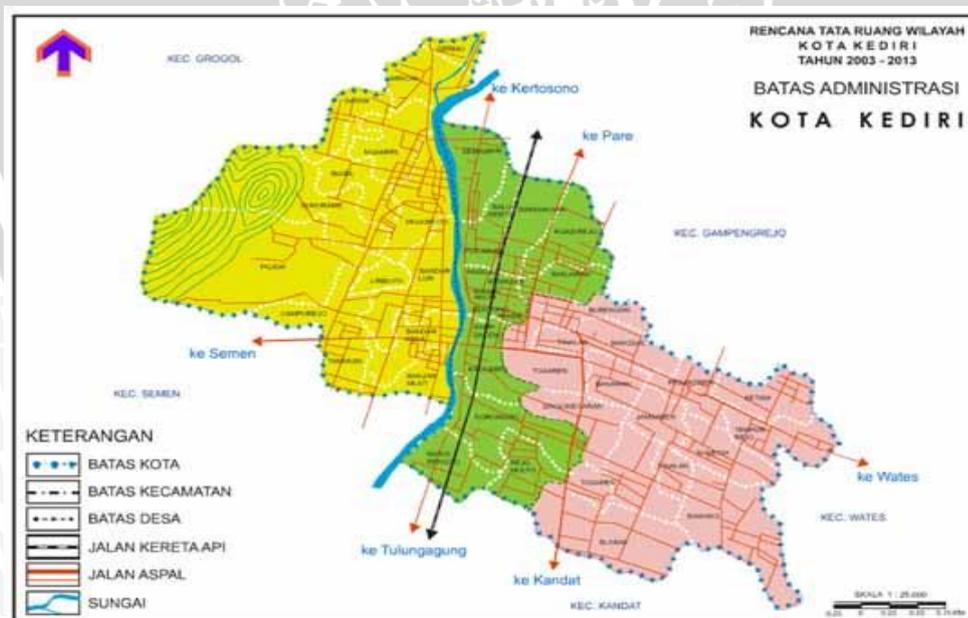
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Kediri

a) Sejarah Kota Kediri

Kota Kediri adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur Indonesia. Kota Kediri terletak 130 km sebelah barat daya Surabaya dan merupakan kota terbesar ketiga di Jawa Timur setelah Surabaya dan Malang berdasarkan jumlah penduduk. Kota Kediri memiliki luas wilayah 63,40 km² dan seluruh wilayahnya berbatasan dengan kabupaten kediri. Kota Kediri terbelah oleh sungai Brantas yang membujur dari selatan ke utara sepanjang 7 kilometer.



Gambar 4.1 Peta Kota Kediri

Awal mula Kediri sebagai pemukiman perkotaan dimulai ketika Airlangga memindahkan pusat pemerintahan kerajaannya dari Kahuripan ke Dahanapura, menurut Serat Calon Arang. Dahanapura (“Kota Api”) selanjutnya lebu dikenal sebagai Daha. Sepeninggal Airlangga, wilayah Medang dibagi menjadi dua: Panjalu di Barat dan Jenggala di timur. Daha menjadi pusat pemerintahan kerajaan Jenggala. Panjalu oleh penulis-penulis periode belakangan juga disebut sebagai Kerajaan Kediri, dengan wilayah kira-kira Kabupaten Kediri sampai Kabupaten Madiun sekarang.

Semenjak Kerajaan Tumapel (Singasari) menguat, ibukota Daha diserang dan kota ini menjadi kedudukan raja vazal, yang terus berlanjut hingga Majapahit, Demak, dan Mataram. Kediri jatuh ke tangan VOC sebagai konsekuensi Geger Pecinan. Jawa Timur pada saat itu dikuasai Cakraningrat IV, adipati Madura yang memihak VOC dan menginginkan bebasnya Madura dari Kasunanan Kartasura. Karena Cakraningrat IV keinginannya ditolak oleh VOC, ia memberontak. Pemberontakannya ini dikalahkan VOC, dibantu Pakubuwana II, sunan Kartasura. Sebagai pembayaran, Kediri menjadi bagian yang dikuasai VOC. Kekuasaan Belanda atas Kediri terus berlangsung sampai Perang Kemerdekaan Indonesia.

Perkembangan Kota Kediri menjadi swapraja dimulai ketika diresmikannya *Gemeente Kediri* pada tanggal 1 April 1906 berdasarkan *Staasblad* (Lembaran Negara) no. 148 tertanggal 1 Maret 1906. *Gemeente* ini menjadi tempat kedudukan Residen Kediri dengan sifat pemerintahan otonom terbatas dan mempunyai *Gemeente Raad* (“Dewan Kota”/DPRD) sebanyak 13 orang, yang

terdiri dari delapan orang golongan Eropa dan yang disamakan (Europeanen), empat orang Pribumi (Inlanders) dan satu orang Bangsa Timur Asing. Sebagai tambahan, berdasarkan Staasblad No. 173 tertanggal 13 Maret 1906 ditetapkan anggaran keuangan sebesar f. 15.240 dalam satu tahun. Baru sejak tanggal 1 Nopember 1928 berdasarkan Stbl No. 498 tanggal 1 Januari 1928, Kota Kediri menjadi "*Zelfstanding Gemeenteschap*" ("kota swapraja" dengan menjadi otonomi penuh).

Kediri pada masa Revolusi Kemerdekaan 1945-1949 menjadi salah satu titik rute gerilya Panglima Besar Jendral Sudirman. Kediri juga mencatat sejarah yang kelam juga ketika era Pemberontakan G30S PKI karena banyak penduduk Kediri yang ikut menjadi korbannya. Selain daripada itu pada tahun 2010 Kediri dinobatkan sebagai peringkat pertama Indonesia yaitu *Most Recommended City for Investement* berdasarkan survei oleh SWA yang dibantu oleh Business Digest, Unit bisnis riset grup SWA.

b) **Keadaan Geografis**

Sebagai wilayah kota yang merupakan salah satu Pemerintah Kota yang ada di wilayah propinsi Jawa Timur, Kota Kediri terletak di wilayah selatan bagian barat Jawa Timur. Kota Kediri dijadikan wilayah pengembangan kawasan lereng Wilis, dan sekaligus sebagai pusat pengembangan regional eks Wilayah Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri yang mempunyai pengaruh timbal balik dengan daerah sekitarnya.

Secara geografis, Kota Kediri terletak di antara 111,05 derajat-112,03 derajat Bujur Timur dan 7,45 derajat-7,55 derajat Lintang Selatan dengan luas 63,404 Km². Dari aspek topografi, Kota Kediri terletak pada ketinggian rata-rata 67 m di atas permukaan laut, dengan tingkat kemiringan 0-40%. Struktur wilayah Kota Kediri terbelah menjadi 2 bagian oleh sungai Brantas, yaitu sebelah timur dan barat sungai. Wilayah dataran rendah terletak di bagian timur sungai, meliputi Kec. Kota dan kec. Pesantren, sedangkan dataran tinggi terletak pada bagian barat sungai yaitu Kec. Mojoroto yang mana di bagian barat sungai ini merupakan lahan kurang subur yang sebagian masuk kawasan lereng Gunung Klotok (472 m) dan Gunung Maskumambang (300 m) sedang dibagian timur sungai merupakan lahan yang relatif subur dengan relief tanah yang datar. Di kaki Gunung Klotok terdapat situs sejarah berupa Goa Selomangleng, goa ini merupakan pesanggrahan Dewi Kilisuci putri Raja Airlangga dari Kerajaan Kahuripan. selain itu terdapat relief kisah Patih Butho Locoyo, yang setia mendampingi Dewi Kilisuci dan simbol Butho Locoyo ini menjadi Lambang Kota Kediri.

c) **Pembagian Administratif**

Secara administratif, Kota Kediri berada di tengah wilayah Kabupaten Kediri dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Kec. Gampengrejo dan Kec. Grogol
- Sebelah Selatan : Kec. Kandat dan Kec. Ngadiluwih
- Sebelah Timur : Kec. Wates dan Kec. Gurah
- Sebelah Barat : Kec. Banyakan dan Kec. Semen

Wilayah Kota Kediri, secara administratif terbagi menjadi 3 wilayah kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Kota, dengan luas wilayah 14,900 Km² terdiri dari 17 Kelurahan
2. Kecamatan Pesantren, dengan luas wilayah 23,903 Km² terdiri dari 15 Kelurahan
3. Kecamatan Mojoroto, dengan luas wilayah 24,601 Km² terdiri dari 14 Kelurahan.

4. Visi dan Misi

a. Visi

- i. Menata kota Kediri lebih sejahtera, berkeadilan, berdaya saing, berakhlak dan tanpa korupsi.

b. Misi

- i. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dengan memperluas partisipasi publik dalam pembangunan.
- ii. Mewujudkan Kota Kediri yang indah, nyaman dan ramah lingkungan.
- iii. Mewujudkan masyarakat yang agamis, bermoral, sejahtera, berbudaya, dan sebagai pusat oendidikan.
- iv. Memperkuat ekonomi kerakyatan menuju terwujudnya Kota Kediri sebagai pusat perdagangan, jasa, wisata, dan industri kreatif.

5. Lambang Kota Kediri



Gambar 4.2 Lambang Kota Kediri

- a. Berdasarkan Surat Keputusan DPRD sementara Kota Besar Kediri tgl. 30-3-1952 No. 22/DPRD-S/52 dan tgl. 21-IX-1953 No. 16/DPRD-S/53 yang menetapkan suatu lambang (Wapen) untuk Daerah Kota Besar Kediri, dan Surat Keputusan tersebut telah disahkan oleh Surat Keputusan Presiden RI No. 127/1954 dimuat dalam Berita Negara tahun 1954 No. 57.
- b. Berdasarkan Surat Keputusan DPRD-Kotapraja Kediri tgl. 3-3-1959 No. 5/DPRD/59 yang menimbang, bahwa disamping 'Lambang Pemerintah' Kotapraja Kediri perlu memiliki Panji, dan panji termaksud kemudian di dalam Diktum Pertama dari surat keputusan tersebut diatas, ditetapkan dalam 2 bentuk yaitu:

1. Panji Berbentuk Bendera
 - Ukuran 2:3
 - Warna dasar hijau agak tua

- Garis tepi berwarna kuning
 - Isi, di tengah-tengah lambang Kota Kediri
2. Panji berbentuk Perisai

- Ukuran 7:8
- Warna dasar hijau agak tua
- Garis tepi berwarna kuning
- Isi, di tengah-tengah lambang Kota Kediri

Kesimpulannya adalah warna dengan keberanian, kesucian, dan penderitaan dapat tercapai hasil yang gilang gemilang. Lambang Kediri tetap waspada dan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan Keberanian, Kesucian, Keteguhan dan tidak takut Penderitaan untuk mencapai hasil yang Gilang Gemilang (Aman dan Makmur).

2. **Gambaran Umum Bank Indonesia**

A. **Sejarah Bank Indonesia**

Bank Indonesia berasal dari *De Javasche* Bank N.V yang merupakan salah satu bank milik pemerintah Belanda. *De Javasche* Bank N.V didirikan pada zaman penjajahan Belanda, tepatnya pada tanggal 10 Oktober 1827. Kemudian *De Javasche* Bank N.V dinasionalisir pemerintah Republik Indonesia tanggal 6 Desember 1951 dengan UU. No 24 tahun 1951 menjadi bank milik pemerintah Republik Indonesia. selanjutnya berdasarkan Penetapan Presiden No. 17 tahun 1965, Bank Indonesia bersama dengan bank-bank yang lain dilebur ke dalam bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia (BNI). Bank Negara Indonesia

terdiri dari BNI Unit I, BNI Unit II, BNI Unit III, BNI Unit IV, dan BNI Unit V. Bank Negara Indonesia Unit I kemudian berfungsi sebagai Bank Sirkulasi, Bank Sentral dan Bank Umum dijadikan Bank Sentral Indonesia dengan UU No. 13 tahun 1968 status Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dikukuhkan lagi dalam UU RI No. 23 tahun 1999. Kantor pusat di Jakarta dan mempunyai kantor di seluruh wilayah Indonesia serta perwakilan-perwakilan di luar negeri.

Tugas-tugas Bank Indonesia sebagai bank to bank adalah mengatur, mengkoordinir, mengawasi serta memberikan tindakan kepada dunia perbankan. Bank Indonesia juga mengurus dana yang dihimpun dari masyarakat agar disalurkan kembali ke masyarakat benar-benar efektif penggunaannya sesuai dengan tujuan pembangunan. Peranan lain Bank Indonesia adalah menyalurkan uang terutama uang karta dimana Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk menyalurkan uang kartal. Disamping itu hubungan Bank Indonesia dengan Pemerintah adalah sebagai pemegang kas pemerintah. Begitu pula hubungan keuangan dengan dunia Internasional juga ditangani oleh Bank Indonesia seperti menerima pinjaman luar negeri.

B. Logo Bank Indonesia

Berdasarkan Surat Edaran Intern No.11/140/INTERN tanggal 29 Juni 2009, logo ataupun lambang dari Bank Indonesia adalah seperti yang terdapat pada gambar berikut :



Gambar 4.3 Logo Bank Indonesia

Logo Bank Indonesia berakar pada logo *De Javasche* Bank, dan telah mengalami proses metamorfosa yang panjang serta berliku. Dari tahun 1953 sampai 2015, logo Bank Indonesia sudah mengalami tujuh kali perubahan. Diawali berdirinya, logo Bank Indonesia mengadaptasi logo *De Javasche* Bank dengan mengubah huruf “J” menjadi “I” tanpa mengubah unsur lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman dan pertimbangan estetika serta citra bank sentral yang diembannya logo Bank Indonesia diubah menjadi solid, tegas, dan berwibawa.

Logo *De Javasche* Bank yang ditampilkan bukanlah logo resmi melainkan logo-logo yang muncul pada uang-uang *De Javasche* Bank. Logo bank Indonesia sampai akhir tahun 1980-an juga merupakan logo yang resmi. Baru tiga logo sejak 1990-an yang merupakan logo resmi yang digunakan sebagai logo korporat.

Perkembangan Logo Bank Indonesia dari Tahun 1980-an sampai 2000-an.





Gambar 4.4 Perkembangan Logo Bank Indonesia

C. Status dan Kedudukan Bank Indonesia

1. Sebagai Lembaga Negara yang Independen

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Undang-Undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara independen dan bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya.

Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Untuk lebih menjamin independensi tersebut, undang-undang ini telah memberikan kedudukan khusus kepada Bank Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia.

Kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan Lembaga Tinggi Negara. Disamping itu, kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan Departemen, karena kedudukan Bank Indonesia berada diluar Pemerintah. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.

2. Sebagai Badan Hukum

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun diluar peradilan.

D. **Visi dan Misi Bank Indonesia**

1. Visi

Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil.

2. Misi

- a) Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
- b) Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.
- c) Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter, dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional.
- d) Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (*governance*) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan Undang-Undang.

E. Tujuan Bank Indonesia

1. Tujuan Tunggal

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, menurut UU No. 23 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2004 dan No. 6 tahun 2009, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia

melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah dibidang perekonomian.

Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidknya Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.

2. Tiga Pilar Utama

Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasikan agar dapat mencapai tujuan dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.

- a) Pilar 1 : Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter
- b) Pilar 2 : Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran
- c) Pilar 3 : Mengatur dan Mengawasi Bank

F. Struktur Organisasi

1. Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Gubernur

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan ini terdiri atas seorang Gubernur sebagai

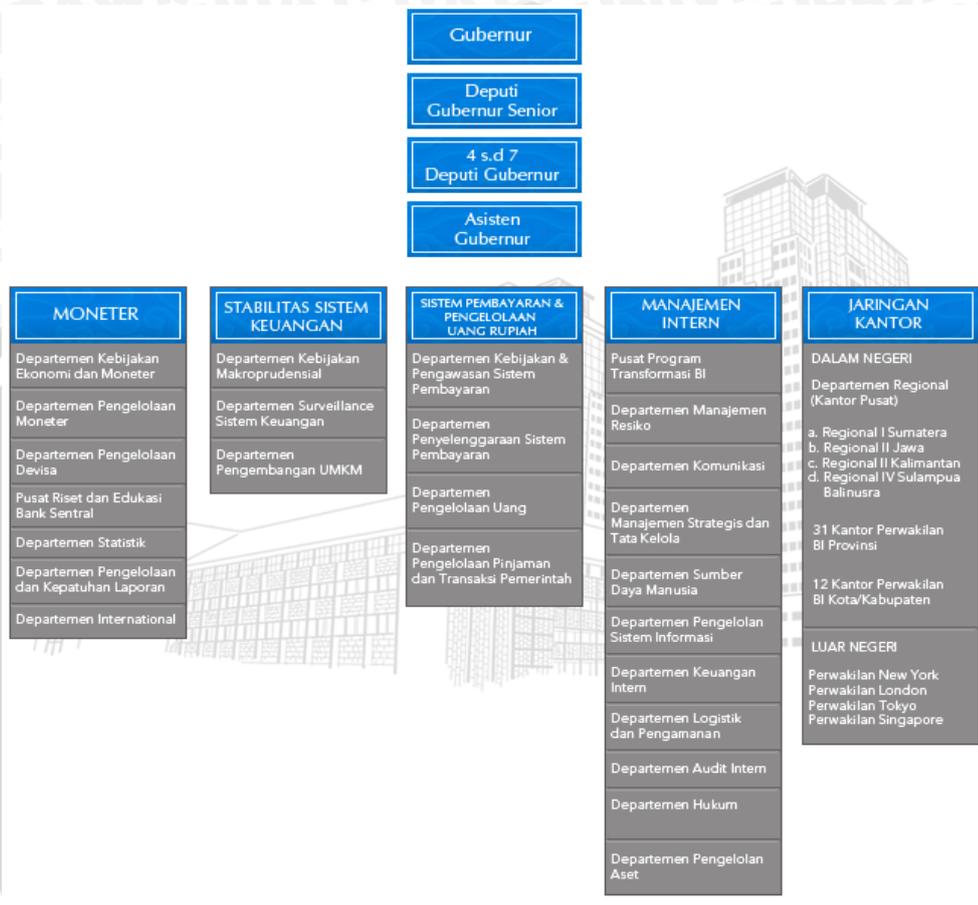
pemimpin, dibantu oleh seorang Deputy Gubernur Senior sebagai wakil, dan sekurang-kurangnya empat atau sebanyak-banyaknya tujuh Deputy Gubernur. Masa jabatan Gubernur dan Deputy Gubernur selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 kali masa jabatan berikutnya.

Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Calon Deputy Gubernur diusulkan oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Gubernur Bank Indonesia. (vide Pasal 41 UU No. 3 Tahun 2004 yang mengubah UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia). Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak dapat diberhentikan oleh Presiden, kecuali bila mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditur, atau berhalangan tetap.

2. Pengambilan Keputusan

Sebagai suatu forum pengambilan keputusan tertinggi, Rapat Dewan Gubernur diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter, serta sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter atau menetapkan kebijakan lain yang bersifat prinsipil dan strategis. Pengambilan keputusan dilakukan dalam Rapat Dewan Gubernur, atas dasar prinsip

musyawarah demi mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir.



Gambar 4.5 Struktur Organisasi Bank Indonesia

G. Tugas dan Fungsi Bank Indonesia Terhadap Pengembangan UMKM di Kampung Industri Tenun Ikat Bandar Kidul Kota Kediri

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan sebuah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan dalam rangka mencapai suatu tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk

mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang berkesinambungan dan sejalan dengan tantangan perkembangan serta pembangunan ekonomi yang semakin kompleks, sistem keuangan yang semakin maju serta perekonomian yang semakin kompetitif, maka kebijakan moneter harus dititik beratkan pada upaya memelihara stabilitas nilai rupiah.

Selain daripada itu, mengenai pengembangan memiliki tujuan untuk memajukan perekonomian masyarakat melalui pengembangan ekonomi dengan sasaran kepada kelompok pedagang kecil, industri rumah tangga dan jasa layanan kepada masyarakat. Aspek yang berhubungan dengan pengembangan mencakup lima tingkatan unsur yang saling terkait satu sama lain, yaitu peningkatan kesejahteraan, mengakses berbagai fasilitas yang tersedia, kesadaran, partisipasi, dan kontrol. Pengembangan merupakan sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif, dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani berbagai persoalan dasar dan untuk meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan cita-cita yang diharapkan.

Dalam konteks permasalahan sederhana, ekonomi rakyat merupakan strategi pemenuhan hidup, dengan kendala terbatasnya sumber daya, erat kaitannya dengan upaya dalam meningkatkan kemakmuran (menyangkut aspek ekonomi) masyarakat. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui tiga kegiatan utama: produksi, distribusi, dan konsumsi. Hal ini merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan sering disebut sebagai proses yang berkesinambungan. Membangun ekonomi rakyat berarti meningkatkan kemampuan rakyat dengan cara mengembangkan

ketrampilan yang sudah ada secara teratur dan bertahap. Upaya menggerakkan sumber daya untuk mengembangkan potensi rakyat akan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia seperti tiga sisi berikut:

1. Menciptakan keadaan yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang
2. Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi.
3. Mengembangkan ekonomi rakyat juga memiliki artu melindungi rakyat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang.

Upaya mencapai tujuan pengembangan ekonomi masyarakat, terdapat pilihan kebijaksanaan yang dilaksanakan dalam beberapa langkah strategis yang dilaksanakan dalam upaya pilihan kebijakan, yaitu:

1. Pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada asset produksi. Diantara bermacam asset, yang paling mendasar adalah akses kepada dana. Tersedianya injeksi dana yang memadai dapat menciptakan pembentukan modal bagi usaha rakyat. Sehingga dapat meningkatkan produksi, pendapatan dan menciptakan tabungan yang dapat digunakan untuk penumpukan modal secara berkesinambungan.
2. Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat.
3. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Kebijakan pengembangan industri harus mengarah pada penguatan industri rakyat yang terkait dengan industri besar.

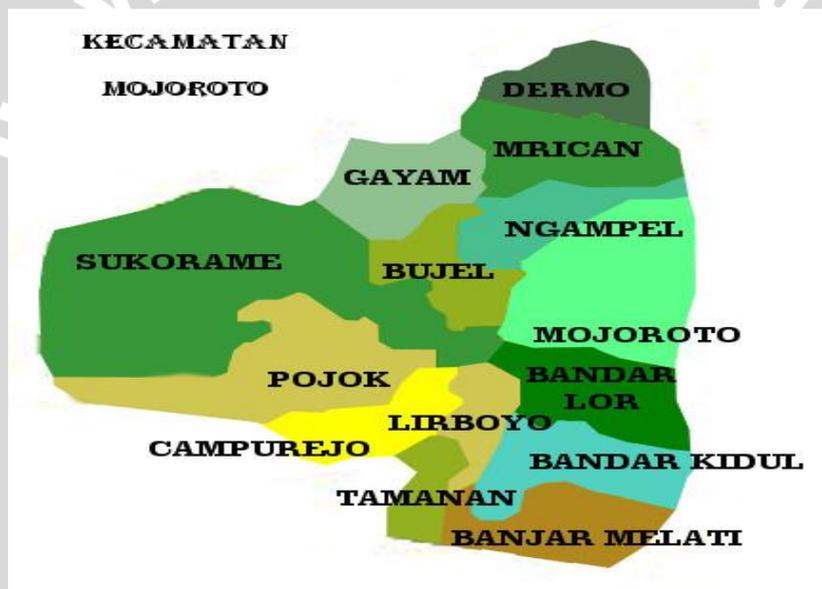
5. Kebijakan ketenagakerjaan yang mendorong tumbuhnya tenaga kerja mandiri sebagai cikal bakal lapisan wirausaha baru, yang berkembang menjadi wirausaha kecil dan menengah yang kuat dan saling menunjang.
6. Pemerataan pembangunan antar daerah.

3. **Gambaran Umum Kampung Industri Tenun Ikat Bandar Kidul**

Kampung adalah kawasan yang ditinggali oleh masyarakat atau pribumi (pada masa Hindia Belanda) yang pekerjaannya sebagai pembantu pada keluarga-keluarga Eropa atau Tionghoa dan sedikit dari mereka yang masuk di sektor formal sebagai pegawai rendahan di kantor pemerintah atau swasta (Mahatmanta, 2005: 28). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “kampung” memiliki arti kelompok rumah yang merupakan bagian kota (biasanya dihuni oleh sekelompok orang yang berpenghasilan rendah). Kampung juga berarti desa, dusun, atau kesatuan administrasi terkecil yang menempati wilayah tertentu yang terletak dibawah kecamatan. Sedangkan kata “unggulan” atau dengan kata dasar “unggul” yang ditambahkan akhiran-an dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sesuatu yang diunggulkan. Berdasarkan penjelasan diatas mengenai kampung dan unggulan tersebut, kampung unggulan adalah sebuah desa atau kampung yang memiliki potensi untuk bisa berkembang dalam bidang seni maupun lainnya yang kemudian dapat dijadikan sebagai ikon desa atau kota.

Kampung unggulan industri tenun ikat Bandar Kidul Kota Kediri memiliki potensi unggulan pada sektor perekonomian masyarakat. Beberapa warga kampung industri tenun ikat Bandar Kidul, dengan telaten mengembangkan produk khas yang hanya bisa ditemui di kampung tersebut. Potensi itulah yang

kemudian dianggap serius oleh Pemerintah Kota Kediri untuk dijadikan kampung unggulan serta mendapat dukungan yang besar dari Bank Indonesia Kota Kediri untuk mengembangkan potensi yang ada agar Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul lebih maju dan dikenal luas oleh pasar lokal maupun mancanegara. Seiring dengan berjalannya waktu, keberadaan kampung industri tenun ikat di Bandar Kidul ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga serta meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitarnya.



Gambar 4.6 Peta Kecamatan Mojoroto

Di wilayah Kediri bagian barat terdapat salah satu Kecamatan, yaitu Kecamatan Mojoroto yang di dalamnya terdapat Kelurahan Bandar Kidul. Kelurahan Bandar Kidul terdapat objek yang merupakan sebuah desa atau kampung yang memiliki potensi unggulan mengenai kerajinan tangan yang berupa kain tenun ikat. Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul disebut sebagai kampung unggulan karena menghasilkan produk unggulan antara lain, kain tenun

dari bahan katun, kain tenun dari bahan semi sutra, kain tenun dari bahan sutera, dan sarung serta produk tenun lainnya dalam bentuk kerajinan tangan (*handycraft*) berupa baju, jas pria, sepatu, sandal dan lain-lain. Penyebutan kampung unggulan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi kampung lainnya dalam rangka pengembangan UMKM melalui berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat.

Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul sudah ada semenjak tahun 1960-an. Kerajinan tenun ikat di Bandar Kidul sempat mengalami kejayaan pada tahun 1970-an sampai 1980-an, akibat adanya kain tenun buatan pabrik yang lebih murah dan lebih banyak motif mengakibatkan kerajinan ini mengalami kemunduran pada tahun 1980-an akhir. Ketika Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1998, kemerosotan bisnis ini juga terjadi pada sentra tenun ikat ini, ada yang terpencar dari kelompok tenun ikat, mengganti jenis usahanya, dan ada juga yang berpindah tempat. Namun dari banyak yang beralih dan meninggalkan usahanya, masih ada beberapa yang tetap memilih untuk bertahan mengembangkan usaha tenun ikat.

Melihat adanya potensi yang dapat dikembangkan di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul, Bank Indonesia Kota Kediri melalui program sosialnya yang berhubungan dengan pengembangan ekonomi lokal melakukan pengembangan UMKM kepada warga perajin tenun ikat di Bandar Kidul Kota Kediri. Mulai tahun 2015, Bank Indonesia Kota Kediri melakukan pengembangan UMKM di kampung industri tenun ikat Bandar Kidul serta diberikan tenaga pendamping sebagai sarana penghubung antara masyarakat dengan pihak Bank

Indonesia Kota Kediri. Kampung industri tenun ikat memiliki pendamping semenjak Bank Indonesia memberikan CSR. Para pendamping tersebut memiliki kemampuan dan keahlian yang berbeda-beda, mulai dari keahlian pemasaran, desain, dan lain-lain.

Pengembangan UMKM di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul ini memiliki 10 (sepuluh) orang anggota. Pengembangan UMKM ini diemban oleh Bank Indonesia Kota Kediri sebagai bentuk kepedulian Bank Indonesia terhadap masyarakat. Berikut merupakan data anggota Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul:

Tabel 4.1 Nama anggota Perajin Tenun Ikat Bandar Kidul

No.	Nama Pemilik	Nama Brand	Alamat
1.	Eko Hariyanto	Aam Putra	Jl. KH. Agus Salim gg. 8/ 33 B
2.	Siti Ruqayah	Medali Mas	Jl. KH. Agus Salim gg. 8/ 54 C
3.	Shulkan Arif	Kodok Ngorek 1	Jl. KH. Agus Salim gg. 7
4.	Khaerul Anam	Kodok Ngorek 2	Jl. KH. Agus Salim gg. 7
5.	Sholeh Hudin	Kodok Ngorek 3	Jl. KH. Agus Salim gg 7
6.	Imam Safi'i	Sempurna 1	Jl. KH. Agus Salim gg. 5/19
7.	Asherul. M	Sempurna 2	Jl. KH. Agus Salim gg. 8
8.	M. Anis	Kurniawan	Jl. KH. Agus Salim gg. 7
9.	Sudarmanto	Sinar Barokah 1	Jl. KH. Agus Salim gg. 8
10.	Erwin Wahyu	Sinar Barokah 2	Jl. KH. Agus Salim gg. 8

Kain tenun ikat di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul Kota Kediri ini memiliki kualitas yang bagus. Kain tenun ikat khas kota Kediri ini dibuat lebih modern dan unik. Pasang surut perekonomian selama beberapa tahun terakhir membuktikan bahwa usaha kecil yang geluti oleh puluhan warga mampu eksis diberbagai kondisi. Kian hari kian meningkat, karena adanya dukungan yang kuat dari Bank Indonesia Kota Kediri.

B. Penyajian Data

3. Pelaksanaan pengembangan UMKM di Kampung Industri Tenun Ikat di Bandar Kidul melalui *Corporate Social Responsibility* Bank Indonesia Kota Kediri, meliputi:

a. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* dalam aspek ekonomi

Program Sosial Bank Indonesia atau PSBI merupakan bentuk kepedulian atau empati sosial Bank Indonesia untuk berkontribusi dalam membantu memecahkan masalah sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat. Melalui program sosial, Bank Indonesia Kota Kediri berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat terhadap pendapatan ekonomi rumah tangga dan kelompok masyarakat. Selain itu, pemahaman terhadap pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bank Indonesia dalam membantu masyarakat untuk meningkatkan perekonomian melalui pengembangan UMKM Industri Tenun Ikat dengan memberikan bantuan dana dan pinjaman bagi perintis usaha. Kontribusi yang diberikan sejak tahun 2008 tersebut kini memasuki pelaksanaan yang baru. Sejalan dengan program transformasi Bank Indonesia, secara pelan-pelan meninggalkan paradigma filantropi menuju pada pembangunan berkelanjutan

yang mampu meningkatkan nilai-nilai ekonomi, nilai-nilai sosial, dan lingkungan di masyarakat. Bank Indonesia Kota Kediri meyakini bahwa sektor rumah tangga dan kelompok masyarakat lainnya memiliki peran yang penting dalam pilar ekonomi. Rumah tangga yang kuat secara ekonomi dan edukasi secara agregat dapat mendukung pencapaian stabilitas ekonomi, khususnya melalui pencapaian inflasi yang rendah dan terkendali. Proses pengembangan UMKM Kampung Industri Tenun Ikat di Bandar Kidul adalah dengan melakukan berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Eko Hariyanto selaku ketua kelompok di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul, sebagai berikut:

“...kalau kegiatan diberikan kepada seluruh anggota dari kelompok industri kampung tenun ikat di Bandar Kidul Kota Kediri, semua diberikan pelatihan, pengarahan, dan studi banding ke luar daerah untuk melihat kain tenun yang lain, harapannya agar masyarakat kampung tenun ikat memiliki kemampuan untuk berinovasi dalam membuat kain tenun ikat. Hal itu juga diupayakan agar masyarakat kampung tenun ikat mempunyai kualitas yang baik dan dapat bersaing dengan kain tenun ikat lainnya yang berada dipasaran” (Wawancara pada tanggal 29 September 2016 pukul 13:09 di Galeri Bapak Eko Hariyanto selaku ketua Industri Kampung Tenun Ikat Bandar Kidul Kota Kediri).

sama halnya seperti yang diungkapkan oleh Siti Ruqayah, sebagai berikut:

“...kegiatannya berupa pelatihan *Mas*, Ibu Merry dan Bapak Joko memberikan perhatian kepada kami, jika kami membutuhkan sesuatu yang sekiranya diperlukan untuk kebutuhan tenun ikat pasti diberikan”. (Wawancara pada tanggal 29 September 2016 pukul 09:15 di rumah Ibu Siti Ruqayah Bandar Kidul Kota Kediri)

Pelatihan atau proses pengembangan UMKM kepada masyarakat industri tenun ikat ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya

manusia yang pada khususnya berkaitan dengan peningkatan kompetensi. Kompetensi merupakan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh masyarakat kampung industri tenun ikat Bandar Kidul setelah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan. Kemampuan atau kompetensi inilah yang akan dijadikan bekal oleh para masyarakat yang memproduksi kain tenun ikat di Bandar Kidul untuk menghadapi dunia industri, dan diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan sektor usaha di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Merry Komala Dewi selaku Manajer Bank Indonesia Kota Kediri, sebagai berikut:

“...semua anggota kelompok industri kampung tenun ikat Kota Kediri harus memiliki kemampuan atau kompetensi dibidang pembuatan tenun, agar dalam membuat atau memproduksi anggota dapat memberikan pengarahan lagi kepada pekerja atau penenun supaya anggota tidak sulit untuk memproduksi kain tenun yang baik dan berbeda dan mampu menghadapi dunia usaha” (Wawancara pada tanggal 28 September 2016 pukul 10:35 di Kantor Bank Indonesia Kota Kediri)

Pelatihan-pelatihan tersebut berupa pelatihan desain dengan motif yang berbeda, pelatihan dalam memberikan warna pada benang, pelatihan pemasaran, dan pelatihan pembukuan atau *entrepreneurship*. Pelatihan ini diberikan sesuai dengan kemampuan yang belum dimiliki oleh masyarakat kampung tenun ikat Bandar Kidul Kota Kediri agar mereka mempunyai pengetahuan atau wawasan yang baik sehingga dapat diandalkan. Seperti yang dikutip dalam wawancara dengan Eko Hariyanto, sebagai berikut:

“...pelatihannya banyak Mas, ada pelatihan desain model biar inovatif, pelatihan pewarnaan benang, pelatihan pemasaran, dan pelatihan pembukuan atau *entrepreneurship*. Yang dilaksanakan kemarin yaitu pelatihan design model baru mas, pada bulan april kemarin”. (Wawancara pada tanggal 29 September 2016 pukul 13:35 di Galeri

rumah Bapak Eko Hariyanto selaku ketua kelompok di Kampung industri Tenun Ikat di Bandar Kidul)

Penjelasan mengenai kegiatan pelatihan masyarakat Industri Kampung Tenun Ikat Bandar Kidul Kota Kediri, sebagai berikut:

1) Pelatihan Desain Model

Pelatihan desain model kreatif dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2015 dan tanggal 13 dan 17 Mei 2015 di Koperasi Tenun Ikat di Bandar Kidul. Pada saat pelatihan desain model, anggota pelatihan dilatih untuk membuat desain kain tenun yang modern, memadukan kreatifitas dalam membuat kain tenun dengan harapan berkembangnya kemampuan untuk melakukan inovasi dalam mendesign kain tenun agar lebih berbeda dengan yang lainnya dan unik. Seperti yang dikemukakan oleh Ibu Merry, sebagai berikut:

“...desain model kain tenun ikat pada waktu itu kalau tidak salah dilakukan pada bulai Mei tahun 2015 , pelatihannya dilakukan selama 2 (dua) hari di Unit Koperasi Tenun Ikat. Salah satu tujuannya adalah untuk mengembangkan kreatifitas masyarakat industri kampung tenun ikat untuk menghadapi pasar. (Wawancara pada tanggal 28 September 2016 pukul 10:00 di Kantor Bank Indonesia Kota Kediri)

Lebih lanjut, Ibu Merry menjelaskan bahwa:

“...dalam pelatihan desain model kain tenun ikat, masyarakat industri kampung tenun ikat diajarkan bagaimana cara menggambar sketsa sendiri dan memilih pewarna benang yang cocok untuk dikreasikan sehingga dapat menarik pelanggan yang melihat dan dapat dipakai untuk setelan baju kantor, gaun pesta, dan lain sebagainya. (Wawancara pada tanggal 28 September 2016 pukul 10:35 di Kantor Bank Indonesia Kota Kediri)

Dapat disimpulkan bahwa, pelatihan desain model kreatif kain tenun ikat adalah pelatihan dimana didalamnya memberikan penjelasan tentang bagaimana

cara membuat sketsa gambar kain tenun ikat yang dibuat, penjelasan mengenai cara menentukan desain dan menggambar sketsa sendiri di kertas yang terpisah dan mendesain kain dengan model yang unik dan berbeda.

2) Pelatihan pewarnaan benang

Teknik tenun tradisional yang ada di Indonesia beraneka ragam. Dengan menggunakan alat yang sama yaitu ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin) namun dengan teknik yang berbeda akan menghasilkan produk tenun yang unik dan bagus. Untuk proses penenunan hampir sama untuk semua tenun tradisional. Tenun ikat adalah tenun yang dalam proses pengerjaannya dengan melakukan pengikatan benang, hal tersebut dilakukan untuk mencegah warna masuk ke dalam benang. Pelatihan pewarnaan benang dilaksanakan oleh Bank Indonesia Kota Kediri pada tanggal 18 Mei 2015 di rumah salah satu anggota perajin tenun ikat Bandar Kidul Kota Kediri. Seperti yang dikemukakan oleh Joko Susilo selaku Asisten Manajer UMKM Bank Indonesia Kota Kediri, sebagai berikut:

“...ya memang masyarakat perajin sudah bisa memberikan pewarnaan sendiri pada benang yang akan dijadikan kain tenun itu, kami disini memberikan tambahan pelatihan dalam pewarnaan benang agar benang yang dijadikan kain tenun memiliki corak yang berbeda dan unik. Kami memberikan pengetahuan yang lain itu pun juga diberikan oleh ahli tenun”. (Wawancara pada tanggal 1 Oktober 2016 pukul 09:45 di Kantor Bank Indonesia Kota Kediri)

Sama halnya seperti yang diungkapkan oleh Eko, sebagai berikut:

“...Bank Indonesia melalui pendampingnya memberikan saya dan teman-teman lainnya pengetahuan yang baru, wawasan tentang pewarnaan benang *Mas*. Khususnya saya, perajin tenun ikat yang masih dikatakan baru, ini akan memberikan hasil yang baik dan untuk memberikan kesan unik pada kain tenun ikat yang dibuat oleh warga perajin tenun ikat Bandar Kidul *Mas*. Kalau saya sih, sangat antusias dengan pelatihan ini,

banyak pengetahuan dan wawasan baru yang didapatkan”. (Wawancara pada tanggal 29 September 2016 pukul 13:30 di Rumah Galeri Bapak Eko Hariyanto Bandar Kidul)

Disimpulkan bahwa dalam pelatihan pewarnaan benang pada kain tenun ikat ini dapat memberikan pengetahuan yang baru kepada semua anggota perajin tenun ikat Bandar Kidul. Pelatihan ini menjelaskan tentang bagaimana benang diberi warna yang berbeda sehingga hasil dari kain tenun ikat juga akan berbeda.

3) Pelatihan Pemasaran

Sarana pemasaran dan pameran yang diberikan Bank Indonesia dan Pemerintah Kota Kediri kepada masyarakat tenun ikat di Bandar Kidul adalah sebagai wujud bantuan dan pelatihan dalam hal memasarkan produknya. Pelatihan pemasaran yang diberikan dapat meningkatkan kualitas produksi, karena tidak semua pengusaha mampu untuk melakukan proses pemasaran dan menarik minat pembeli untuk membeli dan membeli kembali produk kain tenunnya. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Merry, sebagai berikut:

“...masyarakat industri kampung tenun ikat juga diberikan kemampuan untuk memasarkan produknya, karena tidak selamanya kami secara terus menerus memasarkan produknya. Masyarakat juga perlu dan mampu memasarkan produk tenunnya sendiri agar dapat dikenal oleh publik secara luas. (Wawancara pada tanggal 28 September 2016 pukul 10:35 di Kantor Bank Indonesia Kota Kediri)

Serupa dengan wawancara dengan Eko Hariyanto tentang proses pemasaran di Kampung Tenun Ikat Kediri, sebagai berikut:

“...kami biasanya hanya memasarkan dari mulut ke mulut, *Mas*. Para pelanggan juga sudah tahu kualitas dari kain tenun ikat kami biasanya akan kembali lagi kalau mau membeli. Nanti kalau mereka puas, mereka biasanya akan kasih tahu ke orang-orang untuk membeli kain tenun di kami. Kami juga mengikuti beberapa perlombaan dan pameran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kediri, dan ini kami juga membuat seragam untuk kantor-kantor swasta maupun pemerintah dinas yang ada

di Kota Kediri Karena bapak Walikota Kediri menganjurkan untuk semua kantor baik swasta maupun Dinas Pemerintah harus memakai baju bermotif tenun pada hari tertentu. Sehingga kami juga merasa terbantu atas kebijakan dari Pemerintah Kota Kediri untuk hal pemasaran. Selain itu kami juga memiliki *website* untuk pemasaran di media sosial” (Wawancara pada tanggal 29 September 2016 di Rumah Galeri Bapak Eko Hariyanto selaku ketua kelompok di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul)

Sebagus apapun produk yang telah dihasilkan apabila tidak dipasarkan atau dipromosikan dengan baik maka konsumen tidak akan tahu dan tidak ada konsumen untuk membeli produk tersebut. Oleh karena itu, sangat diperlu untuk melakukan pelatihan pemasaran agar masyarakat kain tenun dapat berusaha memasarkan kainnya sendiri.

4) Pelatihan Pembukuan dan *Entrepreneurship*

Pelatihan pembukuan dan *Entrepreneurship* ini dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2016. Pelatihan ini tidak hanya diperuntukkan untuk Kampung Tenun Ikat saja namun juga pelatihan dihadiri oleh beberapa IKM yang ada di Kota Kediri. Pelatihan Pembukuan dan *Entrepreneurship* ini menghadirkan dua narasumber yaitu Bapak Djoko Raharto adalah Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri dan Tung Desem Waringin yang merupakan motivator. Seperti yang dikutip dalam wawancara dengan Merry, sebagai berikut:

“Acara dilaksanakan di Gedung Nasional Indonesia (GNI) Kediri. Acara resmi dibuka oleh Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar pada pukul 08.00 WIB. Acara ini dilaksanakan untuk mendorong UMKM di Kota Kediri agar semakin tumbuh dan berkembang di tengah-tengah optimisme perkembangan ekonomi di Kediri, selain itu kami juga membantu dalam pelaksanaan pembukuan dalam sebuah usaha. Supaya mereka juga bisa tahu berapa uang yang masuk dan uang yang keluar. Disisi lain, acara ini sebagai upaya Bank Indonesia Kediri untuk mendekatkan UMKM kepada jasa keuangan melalui pengenalan produk-produk pembiayaan perbankan, peminjaman kredit, serta layanan jasa

perbankan lainnya” (Wawancara pada tanggal 28 September 2016 pukul 10:00 di Kantor Bank Indonesia Kota Kediri)

Serupa dengan cuplikan wawancara dengan Eko, sebagai berikut:

“...kemarin diadakan seperti seminar klinik bisnis dan keuangan inklusif, kalau tidak salah pada bulan Mei 2016, *Mas*. Lumayan memotivasi masyarakat kampung tenun ikat supaya lebih teliti dalam urusan keuangan, mendata semua uang yang masuk dan uang yang keluar supaya kita punya *database*-nya. Kami juga dapat memotivasi dan wejangan-wejangan dari pemateri agar tidak mudah menyerah dalam menjalankan sebuah usaha atau bisnis, kami harus lebih semangat agar usaha kami dapat sukses” (Wawancara pada tanggal 29 September 2016 pukul 13:30 di Rumah Galeri Bapak Eko Hariyanto selaku ketua kelompok di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul)

Tujuan dilaksanakan pelatihan ini adalah untuk memberikan pengetahuan terhadap UMKM binaan mengenai pengenalan produk-produk pembiayaan perbankan, penjaminan kredit, serta pembukuan yang sebaiknya selalu diterapkan oleh semua pelaku usaha. Selain mengenai pembukuan dalam pelatihan ini juga diberikan pemateri mengenai *Entrepreneurship*. Peserta diberi pemahaman dan motivasi dalam hal *Entrepreneurship*.

Adapun harapan-harapan dari terselenggaranya seminar atau pelatihan ini seperti yang dikemukakan oleh Merry, sebagai berikut:

“...Harapan kami adalah adanya kesadaran dari masyarakat kampung tenun ikat menjadi lebih meningkat terhadap pentingnya berwirausaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri dan masyarakat sekitar. Misalnya mereka membutuhkan tenaga pekerja, mereka harus banyak memproduksi kain tenun dalam jumlah banyak karena pesanan yang terus meningkat, mereka akan mencari tenaga kerja lainnya seperti masyarakat yang berada di sekitar lingkungan maupun di luar daerah mereka, sehingga ini akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang lainnya. (Wawancara pada tanggal 28 September 2016 pukul 11:00 di Kantor Bank Indonesia Kediri)

Program pengembangan UMKM oleh Bank Indonesia terhadap perajin tenun ikat di Bandar Kidul merupakan sebuah program yang sudah dilakukan sejak tahun 2015 dan sekarang sudah berjalan hampir 2 (dua) tahun. Program Bank Indonesia tentang pengembangan UMKM merupakan sebuah tanggung jawab dan kepedulian Bank Indonesia terhadap lingkungan sekitar. Adapun anggaran dana yang digunakan Bank Indonesia dalam memberikan bantuan terhadap pengembangan UMKM tenun ikat di Bandar Kidul Kota Kediri. Seperti yang dikemukakan oleh Merry, sebagai berikut:

“...alokasi dana dalam kegiatan pelaksanaan CSR di Bank Indonesia merupakan bagian dari anggaran operasional Bank Indonesia, bukan dari prosentase dari keuntungan sebagaimana yang terdapat dalam UU TJSL dan PBKL yang menjadi dasar acuan BUMN. Gubernur Bank Indonesia kantor pusat memberikan arahan dan anggaran dalam satu tahun untuk mengelola dan mengimplementasikan CSR BI termasuk juga pada Bank Indonesia Kota Kediri” (Wawancara pada tanggal 27 September 2016 pukul 10:11 di Kantor Bank Indonesia Kota Kediri)

Sama halnya yang juga dikemukakan oleh Joko Susilo dalam wawancara, sebagai berikut:

“...terkait dengan anggaran dana yang digunakan untuk mendukung UMKM tepatnya pada masyarakat kampung tenun ikat Bandar Kidul *Mas*, kami memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan mereka *Mas*” (Wawancara pada tanggal 1 Oktober 2016 pukul 10:35 di Kantor Bank Indonesia Kota Kediri)

Untuk menunjukkan bentuk kepedulian Bank Indonesia terhadap masyarakat, maka Bank Indonesia membuat kebijakan yang menyangkut kebijakan terhadap lingkungan dan masyarakat. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang dilakukan di luar dari tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1994 mengenai tugas

Bank Indonesia. Kebijakan CSR Bank Indonesia diimplementasikan dalam bentuk program kepedulian sosial terhadap masyarakat. Bentuk kepedulian kepada masyarakat sekitar atau relasi komunitas yang dilakukan Bank Indonesia dapat diartikan sangat luas, namun secara singkat dapat dimengerti sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya bersama bagi organisasi dan komunitas. Seperti yang dikemukakan oleh Merry, sebagai berikut:

“...ya semua ada peraturannya Mas, tidak asal-asalan. Ada peraturan yang mengatur tentang tanggung jawab dan kepedulian sosial oleh Bank Indonesia. Ya ini merupakan bentuk kepedulian sebagai wujud dari prinsip *Good corporate governance* yang terkait untuk mendukung pencapaian tujuan *Millenium Goals Development*, salah satu diantaranya adalah untuk pengurangan kemiskinan menjadi setengah pada tahun 2016 dengan konsentrasi pada UMKM” (Wawancara pada tanggal 27 September 2016 pukul 10:11 di Kantor Bank Indonesia Kota Kediri)

Pelaksanaan program CSR di Bank Indonesia Kota Kediri yang direalisasikan dalam bentuk pengembangan UMKM dan peningkatan sektor perekonomian. Dalam hal pelaksanaan CSR terhadap tanggung jawab ekonomi terhadap masyarakat pengembangan UMKM ini dilakukan sebagai upaya dalam membantu masyarakat perajin tenun ikat agar mampu meningkatkan ekonomi secara mandiri. Implementasi program tersebut merupakan sebuah wujud yang nyata dan bentuk pelaksanaan dari kebijakan yang sudah ada. Seperti yang dikemukakan oleh Merry, sebagai berikut:

“...kegiatan CSR Bank Indonesia yang sudah terlaksana di Kediri tepatnya di Kampung tenun ikat Bandar Kidul ini dilakukan secara terintegrasi. Bank Indonesia ingin membantu dan ini merupakan sebuah bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat untuk membantu meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik lagi. Dan dengan mendorong masyarakat untuk tetap konsisten dalam usaha tenun ikat ini

akan emberikan hasil yang baik bagi kelompok perajin dan masyarakat yang lain” (Wawancara pada tanggal 27 September 2016 pukul 10:11 di Kantor Bank Indonesia Kota Kediri)

Pengembangan UMKM tenun ikat Bandar Kidul oleh Bank Indonesia Kediri dilakukan untuk pertumbuhan ekonomi melalui semacam investigasi sehingga terbangun sektor produksi dan sektor ekonomi yang kuat, muncul hubungan yang sinergis antar usaha kecil dan menengah dan terbukanya kesempatan kerja yang luas. Untuk mendukung upaya tersebut melalui programnya telah mewujudkan dengan menyalurkan bantuan kepada masyarakat perajin tenun. Peran Bank Indonesia begitu penting dalam memajukan dan meningkatkan perekonomian masyarakat perajin tenun ikat. Seperti halnya yang diungkapkan dalam wawancara dengan Merry, sebagai berikut:

“...kami mendukung dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM tenun ikat ini, perlu diketahui juga bahwa tenun ikat Kediri juga tidak kalah bagus dengan tenun ikat yang lain. Maka dari itu kami berupaya agar tenun ikat dari Bandar Kidul bisa bersaing di pasar domestik dan mancanegara. Dengan cara membantu memasarkannya *Mas*, karena pada dasarnya tenun ikat di Kediri ini minim dalam hal pemasarannya saja *Mas*, kalau dipasarkan dengan terus-menerus nanti juga akan memberikan nilai tambah bagi perajin, misalnya pesanan banyak yang nantinya berdampak pada peningkatan penjualan dan meningkatnya omzet mereka juga” (Wawancara pada tanggal 27 September 2016 pukul 10:11 di Kantor Bank Indonesia Kota Kediri)

Pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Bank Indonesia Kota Kediri terhadap pengembangan Kampung industri tenun ikat di Bandar Kidul memberikan kontribusi yang lebih baik untuk kelompok masyarakat yang berwirausaha sebagai tenun ikat, karenanya Bank Indonesia Kota Kediri bukan hanya memberikan bantuan berupa fasilitas/ sarana melainkan juga berupa pelatihan, pendampingan, studi banding dan serta pemasaran produk. Ada

peningkatan ekonomi masyarakat kampung tenun ikat di Bandar Kidul setelah mendapatkan bantuan dari Bank Indonesia Kota Kediri. Seperti yang dikemukakan oleh Joko Susilo dalam wawancara, sebagai berikut:

“...ya kenapa Bank Indonesia mau membantu untuk kembangkan usaha ini karena Bank Indonesia ingin kain tenun ikat Kediri ini semakin hari semakin meningkat dan melestarikan warisan budaya serta tenun ikat sudah di SK (Surat Keputusan) kan oleh Walikota Kediri juga. Kami ingin tenun ikat ini menjadi produk unggulan dan khas kota Kediri. Selain itu kami juga ingin membantu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kain tenun ikat di Kediri, ya perlu *Mas* tahu juga bahwa harga tenun ikat di Kediri ini masih terjangkau, dengan harga yang masih dibawah kain tenun ikat lainnya, oleh karena itu kami berusaha untuk mendukung salah satunya dengan cara memasarkan kain tenun ikat ini ke luar kota dan luar negeri (Wawancara pada tanggal 1 Oktober 2016 pukul 10:15 di Kantor Bank Indonesia Kota Kediri)

Sama halnya seperti yang dikemukakan dalam wawancara dengan Eko, sebagai berikut:

“...Alhamdulillah meningkatlah *Mas*, kalau sebelumnya kan kami memasarkan produknya lewat mulut ke mulut *Mas*, dan juga pameran yang dilaksanakan pemerintah juga. Kalau sekarang ya bersyukurlah banyak peningkatan penjualan, pesanan juga banyak *Mas*, ini karena bantuan dan dukungan dari Bank Indonesia dan pihak-pihak yang lain. Kalau dulu saya menjual 250 (dua ratus lima puluh) potong hingga 400 (empat ratus) potong kain tenun ikat, sekarang bisa menjual 450 (empat ratus lima puluh) potong hingga 900 (sembilan ratus) kain tenun ikat bahkan bisa lebih *Mas*, semua juga tergantung pesanan yang masuk. Untuk harga juga bervariasi *Mas*, tapi harga terendahnya 180 (seratus delapan puluh) ribu, ada yang 500 (lima ratus ribu) per potongnya bahannya sutera. Kalau berbicara omzet per bulan ya lumayan untuk hidup *Mas*, untuk berapanya hehe saya merasa tidak enak berbicara omzet, rata-rata aja *Mas* sebulan mencapai 25 (dua puluh lima) juta. Itu kalau saya *Mas*, tidak tahu yang lainnya mungkin bisa lebih” (Wawancara pada tanggal 27 September 2015 pukul 13:15 di Rumah Galeri Eko Hariyanto Bandar Kidul Kota Kediri)

Peningkatan produksi dan penjualan juga dirasakan oleh Siti salah seorang anggota dari perajin tenun ikat dan senior dari anggota yang lainnya, dalam wawancara sebagai berikut:

“...setiap bantuan pasti ada hikmahnya Mas, apalagi bantuan itu positif. Kalau saya sendiri ya *Mas* ada kemajuan dalam hal produksi dan penjualan. dalam satu hari saya bisa produksi 65 (enam puluh lima) potong kain tenun Mas, lalu *Mas* kalikan sendiri selama satu bulan dengan harga terendahnya 180 (seratus delapan puluh) ribu. Dihitung enakkan aja Mas, misalkan saja dalam satu bulan saya bisa menjual 1000 (seribu) hingga 1500 (seribu lima ratus) potong kain tenun dan dengan harga terendah 180 (seratus delapan puluh) ribu, ya itu omzet satu bulan Mas, itu bukan termasuk pesanan Mas. Tapi yang namanya juga usaha Mas, tidak tentu bisa menjual dengan tetap ada naik turunnya. Semua berkat dukungan dan peran serta Bank Indonesia yang membantu memasarkan produk tenun ikat ini ke luar kota dan ke luar negeri” (Wawancara pada tanggal 28 September 2016 pukul 11:15 di Rumah Galeri Ibu Siti Ruqayah Bandar Kidul Kota Kediri)

Sama halnya dengan Khaerul dalam wawancara mengenai peningkatan produksi dan penjualan, sebagai berikut:

“...selama dibantu dan didukung oleh Bank Indonesia ya Mas, kan ini sudah berjalan hampir 2 tahun programnya untuk kami masyarakat perajin tenun ikat disini. Berbicara mengenai peningkatan produksi dan penjualan ya Mas, pasti ada peningkatan dan peningkatan penjualan itu signifikan, alhamdulillah *Mas* naik terus, pesanan juga banyak. Dulu sebelum mendapat bantuan dari Bank Indonesia kami menjual kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) potong dalam satu bulan kini sudah bisa lebih dari 800 (delapan ratus) potong, dengan harga terendah per potongnya 180 (seratus delapan puluh) ribu. Untuk omzetnya sendiri itu ya cukup untuk kebutuhan dan kemajuan usaha” (Wawancara pada tanggal 29 September 2016 pukul 14:35 di Rumah Galeri Bapak Khaerul Anam Bandar Kidul Kota Kediri)

Bank Indonesia dalam hal pembiayaan UMKM tenun ikat Bandar Kidul dilakukan dengan cara bertahap dan jumlah dana yang disalurkan dihitung berdasarkan presentase tertentu, dari selisih antara rasio pembiayaan UMKM yang wajib dipenuhi dengan realisasi pencapaian pada setiap akhir tahun. Hal ini diatur

dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 pasal 12 tentang publikasi, penghargaan, pembinaan, dan insentif. Seperti yang dikemukakan dalam wawancara dengan Merry, sebagai berikut:

“...pemberian bantuan ini dilakukan secara bertahap *Mas*, jadi kita melihat dan mengawasi prosesnya dulu, kalau misal ada kendala atau ada keperluan dari masyarakat perajin kita akan mengusahakan untuk memberinya. Semua ada proses dan aturannya, tidak semua langsung iya atau tidak, harus sesuai dengan kebutuhannya” (Wawancara pada tanggal 27 September 2016 pukul 10:17 di Kantor Bank Indonesia Kota Kediri)

Selain itu tugas pendamping juga membantu masyarakat untuk lebih aktif mempromosikan produk tersebut, sehingga laris dan mampu bersaing di pasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk mengenalkan kain tenun ikat Kediri di pasar lokal bahkan pasar mancanegara, sehingga semakin hari akan semakin meningkat penjualan dari kain tenun tersebut. Seperti yang dikemukakan dalam wawancara dengan Sofian selaku pendamping dari Bank Indonesia, sebagai berikut:

“...program ini dibentuk dan dilaksanakan pada dasarnya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, tepatnya masyarakat yang bersangkutan yaitu masyarakat perajin tenun ikat di Bandar Kidul. Tugas saya disini selain mendampingi dalam hal pelatihan ada hal yang lainnya juga, saya juga membantu, mendukung untuk mempromosikan produk tersebut. Karena produk ini sebenarnya bagus tapi kurang dalam hal pemasaran. Jika pemasarannya dilakukan dengan aktif maka ini akan berdampak pada produksi dan penjualan juga *Mas*, dan ada peningkatan ekonomi masyarakat. Yang pada awalnya masyarakat hanya menjual 500 (lima ratus) potong kain tenun dalam satu bulan, karena kita aktif mempromosikan kini bisa menjual 1000 (seribu) potong kain tenun ikat bahkan lebih ke kota yang menjadi pelanggannya dan belum termasuk pesanan dari luar kota yang terus meningkat. Perlu diingat bahwa setiap anggota memiliki mesin yang tidak sama banyak jadi itu adalah penjualan terendah sampai terbanyak dalam satu bulan oleh perajin tenun ikat di Bandar Kidul” (Wawancara pada tanggal 3 Oktober 2016 pukul 09:45 di Kantor Bank Indonesia Kota Kediri)

Pelaksanaan program CSR Bank Indonesia terhadap pengembangan UMKM di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul Kota Kediri yang direalisasikan untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat perajin tenun ikat. Dalam hal pelaksanaannya dilakukan yang pada salah satunya terhadap tanggung jawab ekonomi adalah peran serta Bank Indonesia dalam memberikan pelatihan, pendampingan, dan dukungan untuk kemajuan produk khas Kota Kediri serta peningkatan kualitas kehidupan yang lebih baik serta peningkatan kualitas produk sehingga laku di pasar lokal maupun mancanegara. Seperti yang tertuang pada tema CSR Bank Indonesia tentang pengembangan UMKM merupakan sebuah upaya dan bentuk nyata tanggung jawab Bank Indonesia dalam membantu masyarakat khususnya masyarakat UMKM yang membutuhkan dukungan dalam proses kegiatan usahanya sehingga mampu memecahkan masalah dan mandiri. Pelaksanaan program pengembangan UMKM kampung tenun ikat di Bandar Kidul merupakan suatu perwujudan yang nyata dari sebuah kepedulian terhadap UMKM yang ada di Kota Kediri dan sekitarnya serta bentuk pelaksanaan dari kebijakan yang sudah ada. Kemajuan usaha masyarakat yang terlihat yaitu masyarakat mampu memproduksi dan menjual kain tenun ikat lebih banyak dari sebelumnya, meningkatnya kehidupan yang lebih baik dalam keluarga dengan meningkatnya kualitas hidup. Usaha yang semakin hari semakin ada kemajuan ini membuat perajin tenun ikat bisa membangun rumah galeri yang merupakan bukti nyata dari hasil usahanya tersebut. Peningkatan kualitas hidup yang lebih baik pada masyarakat perajin tenun ikat khususnya ini tidak lepas dari peran penting Bank Indonesia dalam mendukung

dan mengembangkan produk yang menjadi unggulan khas Kota Kediri ini dan masyarakat yang mau untuk dibimbing dan dilatih untuk menjadi perajin yang ingin berkembang dan lebih maju.

b. **Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan UMKM**

Pengembangan UMKM di Kampung Industri Tenun Ikat Bandar Kidul Kota Kediri dilakukan oleh 3 (tiga) aktor atau *stakeholders*, yaitu Bank Indonesia, Pemerintah Kota Kediri, dan masyarakat perajin tenun ikat. Pihak Bank Indonesia dan Pemerintah Kota Kediri dalam hal ini bekerja sama untuk membantu dan mendorong dalam meningkatkan produksi dan penjualan kain tenun ikat. Bank Indonesia memberikan banyak pelatihan dan pembinaan yang berupa mesin tenun, benang, dan yang lainnya guna untuk meningkatkan produksi. Selain itu, Pemerintah Kota Kediri dan dari pihak masyarakat adalah masyarakat kampung tenun ikat itu sendiri dan masyarakat dari kalangan akademisi. Berikut merupakan penjelasan terkait aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan UMKM di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul terkait dengan pelaksanaan pengembangan UMKM, apakah sudah sesuai dengan peraturan atau hukum atau belum, sebagai berikut:

1. **Bank Indonesia Kota Kediri**

Dalam mengembangkan masyarakat ekonomi lokal Bank Indonesia memiliki program yang ditujukan pada Kampung industri tenun ikat di Bandar Kidul. Hal ini sesuai dengan tema Bank Indonesia pada tahun 2016 ini yaitu

mendukung pemulihan ekonomi, mendorong pembangunan ekonomi yang kuat, berkesinambungan dan inklusif. Dalam rangka mendukung fokus pengembangan kepada ekonomi lokal, Bank Indonesia Kota Kediri mengimplementasikan programnya dengan mendukung pengembangan UMKM di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul.

Bank Indonesia merupakan bank sentral yang bertujuan untuk mencapai dan memelihara nilai rupiah serta melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten dan transparan. Tujuan tersebut tertuang dalam pasal 7 UU No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Dalam pencapaian tujuannya sebagai bank sentral, Bank Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Sebagai penerapan GCG tersebut, Bank Indonesia melaksanakan CSR yang diberi nama Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) yang mencakup tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan masyarakat.

Kebijakan PSBI diatur dalam Peraturan Dewan Gubernur BI no. 14/14/PDG/2012 tentang PSBI. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang dilakukan di luar tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia yang sebagaimana diatur dalam UU no. 3 tahun 2004. Dalam laporan Bank Indonesia (2014, 150) disampaikan bahwa program ini didasari pada kesadaran bahwa kebijakan bank sentral yang menitikberatkan pada upaya stabilitas ekonomi seringkali belum dipahami dengan baik oleh masyarakat. Kemudian mempertimbangkan pula bahwa untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Bank Indonesia dibidang kestabilan moneter dan sistem keuangan diperlukan komunikasi dan interaksi

dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang dikelola secara baik. Seperti yang dikemukakan oleh Merry dalam wawancara, sebagai berikut:

“...pedoman Bank Indonesia yakni yang tertuang dalam pasal 7 UU No. 3 tahun 2004 dalam ini merupakan Bank Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Kemudian dengan prinsip GCG tersebut Bank Indonesia melaksanakan CSR dan yang diberi nama PSBI. PSBI diatur Peraturan Dewan Gubernur BI no. 14/14/PDG/2012. Ini diluar dari tugas Bank Indonesia *Mas*, hal ini kami lakukan sebagai rasa simpati dan kepedulian kami kepada masyarakat khususnya kepada masyarakat dalam mengembangkan usaha/ UMKM. Mengingat bahwa UMKM merupakan sebuah struktur perekonomian nasional sehingga perlu didukung dalam pengembangannya” (Wawancara pada tanggal 27 September 2016 pukul 10:15 di Kantor Bank Indonesia Kota Kediri)

Sama halnya seperti yang dikemukakan dalam wawancara dengan Joko Susilo selaku Kepala Perwakilan UMKM di Bank Indonesia Kota Kediri, sebagai berikut:

“...memang Bank Indonesia tidak harus atau tidak wajib melakukan CSR *Mas*, tapi kami memiliki undang-undang yang mengatur pelaksanaan CSR. Ini wujud dari penerapan *Good corporate governance* yang juga terkait untuk mendukung program pemerintah yaitu pengurangan angka kemiskinan. Sekarang ini Bank Indonesia Kota Kediri melalui CSR berkonsentrasi kepada pengembangan UMKM di kampung tenun ikat di Bandar Kidul. (Wawancara pada tanggal 1 Oktober 2016 pukul 09:45 di Kantor Bank Indonesia Kota Kediri)

Pertumbuhan sektor riil baik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) maupun non-UMKM semakin nyata. Pertumbuhan ini merupakan salah satu buah dari program CSR. CSR merupakan sebuah program yang dijalankan oleh perusahaan/instansi sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban terhadap masyarakat dan lingkungan. lebih jauh, program CSR sering juga disebut sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap dampak dari kebijakan yang telah dibuat. Dengan kata lain, CSR bisa dikatakan sebagai manajemen dampak.

Dengan adanya program CSR secara faktual dapat mendongkrak perekonomian dan melakukan pengembangan UMKM. Seperti yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran yang strategis dalam struktur perekonomian nasional termasuk dalam rangka mendukung pengendalian inflasi. Seperti yang dikemukakan oleh Merry, sebagai berikut:

“...ya pasti ada lah *Mas*. Pedoman kami dalam memberikan kredit atau pembiayaan pengembangan UMKM dapat dilihat di Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 yakni tentang pembiayaan oleh bank umum, artinya, bahwa Bank Indonesia mengatur bank umum untuk turut serta memberikan pinjaman modal kepada UMKM dengan bunga pinjaman yang rendah, ini wajib dilakukan bank umum *Mas* dan bantuan teknis merupakan bantuan yang diberikan Bank Indonesia dalam rangka pengembangan UMKM. Hal ini dilakukan agar UMKM bisa semakin berkembang, semakin maju sebab UMKM merupakan salah satu pengendali insflasi perekonomian negara”. (Wawancara pada tanggal 27 September 2016 pukul 10:15 di Kantor Bank Indonesia Kota Kediri)

Tanggung jawab hukum terhadap pengembangan UMKM merupakan sebuah kesesuaian hukum BI dengan pelaksanaan. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1994 tentang Bank Indonesia dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan UMKM. Dengan tujuan untuk mengetahui hukum yang dipakai atau peraturan yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan program kepada masyarakat dalam hal pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum.

Hal ini merupakan aspek yang penting sebagai pedoman dalam melakukan CSR yang baik, meskipun hal ini di luar tanggung jawab dari Bank Indonesia. Karena itu dalam pemberian bantuan Bank Indonesia kepada masyarakat dapat dilihat dari hukum yang dipakai dan sebagai dasar kesesuaian peraturan dengan pelaksanaannya. Seperti yang ungkapkan oleh Merry dalam wawancara, sebagai berikut:

“...Bank Indonesia mengatur bank umum untuk pemberian kredit atau pembiayaan dalam rangka pengembangan UMKM. Hal ini dilakukan untuk memperkuat peran UMKM dalam struktur perekonomian nasional sehingga perlu pengembangan UMKM melalui peningkatan akses kredit dan pembiayaan dari perbankan kepada UMKM. Peningkatan akses kredit atau pembiayaan dari perbankan kepada UMKM ini diperlukan untuk penguatan pemberian bantuan teknis Bank Indonesia dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemampuan perbankan dan pelaku usaha. Akses kredit dalam pembiayaan UMKM dan kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan program tersebut, semua harus ada dasarnya *Mas* tidak boleh asal-asalan karena ini menyangkut dengan kepentingan orang lain” (wawancara pada tanggal 27 September 2016 pukul 10:11 di Kantor Bank Indonesia Kota Kediri)

Kesesuaian hukum sebagai dasar yang dipakai dalam melaksanakan suatu program merupakan aspek penting, karena untuk mengetahui program itu sesuai pada hukum yang berlaku atau tidak. Sesuai dengan hal tersebut, Bank Indonesia dalam hal pengembangan UMKM di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul memiliki ketegasan hukum yang mengatur jalannya kegiatan yang terkait dengan usaha masyarakat. Seperti yang dikemukakan dalam wawancara dengan Joko, sebagai berikut:

“...kalau menurut saya, pandangan saya mengenai hukum yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dan kebijakan-kebijakan lainnya yang menyangkut dengan program yang kami laksanakan adalah sudah sesuai. Artinya pelaksanaan CSR sudah sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku, ya gak mungkin *Mas* kita punya program dan program tersebut menyangkut dengan kepentingan umum tidak ada

kebijakannya, ya harus pasti ada.” (Wawancara pada tanggal 1 Oktober 2016 pukul 09:45 di Kantor Bank Indonesia Kota Kediri)

Sama halnya seperti yang diungkapkan dalam wawancara dengan Merry, sebagai berikut:

“...ya harus pasti sesuai dengan hukum *Mas*, hukum yang mana, ya hukum tentang UMKM dan Peraturan Bank Indonesia dalam pelaksanaan CSR Bank Indonesia sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. kesesuaian itu menyesuaikan dengan program-program yang terlaksana, semuanya itu diatur oleh Bank Indonesia pusat *Mas*, kita yang disini melakukan sesuai aturan. Dan untuk ketepatan hukum yang berlaku dengan program yang sudah berjalan, sudah sesuai *Mas*, kan kami mengikuti pedoman kebijakan Bank Indonesia, ya kami harus patuh dengan hukum Bank Indonesia tentang CSR, kalau tidak kita juga yang kena sanksi dari pusat” (Wawancara pada tanggal 27 September 2016 pukul 10:27 di Kantor Bank Indonesia Kota Kediri)

Berbeda halnya seperti yang diungkapkan dalam wawancara dengan Eko mengenai aturan hukum yang dipakai dalam penerimaan program sosial Bank Indonesia, sebagai berikut:

“...ketentuan hukum yang dipakai apa ya *Mas*, tidak ada *Mas*. Hukum mendirikan usaha itu ada, kalau hukum penerima bantuan kok saya rasa tidak ada. Kalau pihak internal seperti Bank Indonesia itu hukum dalam pelaksanaan program kegiatan harus sesuai dengan hukum yang berlaku atau bantuan hibah dan lain-lainnya. Kalau untuk pengusaha kecil seperti kami, aturan hukumnya ya berjalan yang tidak merugikan konsumen *Mas*” (Wawancara pada tanggal 28 September 2016 pukul 13:35 di Rumah Galeri Bapak Eko Hariyanto Bandar Kidul)

Upaya yang dilakukan Bank Indonesia dalam mendukung yaitu melalui pengembangan sektor riil dan UMKM serta peningkatan akses UMKM lembaga keuangan formal. Salah satu langkah nyata yang dilakukan Bank Indonesia adalah dengan mendukung pengembangan komoditas atau produk unggulan daerah berupa kain tenun ikat. Kerajinan tenun ikat yang selama ini dikenal oleh

masyarakat kota Kediri dalam bentuk sarung goyor dan sudah dikembangkan untuk bahan pakaian khas memiliki potensi untuk dikembangkan. Keberadaan tenun ikat ini menjadi bagian dari kain nusantara yang unik, bernilai budaya, dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga patut dilestarikan dan dikembangkan kapasitasnya.

2. Pemerintah Kota Kediri

Pemerintah Kota Kediri dalam membantu mengembangkan usaha tenun ikat di Bandar Kidul Kota Kediri. Seperti yang dikutip dalam wawancara dengan Ibu Merry Komala Dewi dalam wawancara mengenai keterlibatan Pemerintah Kota Kediri dalam pengembangan UMKM di Kampung Industri Tenun Ikat Bandar Kidul bekerja sama dengan Bank Indonesia Kota Kediri, yaitu:

“...*stakeholder*-nya kalau dari Pemerintah ya Pemerintah Kota Kediri, *Mas*. Bukan dinas, dinas hanya menjalankan apa yang diperintahkan dari pusat. Semua anggaran, rencana, dan program kerja semuanya dari pusat. Dinas hanya menjalankan”(Wawancara pada tanggal 30 September 2016 Pukul 09.35 di kantor Bank Indonesia Kota Kediri)

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kediri dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perindustrian dan perdagangan. Sesuai fungsinya yaitu:

- 1) Perumusan kebijakan teknis pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian dan perdagangan;
- 4) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Disperindag Kota Kediri memberikan kemudahan atau akses kepada para perajin atau pelaku usaha Kampung Tenun Ikat Kediri. Kemudahan-kemudahan tersebut berupa kemudahan dalam proses pengurusan legalitas produk. Legalitas produk tersebut berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI) Tanda Daftar Gudang (TDG), merk/ label, dan izin pameran, Disperindag juga mengembangkan sistem manajemen informasi pelayanan perizinan online (e-SIUP) untuk mempermudah masyarakat dalam hal perizinan. Serta peran tidak sebatas itu, pemerintah juga berusaha dalam mematenkan hak cipta (HAKI) tenun ikat Bandar Kidul di Kementrian Hukum dan HAM.

Seperti yang dikutip dalam wawancara dengan Eko Hariyanto, sebagai berikut:

“...Sekarang sudah enak, *Mas*. Kami mendapatkan banyak kemudahan dari Pemerintah Kota Kediri, misalnya kalau mau mengurus izin usaha kita langsung ke dinas lalu mmberikan berkas yang diperlukan, dan nanti akan diurus oleh dinasnya dan gratis. Tapi harus diingat bawa kita harus membawa surat kelengkapannya. Selain itu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kediri kami dibantu untuk mematenkan merk atau dan lain-lain di Kementrian Hukum dan HAM, kalau saya sudah terdaftar dan memiliki HAKI untuk produksi dan merk, kalau untuk yang lainnya masih diusahakan *Mas*”. (Wawancara pada tanggal 29 Sepetember 2016 pukul 13:30 di Rumah Galeri Bapak Eko Hariyanto Bandar Kidul Kota Kediri)

Begitu juga seperti yang diungkapkan oleh Khaerul selaku anggota dari Kelompok Industri Tenun Ikat di Bandar Kidul Kota Kediri, sebagai berikut:

“...ada bantuan dari pemerintah kota Kediri dalam mengembangkan industri kami ini, *Mas*. Pemerintah juga mengadakan pekan budaya atau pameran dan kita sudah pasti diikutsertakan karena ini merupakan sebuah ajang promosi untuk memasarkan dagangan kami. sehingga banyak

orang yang tahu dan jika tertarik mereka akan membeli. Untuk HAKI sendiri saya masih mengusahakannya, karena ada nama yang sama di Kementrian Hukum dan HAM jadi saya harus mengganti nama produksi dulu agar dapat paten”. (Wawancara pada tanggal 29 September 2016 pukul 14:25 di Rumah Galeri Bapak Khaerul Anam Bandar Kidul Kota Kediri)

Pelatihan dan pembinaan juga diberikan untuk membantu masyarakat kampung tenun ikat Bandar Kidul dalam hal promosi atau pemasaran. Bank Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Kota Kediri telah menyediakan tenaga pendamping bagi masyarakat perajin tenun ikat Bandar Kidul sebagai penghubung antara Bank Indonesia, pemerintah dan dengan Industri Kecil Menengah (IKM). Seperti kutipan wawancara oleh Khaerul Anam, sebagai berikut:

“...pemerintah juga menyediakan pendamping, untuk mendampingi masyarakat dalam menjalankan usahanya, siapa tahu ada yang mendapatkan kesulitan atau butuh sesuatu. Jadi nanti pendamping fungsinya untuk melaporkan ke Dinas pada setiap bulannya yakni apakah ada perkembangan atau kebutuhan yang kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat” (Wawancara pada tanggal 29 September 2016 pukul 10:00 di Rumah Galeri Bapak Khaerul Anam Bandar Kidul)

Fungsi tenaga pendamping yang lain adalah sebagai fasilitator, motivator, serta penghubung. Selain itu fasilitator juga memfasilitasi kegiatan studi banding di sentra industri kecil dan menengah (IKM) yang sudah maju untuk meningkatkan ketrampilan IKM. Seperti yang dikutip dalam wawancara dengan Eko Hariyanto, sebagai berikut:

“...tenaga pendamping memberikan motivasi kepada kami para perajin agar lebih giat dan semangat lagi dalam membuat usahanya lebih sukses. Hambatan bagi perajin sendiri adalah dalam hal modal dan pemasaran, kebanyakan dari kami kurang banyak modal dan kurang berani mengambil resiko. Namun pemerintah bersama dengan Bank Indonesia Kota Kediri membantu kami dalam memecahkan masalah yang hadapi” (Wawancara pada tanggal 29 September 2016 pukul 13:00 di Rumah Galeri Bapak Eko Hariyanto bandar Kidul)

Tenaga yang disediakan oleh Pemerintah Kota Kediri untuk mendampingi masyarakat kampung tenun ikat Kediri memiliki kemampuan dasar yang berbeda. Namun pada dasarnya, tenaga pendamping dititik beratkan pada kemampuan pemasaran, hal ini berguna untuk mengajarkan dan membantu masyarakat tenun dalam hal memasarkan produknya sendiri, karena pada kenyataan dan masalahnya adalah bahwa masyarakat belum cukup mampu untuk memasarkan produknya sendiri secara luas. Seperti yang dikutip dalam wawancara dengan Siti, sebagai berikut:

“...tenaga pendamping dari pemerintah kota Kediri melalui dinas-dinasnya memiliki kemampuan yang baik, karena tugasnya bukan hanya untuk menghubungkan masyarakat dengan pemerintah saja, namun juga harus membagi keahlian yang dimilikinya kepada masyarakat tenun ikat, supaya merka juga memiliki kemampuan lain selain dari pelatihan-pelatihan yang sudah diberikan” (Wawancara pada tanggal 28 September 2016 pukul 11.25 di Rumah Galeri Ibu Siti Ruqayah)

Pemerintah Kota Kediri juga menyediakan pameran dagang dalam jangka waktu tertentu. Setiap UKM diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam pameran yang digelar oleh Pemerintah Kota Kediri maupun oleh lembaga lainnya. Begitupun juga dengan Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul yang telah diberikan akses untuk promosi dan pemasaran. Pemasaran produk kampung tenun ikat Kediri pada saat ini sudah merambah pada pasar nasional dan mancanegara. Seperti kutipan dalam wawancara bersama Eko, sebagai berikut:

“...akses pemasarannya pun kami sudah merambah pada pasar nasional dan mancanegara, ini berkat bantuan dinas-dinas pemerintah kota Kediri dalam hal promosi ke luar kota maupun ke laur negeri. Pada waktu itu, saya lupa tepat harinya kapan, dari dinas perhubungan membantu kami dalam hal pemasaran produk di luar negeri. Karena pada saat itu, kepala dinas beserta timnya ada acara kedinasan di Amerika, sehingga mereka membantu kami memasarkan produk kami kesana”. (Wawancara pada

tanggal 30 September 2016 pukul 13:30 di Rumah Galeri Bapak Eko Haroyanto selaku ketua industri kampung tenun ikat di Bandar Kidul Kota Kediri)

3. Masyarakat

Selain Bank Indonesia dan Pemerintah, masyarakat juga memegang peran yang penting dalam pengembangan UMKM kampung tenun ikat di Bandar Kidul, masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat kampung tenun ikat dan masyarakat kalangan akademisi. Masyarakat kampung tenun ikat Bandar Kidul Kota Kediri terdiri dari 10 (sepuluh) orang pengrajin dengan 1 (satu) orang sebagai ketua kelompok di kampung tenun ikat Bandar Kidul. Seperti yang dikutip dalam wawancara dengan Eko, sebagai berikut:

“...kita ada 10 (sepuluh) orang *Mas* dalam 1 (satu) kelompok disini. 10 (sepuluh) orang tersebut berdomisili di desa ini dan saya sebagai ketua kelompok yang telah dipilih sejak tahun 2015 menggantikan ketua yang lama dan dipilih oleh anggota dan pihak Bank Indonesia juga sebagai pendamping teman-teman di industri kampung tenun ikat Bandar Kidul” (Wawancara pada tanggal 29 September 2016 pada pukul 13:30 di Rumah Galeri Bapak Eko Hariyanto Bandar Kidul)

Ketua kelompok Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul memiliki peran yang penting dalam pengembangan UMKM di Kampung tenun ikat Bandar Kidul. Keteladanan merupakan sebuah unsur yang memegang peran penting dan menentukan bagi berhasilnya seorang pemimpin dalam meningkatkan kemampuan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana ketua atau pemimpin sebuah kelompok tenun ikat melakukan pembinaan kepada seluruh anggota tenun ikat yang lainnya. seperti yang dikutip dalam wawancara dengan Eko, sebagai berikut:

“...kalau saya disini menganggapnya ya biasa saja, kayak anggota yang lainnya *Mas* tidak ada perbedaan yang mencolok. Saya diangkat sebagai

ketua kelompok tenun ikat Bandar Kidul dipilih oleh anggota, menggantikan ketua yang lama yang kurang aktif dalam merangkul dan membangun kerjasama dengan anggota yang lainnya. fungsi dari ketua itu sendiri adalah memberikan motivasi kepada seluruh anggota yang kadang ada masalah, memberikan informasi dari lembaga yang memberikan program kepada kami sampai saat ini, memberikan binaan atau arahan yang lainnya. (Wawancara pada tanggal 29 September 2016 pukul 13:30 di Rumah Galeri Bapak Eko Hariyanto Bandar Kidul)

Untuk meningkatkan kebersamaan dalam meraih keberhasilan dari masyarakat kampung tenun ikat Bandar Kidul memberikan laporan kepada Bank Indonesia. Hal ini dilakukan agar Bank Indonesia tahu produksi dan penjualan setiap bulan oleh setiap anggota dari kampung tenun ikat Bandar Kidul. Selain daripada itu guna dari pelaporan adalah untuk mengetahui kebutuhan yang kurang atau sesuatu hal yang diperlukan dalam membuat kain tenun ikat di Bandar Kidul. Sesuai dengan yang dikutip dalam wawancara dengan Siti, sebagai berikut:

“...setiap bulan harus melapor *Mas* ke Bank Indonesia. Ya tahu sendiri kita memiliki program dengan Bank Indonesia selama 3 (tiga) tahun dan ini sudah belasan hampir 2 (dua) tahun. Wajib lapor juga untuk kepentingan anggota, misal kita butuh sesuatu seperti pelatihan atau studi banding, Bank Indonesia akan memberikan hal tersebut. Selain itu juga pelaporan produksi dan penjualan setiap bulan apakah meningkat, menurun, atau stabil. (Wawancara pada tanggal 28 September 2016 pukul 11:00 di Rumah Galeri Ibu Siti Ruqayah Bandar Kidul)

Sama seperti halnya dengan cuplikan wawancara dengan Ibu Siti, berikut adalah cuplikan wawancara dengan Khaerul yaitu:

“...sudah kewajiban dan ketentuan dari pihak Bank Indonesia *Mas* bahwa setiap bulan kita harus memberikan laporan, yaitu laporan tentang produksi dan penjualan, lalu juga tentang kebutuhan-kebutuhan yang kurang *Mas*. Misalkan saja kami membutuhkan pelatihan atau studi banding untuk berinovasi dalam membuat kain tenun ikat, biar lebih bervariasi, nanti akan dibantu oleh Bank Indonesia. Pelaporan tersebut diberikan setiap akhir bulan dan dikumpulkan di ketua (atau Bapak Eko Hariyanto) yang nantinya akan diserahkan kepada pihak Bank Indonesia.

(Wawancara pada tanggal 29 September 2016 pukul 14:35 di Rumah Galeri Bapak Khaerul Anam Bandar Kidul)

Dalam meningkatkan kebersamaan di kampung tenun ikat Bandar Kidul masyarakat tenun ikat memberikan iuran setiap ada pameran atau ada acara yang menguntungkan bagi seluruhnya untuk dimasukkan dalam uang kas koperasi. Dana hasil tersebut diambil beberapa persen dari hasil penjualan dalam setiap pameran yang diselenggarakan baik oleh Pemerintah Kota Kediri maupun Lembaga lainnya, seperti Bank Indonesia. Dana hasil tersebut digunakan untuk membeli bahan berupa benang dan zat pewarna benang, untuk menyewa mobil yang digunakan ke lokasi pameran, dan lain-lain. Pada hakikatnya dana hasil tersebut juga pada akhirnya digunakan untuk keperluan anggota kampung tenun ikat sendiri. Dana hasil penjualan yang diambil berapa persen untuk dimasukkan dalam uang kas koperasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh anggota masyarakat kampung tenun ikat Bandar Kidul. Seperti cuplikan wawancara dengan Eko, sebagai berikut:

“...bukan dana iuran yang harus dibayar setiap bulan oleh anggota, *Mas*. Kami hanya menyisihkan sebagian untuk uang untuk diberikan sebagai uang kas koperasi. Gunanya untuk apa? Agar kita punya simpanan yang nantinya bisa digunakan untuk membeli kebutuhan seperti benang dan zat pewarna benang. Ya pastinya juga untuk kebutuhan seluruh anggota sendiri. Seperti kemarin, pameran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Kediri di Kediri *Town Square*, kami menyisihkan dana 4 (empat) juta dari seluruh hasil penjualan. (Wawancara pada tanggal 28 September 2016 pukul 13:30 di Rumah Galeri Bapak Eko Hariyanto Bandar Kidul)

Berkaitan dengan cuplikan diatas, Wahyu mengungkapkan bahwa:

“...kita memberikan dana hasil penjualan setelah ada pameran, *Mas*. Dalam pameran tersebut setiap anggota harus mengeluarkan 4 (empat) sampai 10 (sepuluh) potong kain tenun ikat. Yang nantinya akan dipamerkan dalam acara tersebut, jika ada yang terjual sebagian dari

uang tersebut diberikan untuk uang kas koperasi. Koperasi itu sendiri fungsinya adalah sebagai wadah kebutuhan yang bisa membantu anggota dan kebersamaan seluruh anggota. Dana yang ada di koperasi tersebut biasanya buat beli bahan *Mas*, misalnya benang dan zat pewarna benang. Nanti bahan-bahan tersebut disimpan di koperasi, jika ada anggota yang butuh namun belum ada uang bisa dipinjam dulu dan wajib membayar, ya istilahnya kita hutang *Mas*, ya harus dibayar. Tapi juga gak harus dibayar dengan tunai *Mas*, bisa dibayar dengan kain tenun. (Wawancara pada tanggal 29 September 2016 pukul 14:45 di Rumah Bapak Erwin Wahyu selaku bendahara di Kampung tenun ikat Bandar Kidul)

Selain itu untuk menunjukkan sikap kebersamaan seluruh anggota kampung tenun ikat memiliki sebuah rumah galeri tenun ikat yang gunanya untuk memamerkan hasil dari produksi setiap anggota. Hal tersebut dilakukan agar pada saat ada pengunjung yang datang bisa melihat hasil karya seluruh anggota dalam satu tempat. Pada dasarnya rumah galeri ini menunjukkan bahwa kampung tenun ikat Bandar Kidul Kota Kediri siap bersaing dengan pasar yang lain. Sesuai dengan cuplikan wawancara dengan Eko, sebagai berikut:

“...kami sebagai pihak yang menerima program untuk meningkatkan kesejahteraan di kampung tenun ikat Bandar Kidul yang sudah dilakukan selama 3 (tiga) tahun dan hingga pada saat ini sudah berlangsung hampir 2 (dua) tahun, kami disewakan ruko oleh Bank Indonesia sebagai rumah galeri dari kampung tenun ikat di Bandar Kidul. Fungsi dari rumah galeri tenun ikat tersebut adalah agar setiap anggota bisa menunjukkan hasil karyanya dan dipamerkan dalam rumah galeri tersebut. Sehingga ketika ada pengunjung yang datang dari luar daerah untuk melihat akan mudah melihat karya mereka, karena berada dalam satu tempat, jadi tidak harus melihat satu-satu ke pengrajin. Ini juga akan memotivasi setiap anggota agar lebih bersemangat dalam membuat kain tenun yang bagus dan unik” (Wawancara pada tanggal 28 September 2016 pukul 10:00 di rumah Galeri Bapak Eko Hariyanto Bandar Kidul)

Sesuai dengan cuplikan diatas, sama halnya seperti yang diungkapkan oleh

Wahyu, sebagai berikut:

“...kita disini juga disewakan ruko *Mas* oleh Bank Indonesia-nya. Guna dari ruko tersebut adalah sebagai rumah galeri dari seluruh anggota,

artinya bahwa setiap anggota bisa memamerkan kain tenunnya di rumah galeri. Setiap anggota menunjukkan 10 kain potong tenun untuk dipamerkan di rumah galerinya, *Mas*. (Wawancara pada tanggal 29 September 2016 pukul 14:45 di rumah Bapak Erwin Wahyu selaku bendahara di kampung tenun ikat Bandar Kidul Kota Kediri)

Selain dari Bank Indonesia yang memiliki program di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul, Pemerintah Kota Kediri ikut serta dalam membantu meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat, adapun pihak-pihak yang membantu proses pengembangan UMKM di kampung tenun ikat Bandar Kidul ini terutama dalam hal pemasaran yaitu dari kalangan akademisi. Seperti cuplikan dalam wawancara dengan Eko, sebagai berikut:

“...kemarin juga ada yang datang dari kantor-kantor swasta yang ada di Kediri dan luar Kediri. Mereka membantu memasarkan dan kalau dari luar daerah suka dengan motif tenun kami, ini juga akan membantu kami dalam hal pemasaran. Kemarin juga ada mahasiswa yang datang untuk melihat, mereka datang untuk melihat kualitas kain tenun kami dan yang akan digunakan sebagai baju untuk program kemahasiswaan mereka” (Wawancara pada tanggal 29 September 2016 di Rumah Galeri Bapak Eko Hariyanto Bandar Kidul)

Sebagaimana seperti yang dijelaskan diatas, pemegang kepentingan atau *stakeholder* untuk kampung tenun ikat di Bandar Kidul ini adalah Bank Indonesia, Pemerintah Kota Kediri, masyarakat kampung tenun ikat Bandar Kidul, dan masyarakat akademisi. Ada keterlibatan dari Bank Indonesia dalam pelaksanaan program pengembangan UMKM kampung tenun ikat Bandar Kidul. Seperti cuplikan wawancara dengan Khaerul, sebagai berikut:

“...untuk investor dari luar belum ada, toh kita juga lagi ada program dari Bank Indonesia. Untuk kelanjutannya kita juga tidak tahu, Bank Indonesia akan memperpanjang atau melakukan program yang lain, karena ini juga baru berjalan. Kita ikut saja, apa kata dari pihak Bank Indonesia-nya. (Wawancara pada tanggal 29 September 2016 pukul 14:45 di Rumah Galeri Bapak Khaerul Anam Bandar Kidul)

Adapun cuplikan wawancara dengan Wahyu, yang mengemukakan bahwa:

“...ya sampai sejauh ini saya belum mendapatkan bantuan dari investor asing, *Mas*. Kalau dari pemerintah kota ya ada *Mas* tapi tidak sebanyak yang diberikan oleh Bank Indonesia, ya itu menurut pendapat saya *Mas*. (Wawancara pada tanggal 29 September 2016 pukul 14:45 di Rumah Bapak Erwin Wahyu Bandar Kidul)

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Khaerul dan Wahyu diatas, maka dapat disimpulkan bahwa belum ada investor asing. Sejauh ini yang terlibat adalah Bank Indonesia dan Pemerintah Kota Kediri saja.

c. **Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* kepada masyarakat dan sarana dalam pengembangan UMKM**

Tanggung jawab sosial masyarakat perajin tenun ikat terhadap Bank Indonesia Kediri adalah dengan ikut serta dalam program yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Dengan keikutsertaan masyarakat perajin dalam program tersebut akan mendukung masyarakat sendiri dalam mengembangkan produknya selain itu juga masyarakat menghargai pihak terkait yang membantu mendukung dan mengembangkan usaha masyarakat. Tindakan nyata untuk bekerjasama dalam mengembangkan usaha masyarakat yaitu kain tenun ikat di Bandar Kidul. Seperti yang dikemukakan dalam wawancara dengan Eko, sebagai berikut:

“...bentuk tanggung jawab kami sebagai masyarakat perajin tenun ikat yang ada disini adalah dengan ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan program yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk kami, ya dengan hal seperti itu *Mas*, kita bisa menghargai pemberian bantuan dari Bank Indonesia. Tanggung jawab kami adalah mau untuk dilatih, dibimbing, dan lain sebagainya *Mas*. Ya kita bertanggung jawab atas program tersebut, karena tidak semua usaha masyarakat/ UMKM kan dibantu oleh Bank Indonesia. Ya kalau menurut saya, kami mendapat bantuan ini karena kami berpotensi untuk berkembang lebih baik lagi” (Wawancara

pada tanggal 28 September 2016 pukul 13:15 di Rumah Galeri Bapak Eko Hariyanto Bandar Kidul)

Sama seperti yang dikemukakan oleh Siti, Khaerul, Wahyu, Imam, Sudarmanto, Sholeh, dan kawan-kawan dalam wawancara yaitu sebagai berikut:

“...tanggung jawab kami terhadap Bank Indonesia adalah ikut serta dalam program kegiatannya *Mas*. Tanggung jawab lainnya adalah sikap menghargai dan menjaga nama baik usaha kami karena ini juga akan membawa citra baik terhadap pihak-pihak yang ikut membantu dan mendukung usaha kami *Mas*. (Wawancara pada tanggal 28, 29 September 2016 pukul 13:45 di Bandar Kidul)

Pengembangan UMKM oleh Bank Indonesia telah berjalan hampir 2 (dua) tahun ini telah membuahkan hasil yang semakin hari semakin baik, karena Bank Indonesia yang secara aktif membantu dan mendukung UKM tenun ikat Bandar Kidul yang menjadi produk unggulan dari Kota Kediri. Upaya Bank Indonesia Kediri dalam meningkatkan perekonomian daerah dengan terus-menerus mempromosikan ke mancanegara melalui pameran-pameran yang diadakan di luar negeri. Kerajinan tenun ikat sudah sepantasnya untuk dikembangkan karena bagian dari kain nusantara yang bernilai budaya dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga patut untuk dikembangkan.

Perkembangan sektor usaha tenun ikat di Bandar Kidul Kota Kediri kini semakin hari semakin berkembang maju. Keberadaan tenun ikat ini menjadi bagian yang penting dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan masyarakat yang memiliki ketrampilan dalam tenun ikat. Karena keberadaannya tersebut yang menguntungkan bagi para pengusaha kain tenun ikat sehingga bisa membuka lowongan pekerjaan baru bagi masyarakat yang memiliki ketrampilan dalam

membuat kain tenun ikat secara tradisional. Seperti yang dikemukakan oleh Eko dalam wawancara, sebagai berikut:

“...syukur Alhamdulillah *Mas*, semakin hari semakin berkembang usahanya. Kalau kayak gini kan juga bisa membantu masyarakat yang lainnya, khususnya mereka yang memiliki ketrampilan menenun. Bisa bekerja disini” (Wawancara pada tanggal 28 September 2016 pukul 13:45 di Rumah Galeri Bapak Eko Hariyanto Bandar Kidul)

Seperti yang diungkapkan oleh Joko dalam wawancara, sebagai berikut:

“...dengan berkembangnya industri kampung tenun ikat di Bandar Kidul ini akan memberikan dampak juga kepada masyarakat lainnya. Tidak hanya masyarakat di lingkungan sekitar tetapi juga masyarakat yang di luar daerah. Kalau masyarakat lingkungan sekitar akan diuntungkan dengan semakin dikenal oleh publik sebagai kampung industri tenun ikat yang berada di Kediri. Kalau untuk masyarakat lain yakni mereka yang memiliki ketrampilan khusus seperti bisa menenun dengan alat tradisional, ini akan membantu mereka dalam mencari pekerjaan baru tepatnya di kampung tenun ikat Bandar Kidul. Ya semua akan saling berkaitan dan bergantung satu sama lain” (Wawancara pada tanggal 1 Oktober 2016 pukul 09:45 di Kantor Bank Indonesia Kediri)

pengembangan merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam rangka memajukan, memperbaiki, meningkatkan sesuatu yang sudah ada secara teratur dan bertahap untuk menjadi sesuatu yang lebih baik serta bermanfaat. Kampung tenun ikat yang berada di Bandar Kidul Kota Kediri merupakan industri yang sudah ditekuni sejak lama dan kini usaha kecil perorangan tersebut semakin hari kian berkembang dan maju. Semua yang diraih saat ini karena kerjasama dan gotong royong masyarakat perajin untuk mengembangkan usahanya lebih maju. Tanggung jawab sosial masyarakat perajin tenun ikat ini memberikan pengaruh kepada masyarakat umum sekitarnya dengan memberikan pekerjaan bagi mereka yang memiliki keterampilan menenun dengan menggunakan mesin tenun tradisional.

Selain pelatihan-pelatihan yang diberikan secara gratis oleh Bank Indonesia (dan Pemerintah Kota Kediri), masyarakat juga mendapatkan berbagai macam sarana atau bantuan berupa alat yang melengkapi proses pembuatan kain tenun ikat. Semua kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat perajin tenun ikat akan difasilitasi namun diberikan secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Seperti yang diungkapkan oleh Joko Susilo dalam wawancara sebagai berikut:

“...selama ini bantuan yang telah diberikan oleh Bank Indonesia kepada masyarakat perajin tenun Bandar Kidul selain pelatihan adalah mesin tenun (ATBM) sebanyak 25 (dua puluh lima) dan benang. bantuan tersebut disalurkan secara bertahap *Mas*, tidak langsung banyak. Kemarin periode pertama diberikan pada awal program yaitu maret 2015 kami berikan 11 (sebelas) unit mesin tenun dan kami menambahkan lagi pada Juni 2015 sebanyak 14 (empat belas) mesin tenun. Kami berikan karena kami melihat bahwa ada peningkatan dalam penjualan namun minimalnya mesin yang tersedia, ini akan membantu masyarakat perajin untuk bisa memproduksi lebih banyak lagi. Semua anggota mendapatkan 2 (dua) sampai 4 (empat) mesin tenun, ya semua dibagi rata *Mas*. Selain itu juga benang senilai 69 juta yang juga dibagikan kepada seluruh anggota. (Wawancara pada tanggal 1 Oktober 2016 pukul 10:11 di Kantor Bank Indonesia Kota Kediri)

Akan tetapi masyarakat kampung tenun ikat Bandar Kidul menolak untuk menerima bantuan modal berupa uang atau tunai, hal ini dikarenakan masyarakat kampung tenun ikat Bandar Kidul takut jika kita memberikan modal berupa uang atau tunai malah akan tidak digunakan untuk kebutuhan usahanya, seperti yang dikemukakan oleh Joko Susilo sebagai berikut:

“...sejauh ini kami memberikan bantuan berupa mesin dan benang *Mas*, karena pernah dulu ketika kami memberikan modal berupa uang, salah satu dari anggota mengusulkan agar uang tersebut dibelikan benang. Karena mereka takut jika diberikan uang, uang tersebut tidak masuk untuk kegiatan usahanya, malah digunakan untuk hal yang lain” (Wawancara pada tanggal 1 Oktober 2016 pukul 10:11 di Kantor Bank Indonesia Kota Kediri)

Sama halnya dengan tanggapan oleh Wahyu terkait dengan bantuan yang diberikan oleh Bank Indonesia Kediri, sebagai berikut:

“...untuk modal secara tunai dulu pernah diberikan *Mas*, ya kami dikasih uang buat tambah modal. Ya ngerti sendiri *Mas*, kami takut saja sih kalau dikasih uang nati malah larinya ke kebutuhan yang lain, gak masuk ke kebutuhan usaha. Makanya pas dikasih bantuan berupa uang, saya menolak, bukan menolak dikasih bantuannya tapi menolak bantuan berupa uang. Lalu pada waktu itu saya mengusulkan uangnya untuk dibelikan bahan, yaitu benang. Untuk benangnya sendiri beli di Surabaya *Mas*, distributor yang sudah menjadi langganan kami” (Wawancara pada tanggal 29 September 2016 pukul 14:15 di Rumah Bapak Erwin Wahyu Bandar Kidul)

Bantuan berupa alat yang diberikan oleh Bank Indonesia Kediri dalam pengembangan UMKM di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul berupa:

1) Mesin Tenun (ATBM)

Mesin tenun merupakan peralatan alat untuk melakukan penenunan yang digerakan oleh manusia. ATBM dapat dipergunakan sambil duduk (ini terdapat pada industri kecil dan tradisional) maupun dengan berdiri. Mesin tenun merupakan alat yang vital dan utama digunakan masyarakat tenun untuk melakukan proses produksi, apabila masyarakat perajin tidak memiliki mesin tenun ini tidak dapat memproduksi apapun. Bank Indonesia memberikan bantuan alat berupa mesin tenun kepada masyarakat perajin tenun ikat yang berada di Bandar Kidul, hal ini dilakukan agar masyarakat kampung tenun ikat memiliki lebih banyak mesin sehingga banyak juga memproduksiya. Setiap anggota mendapatkan 2 (dua) sampai 4 (empat) unit mesin tenun, Bank Indonesia memberikan 25 (dua puluh lima) unit mesin tenun kepada masyarakat tenun ikat di Bandar Kidul. Mesin tenun ikat diberikan karena Bank Indonesia tahu akan

peningkatan penjualan dan minimnya mesin tenun yang tersedia. Seperti yang dikutip dalam wawancara dengan Eko, sebagai berikut:

“...ya kalau saya kan masih baru mulai usahanya *Mas*, jadi punya mesin pun gak banyak, gak seperti perajin yang lain. Ini pun juga saran dari ayah mertua untuk usaha kain tenun ikat. Diawal memang sudah lumayan untuk penjualannya *Mas* karena dibantu ayah mertua juga untuk pemasarannya. Kalau ditanya tentang mesin tenun ya kami, khususnya saya butuh untuk membantu meningkatkan produksi *Mas*, karena setiap hari pesanan meningkat dan mesin saya sedikit” (Wawancara pada tanggal 29 September 2016 pukul 13:30 di Rumah Galeri Bapak Eko Hariyanto Bandar Kidul)

Sama halnya seperti yang dikemukakan oleh Siti, sebagai berikut:

“...setiap bantuan pasti ada hasilnya kalau digunakan dengan baik *Mas*, kayak bantuan dari Bank Indonesia untuk pemberian mesin tenun, ya ini membantu saya juga untuk bisa memproduksi kain tenun lebih banyak lagi. Saya mendapatkan 3 (tiga) mesin tenun. Ya saya rasa senang mendapat bantuan dari Bank Indonesia” (Wawancara pada tanggal 28 September 2016 pukul 11:35 di Rumah Galeri Ibu Siti Ruqayah Bandar Kidul)

Mesin tenun (ATBM) bantuan hibah dari Bank Indonesia Kediri memberikan manfaat bagi perajin tenun ikat di Bandar Kidul. Mesin tenun ini membantu mereka untuk lebih banyak lagi memproduksi kain tenun. Bantuan ini membuat perajin senang karena membantu memenuhi pesanan secara cepat dan tepat.

2) Benang

Kain yang dibuat dengan cara ditenun mempunyai dua arah benang yang saling menyilang atau berlawanan, yaitu dinamakan benang lusi (lungsin) dan benang pakan. Benang lusi merupakan benang yang disusun lurus secara vertikal sedangkan benang pakan merupakan benang yang disusun lurus secara horizontal pada sebuah kain. Dua komponen benang ini saling menyilang satu sama lainnya

sehingga membentuk anyaman kain. Seperti yang dikemukakan oleh Siti, sebagai berikut:

“...teknik untuk membuat ragam hias pada suatu tenunan dengan cara mengikat benang lusi atau benang pakan sebelum benang tersebut diwarnai *Mas*. Jadi gini *Mas*, pada saat kain ditenun corak akan muncul ke permukaan kain. Proses pengikatan dilakukan setelah benang dipasang pada suatu alat perentang. Perenatanan itu dibuat sama dengan lebar dan panjang kain yang dibuat. Tandai bagian yang akan diwarnai atau corak, kemudian ikat per kelompok benang dan dicelup ke dalam zat pewarna. Setelah itu benang dikeringkan dan ikatan dibuka, maka bagian yang terikat tidak dapat menyerap zat warna karena tertahan oleh ikatan tersebut, begitu *Mas* prosesnya memberikan warna pada benang” (Wawancara pada tanggal 18 September 2016 pukul 11:35 di Rumah Galeri Ibu Siti Ruqayah Bandar Kidul)

Benang merupakan bahan dasar untuk membuat kain tenun. Benang pada kain tenun adalah benang lusi dan benang pakan. Benang tersebut saling berkaitan, karena memang pada dasarnya benang tersebut adalah benang khas dari tenun jawa. Selain itu membutuhkan keterampilan dan ketelitian yang baik untuk menenun kain ini. Adapun bantuan Bank Indonesia kepada masyarakat perajin kain tenun ikat di Bandar Kidul seperti yang dikemukakan oleh Wahyu, sebagai berikut:

“...Bank Indonesia memberikan kepada kami bantuan benang *Mas*, 1 pres benang harganya 700 (tujuh ratus) ribu ya pada saat itu Bank Indonesia membelikan kami dengan total biaya 69 (enam puluh sembilan) juta. Ya kira-kira dapat 2 (dua) sampai 3 (tiga) karung *Mas* kalau ditaruh karung, hehe” (Wawancara pada tanggal 29 September 2016 pukul 14:45 di Rumah Bapak Erwin Wahyu Bandar Kidul)

Sama hal seperti yang dikemukakan oleh Eko, sebagai berikut:

“...ya kemarin kan kita dapat bantuan modal berupa uang *Mas*, saya takut kalau dikasih uang nanti malah uangnya tidak karuan tidak masuk ke kebutuhan usaha. Jadi saya dan anggota yang lain mengusulkan untuk dibelikan benang saja. Karena kalau dibelikan berupa barang pasti akan berguna dan benang bisa langsung digunakan oleh masyarakat perajin

Mas, semua dibagi rata” (Wawancara pada tanggal 29 September 2016 pukul 13:30 di Rumah Galeri Bapak Eko Hatiyanto Bandar Kidul)

Bantuan Bank Indonesia kepada masyarakat perajin tenun ikat di Bandar Kidul yang berupa benang diberikan dengan tujuan untuk menambah semangat para perajin. Begitu juga dengan harapan dengan pemberian yang berupa sarana ini adalah untuk meningkatkan kemandirian masyarakat. Selain itu juga meningkatkan kualitas perekonomian masing-masing tanpa harus ada ketergantungan dengan pihak yang lain.

2. **Dampak Pengembangan UMKM di Kampung Industri Tenun Ikat Bandar Kidul melalui *Corporate Social Responsibility* Bank Indonesia Kota Kediri**

a. **Meningkatnya kesejahteraan ekonomi pelaku usaha dan masyarakat**

Pengembangan merupakan salah satu upaya untuk menciptakan masyarakat untuk menjadi berdaya lihat dari sisi kemampuan maupun sisi kesejahteraannya. Pengembangan perekonomian merupakan suatu aspek yang penting dalam pembahasan mengenai kegiatan pengembangan UMKM. Dalam kaitan ini, usaha untuk mengembangkan UMKM di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul yang dilakukan dengan cara meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal dalam melaksanakan kegiatan usahanya untuk mendapatkan peningkatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meningkatnya kesejahteraan ekonomi pelaku usaha melalui pengembangan UMKM di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul dari beberapa hal, sebagai berikut:

1. Peningkatan Omzet Masyarakat

Ada peningkatan omzet usaha dan peningkatan penghasilan masyarakat merupakan poin penting dalam pemberdayaan. Seperti yang dikutip dalam wawancara dengan Joko, sebagai berikut:

“...kalau perkembangan secara ekonomi itu paling menonjol dapat dilihat dari peningkatan omzet dan jumlah pendapatan masyarakat per bulan. Selain itu juga bisa dilihat dari penyerapan tenaga kerja mempengaruhi peningkatan perekonomian masyarakat, dan juga peningkatan kualitas dari kain tenunnya, ya kan mereka sudah mendapat berbagai pelatihan-pelatihan dari Bank Indonesia juga, pastinya kualitas tenun mereka sudah lebih bagus” (Wawancara pada tanggal 1 Oktober 2016 pukul 09:35 di Kantor Bank Indonesia Kediri)

Begitupun juga dirasakan oleh Eko yang diungkapkan dalam wawancaranya, sebagai berikut:

“...setelah mengikuti kegiatan pelatihan tenun dan studi banding ke luar kota ya *Mas*, saya menjadi lebih yakin dalam pekerjaan. Konsumen juga banyak yang puas dengan hasil tenun saya. Sehingga pelanggan datang membeli lagi dan bertambah. Omzet kira-kira dan dirata-rata saja bisa mencapai 25 (dua puluh lima) juta sebulan. Itu masih diluar orderan seragam yang bisa mencapai ratusan potong sekali pemesanan” (Wawancara pada tanggal 29 September 2016 Pukul 13:35 di Rumah Galeri Bapak Eko Hariyanto Bandar Kidul)

Lebih lanjut Eko mengungkapkan:

“...saya bersyukur *Mas*, sekarang hari berganti hari pesanan juga bertambah, orderan untuk seragam kantor dan sekolah juga banyak. Karena peraturan Pemerintah Kota Kediri juga untuk semua kantor pemerintah dinas maupun swasta kota Kediri dan siswa dianjurkan memakai baju dengan bahan dasar kain tenun. Sehingga mulai dari SK (Surat Keputusan) kampung industri tenun pada awal 2015 kemarin hingga sampai saat ini pegawai pemerintah dinas, swasta, dan siswa berbondong-bondong membeli kain tenun untuk dijadikan baju seragam *Mas*. Belum lagi pesanan dari luar kota dan luar negeri yang semakin meningkat *Mas*. (Wawancara pada tanggal 29 September 2016 pukul 13:35 di Rumah Galeri Bandar Kidul)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, peningkatan omzet masyarakat kampung industri tenun ikat merupakan indikator yang paling mencolok dalam menentukan pengembangan ekonomi dalam sebuah kelompok masyarakat. Omzet para perajin tenun di kampung industri tenun ikat Bandar Kidul telah meningkat setelah adanya dukungan pengembangan UMKM oleh Bank Indonesia. Hari berganti hari semakin banyaknya pesanan baik dari dalam kota, luar kota, maupun luar negeri.

2. Meningkatnya kesempatan untuk memperoleh akses dalam hal pemasaran Bank Indonesia menganggap bahwa kegiatan pemasaran hasil produksi itu penting. Sebab hasil produksi tanpa pemasaran akan menyebabkan terhentinya kegiatan produksi dan usaha. Oleh sebab itu Bank Indonesia Kota Kediri dalam hal ini membantu untuk memasarkan produksi kain tenun ikat guna untuk meningkatkan penjualan. Seperti yang dikemukakan oleh Eko dalam wawancara, sebagai berikut:

“...saya senang dengan adanya pengembangan UMKM dari Bank Indonesia di kampung industri tenun ikat Bandar Kidul ini membawa peningkatan, seperti penjualan saya bisa tembus pasar luar negeri *Mas*, misal Singapore, Hongkong, dan negara lainnya. Begitu juga dirasakan oleh teman-teman saya *Mas*, kita kan disini kelompok jadi juga harus berbagi agar semua juga merata meningkatnya” (Wawancara pada tanggal 29 September 2016 pukul 13:35 di Rumah Galeri Aam Putra Bapak Eko Hariyanto Bandar Kidul)

Lebih lanjut, Eko menambahkan bahwa:

“...kemudahan dalam memperoleh akses baik pemasaran maupun dalam urusan legalitas produk juga menjadi salah satu indikatornya *Mas*, karena berkaitan dengan legalitas bahwa kampung industri tenun ikat Bandar Kidul sudah memiliki SK (Surat Keputusan) dari Pemerintah Kota Kediri sehingga ini juga mempermudah kami untuk berdaya. Selain itu juga kebiasaan untuk bermusyawarah dalam menemukan solusi sebuah masalah juga dapat dihitung sebagai indikator dalam pengembangan

masyarakatnya” (Wawancara pada tanggal 29 September 2016 pukul 13:35 di Rumah Galeri Aam Putra Bapak Eko Hariyanto Bandar Kidul)

Oleh karena itu, pemberian akses dalam hal pemasaran dan legalitas produk oleh Pemerintah Kota Kediri diharapkan untuk dapat mempermudah masyarakat dalam mengembangkan usahanya.

3. Pemenuhan Kebutuhan Pokok

Sektor industri tenun ikat menjadikan lapangan pekerjaan bagi warga kota Kediri, khususnya di Bandar Kidul, Mojoroto tepatnya di Kampung industri tenun ikat. Industri ini merupakan komoditas unggulan dari Kota Kediri, sehingga Bank Indonesia memberikan dukungan kepada masyarakat industri tenun ikat dalam implementasi CSR BI dengan tujuan untuk mensejahterakan para anggota Kampung industri tenun ikat dengan salah satu caranya yaitu meningkatkan pendapatan mereka. Banyak sekali manfaat dari pelaksanaan CSR Bank Indonesia Kediri yang dirasakan para anggota Tenun ikat di Bandar Kidul.

Pelaksanaan CSR Bank Indonesia Kediri memberikan dampak yang sangat berarti bagi anggota Kampung industri tenun ikat. Dampak tersebut berupa adanya peningkatan pendapatan dari sebelum dan sesudah adanya pelaksanaan CSR Bank Indonesia Kediri di Industri Tenun Ikat Bandar Kidul. Dampak adanya peningkatan pendapatan dapat diperoleh anggota Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul berpengaruh terhadap kemajuan industri tenun ikat Bandar Kidul dan kesejahteraan anggota dan keluarganya. Pendapatan meningkat juga akan menambah besarnya modal anggota industri tenun ikat Bandar Kidul untuk keberlanjutan usahanya.

Sekarang ini, kebutuhan pokok bisa dikatakan berbeda-beda oleh setiap keluarga. Kebutuhan pokok yang akan dibahas kali ini yaitu kebutuhan pokok minimal disetiap keluarga yaitu pemenuhan sandang, pangan, dan papan. Sandang adalah pakaian yang diperlukan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Pakaian berfungsi untuk melindungi dari suhu panas dan dingin. Kebutuhan sandang untuk para anggota sekarang sudah terpenuhi. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh salah seorang anggota kampung tenun ikat Bandar Kidul dalam wawancara dengan Sudarman, sebagai berikut:

“...kebutuhan bagi keluarga saya ya Alhamdulillah sudah terpenuhi *Mas*, ya meskipun saya juga membuat kain bahan untuk baju dan lain-lain tapi kan saya tidak melulu pakai yang saya buat, saya juga butuh atau pengen beli baju, celana yang lainnya *Mas*. Hehe. Untuk kebutuhan baju anak ya saya serahkan ke istri *Mas*, biar saya saja yang memikirkan usaha dan mencari uangnya” (Wawancara pada tanggal 29 September 2016 pukul 15:17 di Rumah Galeri Bapak Sudarman Bandar Kidul)

Hal serupa juga dikatakan oleh Erwin dalam wawancara, sebagai berikut:

“...baju untuk keluarga saya ya bersyukur sudah terpenuhi *Mas*, meskipun harga bajunya enggak mahal, yang penting buat saya bisa melindungi tubuh dari terik matahari itu sudah cukup” (Wawancara pada tanggal 29 September 2016 pukul 14:29 di Rumah Galeri Bapak Erwin Wahyu Bandar Kidul)

Kebutuhan sandang bagi para anggota kampung tenun ikat Bandar Kidul dan keluarganya sudah terpenuhi dengan baik mereka sudah bisa membeli baju dari hasil usahanya. Sama halnya dengan kebutuhan pangan yang mereka butuhkan sehari-hari untuk menambah energi sebagai bekal untuk bisa beraktivitas dalam usaha yang ditekuninya. Pangan adalah kebutuhan yang paling utama bagi manusia. Kebutuhan pangan mereka pada saat ini sudah terpenuhi,

bahkan bisa makan lebih dari cukup setelah usahanya berkembang lebih baik.

Seperti yang disampaikan oleh Erwin dalam wawancara sebagai berikut:

“...ya syukur *Mas*, saya bisa memenuhi kebutuhan pangan keluarga dengan layak. Bisa makan dengan cukup, sehari 3 (tiga) kali dan bahkan lebih, selain itu juga bisa kasih uang jajan untuk anak setiap hari, dan biaya kebutuhan makan sehari-hari cukuplah *Mas*, semua karena rasa syukur” (Wawancara pada tanggal 29 September 2016 pukul 14:29 di Rumah Galeri Bapak Erwin Wahyu Bandar Kidul)

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan oleh Sudarman dalam wawancara, sebagai berikut:

“...dulu sebelum ada bantuan dari Bank Indonesia kebutuhan ya sudah cukup *Mas*, tapi memang saya akui bahwa setelah kelompok tenun ikat di dukung oleh Bank Indonesia, semua penjualan meningkat dan kebutuhan keluarga saya lebih cukup terpenuhi *Mas*, ya ada peningkatan *Mas*. Misal dulu makan sehari 3 (tiga) kali sudah cukup sekarang bisa beli makanan cemilan” (Wawancara pada tanggal 29 September 2016 pukul 15:17 di Rumah Galeri Bapak Sudarman Bandar Kidul)

Peningkatan pendapatan oleh anggota Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul sudah dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Peningkatan pendapatan tersebut juga mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan papan. Papan adalah kebutuhan manusia untuk membuat tempat tinggal. Pada awalnya fungsi rumah hanya untuk bertahan diri, namun lama-kelamaan berubah tempat tinggal keluarga. Oleh karena itu, kebutuhan untuk memperindah rumah semakin ditingkatkan. Kondisi rumah mereka juga sudah layak huni jadi pendapatannya digunakan untuk merenovasi rumah dan membuat rumah galeri untuk pribadi. Seperti yang diungkapkan oleh Sudarman dalam wawancara sebagai berikut:

“...uang keuntungan hasil penjualan dari usaha tenun ini ya pertama untuk kebutuhan sehari-hari *Mas*, untuk makan dan yang lainnya. Dan saya sendiri juga belajar menyalahgunakan untuk ditabung agar nanti bisa

membuat rumah galeri untuk kain tenunnya. Kalau sekarang kan masih jadi satu dengan rumah. Pengennya ya punya galeri sendiri gitu *Mas*” (Wawancara pada tanggal 30 September 2016 pukul 09:08 di Rumah Ibu Sudarman Bandar Kidul)

Begitu juga dengan yang dikatakan oleh Imam dalam wawancara, sebagai berikut:

“...peningkatan pendapatan saya itu salah satunya saya gunakan untuk merenovasi rumah. Rumah saya sekarang terlihat lebih baik lah *Mas* di banding dengan yang lalu” (Wawancara pada tanggal 30 September 2016 pukul 10:25 di Rumah Bapak Imam Safi’i Bandar Kidul)

Kebutuhan pokok minimal anggota kampung industri tenun ikat yang berupa sandang, pangan, dan papan sudah terpenuhi dengan baik. Dampak dari pelaksanaan program CSR Bank Indonesia Kediri sudah bisa meningkatkan pendapatan anggota Kampung industri tenun ikat dan bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selain itu juga kebutuhan kelompok juga meningkat karena selalu adanya kerjasama untuk memajukan usaha.

4. Meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah

Adanya dukungan yang telah diberikan oleh Bank Indonesia Kota Kediri telah melahirkan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung industri tenun ikat Bandar Kidul. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul dilakukan dengan berbagai aktivitas yang telah difasilitasi oleh Bank Indonesia Kota Kediri dalam bentuk pelatihan maupun bantuan sarana.

Hal tersebut dapat dilihat adanya keinginan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dirinya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Bank Indonesia Kota Kediri. Misalnya seperti pelatihan

pembukuan dan *entrepreneuership* ini masyarakat diharuskan untuk mengikuti, bahkan untuk semua pelatihan masyarakat sudah diwajibkan mengikuti kegiatan. Sebagaimana dikemukakan oleh Siti, salah seorang peserta pelatihan pembukuan dan *entrepreneuership* kampung industri tenun ikat, sebagai berikut:

“...tujuan adanya pelatihan pembukuan dan *entrepreneuership* ini kalau bagi saya ya *Mas*, menanggapi dengan baik bahwa memang diperlukan pelatihan pembukuan dan *entrepreneuership*. Gunanya untuk apa, ya agar bisa terarah. Guna pembukuan ini kan agar kita bisa mencatat sesuatu yang masuk dan yang keluar mengenai usaha kita ini. selain itu juga diajarkan cara berbisnis dengan baik, sehingga saya khususnya *Mas* bisa mencatat kekurangan dan kelebihan dalam usaha saya ini, sesuatu yang diperlukan dan mengenai pelaporan juga kepada Bank Indonesia dan bisa melakukan bisnis dengan baik. (Wawancara pada tanggal 30 September 2016 pukul 10:13 di Rumah Ibu Siti Ruqayah Bandar Kidul)

Lebih lanjut Eko mengemukakan bahwa:

“...ya karena pembukuan merupakan hal yang penting dalam hal produksi dan penjualan, maka kampung tenun ikat Bandar Kidul diikutsertakan dalam pelatihan ini dengan harapan adanya peningkatan kemampuan dalam hal mengolah pemasukan dan pengeluaran dalam hal usahanya. Alhamdulillah setelah mengikuti pelatihan pembukuan dan *entrepreneuership* ini, kemampuan masyarakat dalam mengelola usahanya semakin terarah *Mas*, selain itu juga ada pelaporan kepada pihak Bank Indonesia guna untuk mengetahui produk yang terjual dan kekurangan yang kami butuhkan dan yang lainnya” (Wawancara pada tanggal 29 September 2016 pukul 13:35 di Rumah Galeri Bapak Eko Hariyanto selaku Ketua Kelompok industri tenun ikat Bandar Kidul)

Seperti yang telah dikemukakan oleh Eko, setelah diadakannya pelatihan pembukuan dan *entrepreneuership* bagi masyarakat kampung industri tenun ikat Bandar Kidul, kemampuan pembukuan dan *entrepreneuership* masyarakat perajin tenun ikat Bandar Kidul pun telah meningkat dan hasilnya telah dirasakan oleh masyarakat kampung industri tenun ikat Bandar Kidul itu sendiri.

5. Kemampuan untuk mengatasi hambatan dalam usaha

Permasalahan dan hambatan dalam berusaha sudah pasti dihadapi oleh pelaku usaha, termasuk juga bagi pelaku usaha di lingkungan kampung industri tenun ikat Bandar Kidul. Namun demikian para pendamping usaha kampung industri tenun ikat Bandar Kidul yang disediakan oleh Bank Indonesia Kota Kediri telah menanamkan kesadaran kolektif masyarakat termasuk dalam penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam usaha. Hal ini dibuktikan dengan adanya rapat yang rutin dilakukan oleh masyarakat kampung industri tenun ikat Bandar Kidul. Rapat tersebut dilakukan untuk menginventarisir persoalan-persoalan yang muncul dan mencari solusi untuk pemecahan yang tepat. Rapat tersebut dipandu oleh tenaga pendamping yang telah disediakan Bank Indonesia Kediri. Sebagaimana seperti yang dikemukakan oleh Siti, sebagai berikut:

“...kita selalu diajak untuk mengadakan rapat *Mas*, dalam rapat itu kita diminta untuk mengemukakan hambatan-hambatan yang dihadapi dalam usaha masing-masing anggota. Lalu dibahas penyelesaiannya. Jadi ya enak *Mas* kita bisa saling mendukung dalam menjalankan usaha ini” (Wawancara pada tanggal 30 September 2016 pukul 11:24 di Rumah Ibu Siti Ruqayah Bandar Kidul)

Rapat rutin bulanan Kampung industri tenun ikat Bandar Kediri sangat penting karena dibutuhkan dalam mengetahui apa saja permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat perajin tenun Bandar Kidul dan bagaimana pemecahannya. Selain itu, dalam rapat bulanan juga dapat menumbuhkan solidaritas dalam kelompok untuk lebih mensukseskan usaha yang ditekuni.

6. Meningkatkan solidaritas diantara kelompok tenun

Rapat rutin yang diselenggarakan dapat menghasilkan semangat masyarakat untuk dapat menyelesaikan permasalahan dan hambatan secara

bersama-sama. Masyarakat perajin tenun ikat bahu membahu dalam membahas dan mencari jalan keluar untuk hambatan yang dihadapi. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil observasi yang dilakukan penulis pada saat rapat berlangsung. Suasana tampak akrab dalam membahas permasalahan dan hambatan setiap anggota kelompok untuk mencari jalan keluarnya. Seperti ada salah satu anggota yang sangat ingin bisa melakukan pembukuan dengan baik. Maka diantara peserta mengusulkan untuk belajar bersama di koperasi tenun ikat. Erwin, salah satu seorang anggota perajin tenun ikat yang mengikuti rapat tersebut mengemukakan bahwa:

“...saya tidak menyangka ada solusi dari anggota yang lain, sebab memang saya kurang begitu paham dengan hal pembukuan *Mas*, ya meski sudah ada pelatihan juga dari Bank Indonesia. Ya beruntung anggota yang lain mau membantu dengan belajar pembukuan bersama di koperasi tenun ikat. Dengan belajar bersama tersebut saya kini dapat melakukan pembukuan. (Wawancara pada tanggal 5 Oktober 2016 pukul 10:00 di Koperasi Tenun Ikat Bandar Kidul)

Dengan demikian apa saja permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing anggota kelompok tenun ikat hal tersebut dapat menimbulkan kesadaran masyarakat untuk dapat memecahkan masalah secara bersama-sama secara kolektif melalui rapat-rapat yang diselenggarakan.

b. Meningkatkan tenaga kerja yang diserap dalam pengembangan UMKM

Salah satu upaya untuk memperluas atau meningkatkan daya serap tenaga kerja adalah dengan cara memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat kampung industri tenun ikat Bandar Kidul. Semakin tinggi tingkat perkembangan masyarakat semakin tinggi daya serap tenaga kerja dalam

pengembangan UMKM di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul. Hal tersebut dapat dilihat dari masyarakat-masyarakat Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul yang telah memiliki beberapa tenaga kerja. Seperti yang dikutip dalam wawancara dengan Eko, sebagai berikut:

“...setelah ada pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Bank Indonesia, dengan otomatis kemampuan masyarakat Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul meningkat dan menjadi lebih mahir, jadi mereka bisa memperkerjakan dan mengajarkan tenaga kerja yang membantu mereka untuk melakukan jasa penenunan” (Wawancara pada tanggal 29 September 2016 pukul 13:35 di Rumah Galeri Aam Putra Bapak Eko Hariyanto selaku ketua kelompok kampung industri tenun ikat Bandar Kidul)

Dari 10 (sepuluh) anggota kampung industri tenun ikat Bandar Kidul yang telah memiliki keterampilan menenun telah melaksanakan usaha tenun secara mandiri. Selain itu, mereka juga telah memperkerjakan masyarakat yang lain, baik dari lingkungan sekitar Bandar Kidul maupun dari luar lingkungan Bandar Kidul untuk mendukung usaha tenunnya. Dari data yang ada, adanya 10 (sepuluh) anggota masyarakat yang telah melakukan usaha tenun mampu menyerap 39 (tiga puluh sembilan) orang tenaga kerja. Seperti yang dikutip dalam wawancara dengan Eko, sebagai berikut:

“...disini anggota Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul memiliki tenaga kerja yang bervariasi, *Mas*. Ya kalau saya sendiri kan baru *Mas*, jadi saya baru punya 15 (lima belas) karyawan. Kalau yang lainnya ada yang lebih dari saya dan bahkan ada yang tidak sampai 15 (lima belas) karyawan *Mas*. Penyerapan karyawan ini diambil dari masyarakat lingkungan sekitar Bandar Kidul dan luar daerah *Mas*. Ya karena tidak semua bisa menenun dengan baik, yang kita butuhkan yang bisa ketrampilan tenun *Mas*, tidak asal mengambil atau menerima karyawan, mereka harus punya dasar keahlian dalam menenun, ya kalau nggak punya keahlian ya sama saja, harus mengajari dari awal dan itu akan lama” (Wawancara pada tanggal 29 September 2016 pukul 13:35 di Rumah Galeri Aam Putra Bapak Eko Hariyanto Bandar Kidul)

Berikut merupakan tabel penyerapan tenaga kerja di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul, yaitu:

Tabel 4.2 Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Kampung Industri Tenun Ikat Bandar Kidul

No.	Nama Pemilik	Nama Usaha	Tenaga Kerja			
			2015		2016	
			L	P	L	P
1.	Eko Hariyanto	Aam Putra	1	1	1	
2.	Siti Ruqayah	Medali Mas	1	1		2
3.	Khaerul Anam	Kodok Ngorek	1		1	1
4.	H. Munta'in	Kurniawan	1	2	1	
5.	Imam Safi'i	Sempurna		1	1	1
6.	Erwin Wahyu	Sempurna	2	1	2	2
7.	Jamran	Sempurna		2	1	1
8.	Shulkan Arif	Kodok Ngorek	1	1	2	
9.	Sudarman	Sinar Barokah	1		1	1
10.	Sholeh Hudin	Kodok Ngorek	2			2
Jumlah			10	9	10	10

Sumber: Olahan Penulis (Oktober 2016)

Penyerapan tenaga kerja di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul telah terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa

masyarakat kampung industri tenun ikat Bandar Kidul Kota Kediri yang telah terlatih menjadi lebih produktif dari sisi penyerapan tenaga kerja.

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan pengembangan UMKM di Kampung Industri Tenun Ikat Bandar Kidul melalui *Corporate Social Responsibility Bank Indonesia* Kota Kediri.

a. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* dalam aspek ekonomi

Pengembangan UMKM merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam rangka memajukan, memperbaiki, dan meningkatkan sesuatu yang sudah ada secara teratur dan bertahap menjadi sesuatu yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Oleh karena itu diperlukan beberapa aspek dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah menurut Kartasmita (1996: 5) meliputi:

- 1) Peningkatan akses kepada aset produktif, terutama modal, disamping teknologi, manajemen, dan segi lainnya.
- 2) Peningkatan akses pasar, yang meliputi suatu *spectrum* kegiatan yang luas, mulai dari pencadangan usaha hingga informasi pasar, bantuan produksi, serta sarana dan prasarana pemasaran. Khususnya bagi usaha kecil di pedesaan, serta sarana dan prasarana mendasar akan sangat membantu adalah sarana perhubungan.
- 3) Pelatihan-pelatihan mengenai pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk berusaha teramat penting. Namun, bersamaan juga perlu ditanamkan semangat jiwa wirausaha.

- 4) Kelembagaan ekonomi dalam arti luas adalah pasar. Maka memperkuat pasar adalah hal yang sangat penting, hal tersebut harus disertai dengan pengendalian agar proses berjalannya pasar tidak keluar dari apa yang diinginkan yang nantinya justru mengakibatkan kesenjangan.
- 5) Kemitaraan usaha merupakan jalur yang penting dan strategis dan telah terbukti berhasil bagi pengembangan usaha ekonomi rakyat.

Proses pengembangan UMKM di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul oleh Bank Indonesia Kota Kediri telah dilakukan dengan beberapa aspek, seperti peningkatan akses pada aset produktif yakni Bank Indonesia Kota Kediri sebagai pendukung dan pemberi bantuan pada masyarakat perajin tenun ikat telah memberikan modal yang utama, yaitu mesin tenun ikat atau Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) sebanyak 21 (dua puluh satu) mesin ATBM dan benang tenun. Pelaksanaan yang lain dilakukan dengan memberikan informasi pasar kepada masyarakat, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya produksi dan penjualan keluar daerah dan keluar negeri, seperti Tulung Agung, Surabaya, Jakarta, Singapore, Turki, dan lain sebagainya, Bank Indonesia Kota Kediri juga membantu memasarkan produk tenun ikat Bandar Kidul Kota Kediri dengan seluas-luasnya, sehingga produk tenun ikat khas Kota Kediri semakin dikenal. Penguatan kapasitas masyarakat dari sisi SDM yaitu dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan mengenai pengetahuan dan ketrampilan dalam berwirausaha, pelatihan tersebut adalah (1) pelatihan desain model; (2) pelatihan pewarnaan benang; (3) pelatihan pemasaran; (4) pelatihan pembukuan dan *entreprenuership*. Strategi Bank Indonesia dalam menghadapi mekanisme pasar

yang semakin terbuka dan kompetitif adalah dengan memberikan informasi yang cepat kepada pelaku usaha (UMKM). Informasi tentang pasar produksi sangat diperlukan untuk memperluas jaringan pemasaran produk yang dihasilkan oleh UMKM, misalnya (1) jenis barang atau produk apa yang dibutuhkan oleh konsumen di daerah tertentu; (2) bagaimana daya beli masyarakat terhadap produk tersebut; (3) berapa harga pasar yang berlaku; (4) selera konsumen pada pasar lokal, regional, maupun internasional. Selain itu juga diperlukan kemitraan guna untuk mendukung dan mendorong UMKM lebih maju, seperti yang dilakukan Bank Indonesia Kota Kediri kepada masyarakat perajin tenun ikat Bandar Kidul, yaitu dengan pemberian CSR kepada masyarakat perajin tenun ikat sebagai bentuk kepedulian Bank Indonesia kepada masyarakat berpotensi.

Dalam pembinaan terhadap UMKM diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan UMKM sehingga semakin memperkokoh ketahanan prekonomian dalam era globalisasi dan perdagangan bebas. Afifah (2009) mengemukakan bahwa ada dua langkah strategis yang bisa diusulkan untuk pengembangan UMKM, yaitu *demand pull strategy* dan *supply push strategy* mencakup strategi perkuatan sisi permintaan, yang bisa dilakukan dengan perbaikan iklim bisnis, fasilitasi mendapatkan HAKI (paten), fasilitasi pemasaran domestik dan luar negeri, dan menyediakan peluang pasar. Langkah strategi lainnya adalah *supply push strategy* yang mencakup strategi pendorong sisi penawaran, bantuan teknologi/mesin/alat, dan peningkatan kemampuan SDM.

Serupa dengan pengembangan UMKM di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul. Pada tahap perbaikan iklim bisnis yang memungkinkan masyarakat

untuk berkembang, hal ini dapat dilihat dari adanya kemauan masyarakat perajin tenun ikat Bandar Kidul untuk menerima perubahan. Hal ini dibuktikan dengan terlaksananya program pengembangan UMKM oleh Bank Indonesia di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul Kota Kediri, pelaku usaha tenun ikat menerima dan mengikuti pelaksanaan Program Sosial Bank Indonesia dengan baik. Pada tahapan pelaksanaan ini peran Bank Indonesia sebagai lembaga atau institusi yang memiliki kewenangan khusus dan mengatur segala bank yang ada di Indonesia sepatutnya melaksanakan *Corporate Social Responsibility* seperti yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) UU No. 3 tahun 2004. Dengan berbagai pelatihan dan pembinaan dalam program pengembangan UMKM di kampung industri tenun ikat Bandar Kidul ini akan membantu pelaku usaha untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan ketrampilan guna untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, perubahan iklim bisnis harus terjadi guna untuk meningkatkan ekonomi para pelaku usaha tenun ikat dan mengembangkan usahanya agar lebih besar. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Joko Susilo dari hasil wawancara bahwa Bank Indonesia mendukung dan mendorong pengembangan UMKM dengan melakukan pelatihan, pendampingan secara teratur, dan tahap-tahap yang lain, yang dapat membantu meningkatkan usaha tenun ikat. Hal ini juga di dukung dengan keadaan di lapangan, hasil penelitian di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul adalah bahwa terejadi peningkatan produksi dan bahkan dalam pemasarannya pun kini sudah sampai keluar kota bahkan keluar negeri seperti: Tulung Agung, Blitar, Surabaya, Jakarta, Kalimantan, Singapore, dan Turki. Dengan demikian terjadi banyaknya

pemesanan dari dalam kota maupun luar kota, sehingga pendapatan ekonomi pun ikut meningkat.

Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri dalam mendukung dan mengembangkan tenun ikat Kota Kediri, pada saat ini telah dikeluarkannya Surat Keputusan Pemerintah Kota Kediri pada tanggal 27 Maret 2015 tentang kampung unggulan tepatnya di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul. Membahas kepemilikan atau hak paten dianggap mendesak bagi pengusaha tenun ikat Bandar Kidul Kota Kediri agar mampu menembus pasar ekspor tanpa khawatir dijiplak oleh negara lain. Sesuai dengan realitanya mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Industri tenun ikat Bandar Kidul adalah telah diajukan ke Ditjen Hak atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Dan kini hak cipta, paten, merk, dan desain industri perajin tenun ikat Bandar Kidul sudah terdaftar dan memiliki HAKI (paten). Sehingga para pengusaha tenun ikat tidak khawatir lagi dengan penjiplakan oleh negara lain karena sudah mendapatkan hak cipta dari Kementerian Hukum dan HAM Indonesia. Selain itu, fasilitasi pemasaran, dalam tahap memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat perajin tenun ikat Bandar Kidul untuk memasarkan produknya. Dengan adanya pelatihan pemasaran yang diberikan oleh Bank Indonesia Kota Kediri diharapkan masyarakat dapat menerapkan pelatihan tersebut di dalam usahanya sehingga mereka bisa memasarkan produknya dengan lebih luas. Dengan adanya pameran-pameran yang diadakan oleh pemerintah kota Kediri dan Bank Indonesia merupakan salah satu cara juga untuk mengenalkan produknya di masyarakat luas. Selain itu juga melalui *website*, yang telah diberikan oleh PT.

Telkom Indonesia Kota Kediri sebagai pendukung dalam hal pemasaran produk tenun ikat Bandar Kidul melalui internet, sehingga tidak hanya masyarakat Kediri saja yang tahu tentang produk tenun ikat Bandar Kidul, namun juga masyarakat secara luas.

Pada umumnya UMKM berbasis pada ekonomi lokal dan kandungan impor yang rendah, serta hasilnya mampu untuk diekspor karena keunikannya, maka keberhasilan dalam pembinaan dan pengembangan UMKM dapat diyakini bahwa dapat memperkuat fondasi struktur dalam perekonomian nasional (Liana 2008: 104). Seperti yang sudah Bank Indonesia Kota Kediri lakukan yaitu memberikan bimbingan, pembinaan, dan macam-macam pelatihan, guna untuk menambah pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan masyarakat perajin tenun ikat Bandar Kidul agar dapat menghasilkan produk yang unik dan berkualitas serta dapat bersaing di pasar lokal, regional, dan mancanegara. Dengan berbagai pelatihan tersebut kini masyarakat perajin tenun ikat sudah bisa merasakan hasil yang semakin baik. Hal itu dibuktikan dengan meningkatnya perekonomian masyarakat perajin tenun ikat tersebut. Program CSR Bank Indonesia Kota Kediri dengan masa pemograman 3 tahun dan kini sudah berjalan 1,5 tahun, sedikit demi sedikit telah memberikan dampak yang positif yaitu dengan meningkatnya ekonomi masyarakat perajin tenun ikat yang dapat dibuktikan dengan jumlah produksi bertambah, penjualan meningkat, dan bertambahnya banyak pemesanan dari dalam kota maupun luar kota. Peran Bank Indonesia sangatlah penting dalam pengembangan sektor industri di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul, dengan bertambah majunya industri tersebut.

b. **Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan UMKM**

Pengembangan UMKM di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul Kota Kediri melibatkan 3 (tiga) aktor yang saling berkaitan. Aktor-aktor dalam pengembangan UMKM tersebut adalah Bank Indonesia, Pemerintah Kota Kediri, dan Masyarakat perajin tenun ikat Bandar Kidul. Ketiga pihak tersebut memiliki keterkaitan yang erat, setiap pihak memiliki peran masing-masing dan berbeda namun dengan tujuan yang sama, yaitu mengembangkan industri tenun ikat Bandar Kidul agar semakin maju. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Pasal 1 Ayat 10 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu:

“Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah”.

Berdasarkan penjelasan tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Undang-Undang No. 20 Pasal 1 Ayat 10 Tahun 2008 diatas maka dapat dijelaskan bahwa dalam penelitian pengembangan UMKM di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul merupakan upaya pembangunan yang melibatkan beberapa *stakeholders* yang terkait dan dilakukan secara sinergis guna untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dengan memberikan bimbingan, pendampingan, bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan potensi yang sudah ada sehingga dapat tercipta kemandirian usaha

dari masyarakat dengan berkembangnya usaha yang sudah ditekuni dan memiliki kemampuan untuk memenuhi serta memperbaiki kualitas hidup yang lebih baik.

Pelaksanaan tanggung jawab hukum terkait dengan pengembangan UMKM di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul oleh Bank Indonesia sebagai aktor yang memiliki peran penting dalam pengembangan UMKM tersebut. Bank Indonesia merupakan bank sentral yang bertujuan untuk mencapai dan memelihara nilai rupiah serta melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten dan transparan. Tujuan tersebut tertuang dalam pasal 7 UU No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Dalam pencapaian tujuannya sebagai bank sentral, Bank Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Sebagai penerapan GCG tersebut, Bank Indonesia melaksanakan CSR yang diberi nama Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) yang mencakup tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan masyarakat.

Sebagai aktor yang memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan UMKM di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul, Bank Indonesia telah melaksanakan programnya dengan baik. Seperti yang tertuang dalam tujuan Bank Indonesia pasal 7 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 yaitu Bank Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sebagai penerapannya Bank Indonesia melaksanakan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang mencakup tanggung jawab sosial dan masyarakat. Kemudian sesuai dengan undang-undang tersebut Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) yang diatur dalam Peraturan Dewan Gubernur BI no. 14/14/PDG/2012 tentang PSBI. Dalam laporan Bank

Indonesia (2014, 150) disampaikan bahwa program ini didasari pada kesadaran bahwa kebijakan bank sentral yang menitikberatkan pada upaya stabilitas ekonomi.

Serupa dengan yang telah dilakukan Bank Indoneisa Kota Kediri dalam mendukung dan mendorong industri tenun ikat di Bandar Kidul dengan memberikan bantuan atau program sosialnya. Seperti pelatihan, pendampingan, studi banding, pemberian modal yang berupa mesin tenun ikat (ATBM) dan benang. Hal tersebut dilakukan Bank Indonesia Kota Kediri agar masyarakat perajin dapat meningkatkan produksi dan penjualannya. Tidak hanya itu Bank Indonesia Kota Kediri juga membantu dalam hal pemasaran, hal ini dilakukan dengan promosi-promosi oleh Bank Indonesia Kota Kediri dan berbagai pameran-pameran yang diadakan baik di Kota Kediri maupun di luar kota agar semakin dikenal publik dan meningkatkan penjualan secara luas. Kesadaran dan kepedulian Bank Indonesia terhadap masyarakat didasarkan pada Undang-Undang No. 3 tahun 2004 dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Meskipun pada dasarnya Bank Indonesia bukan milik badan pemerintahan, dan juga bukan badan usaha, namun Bank Indonesia memiliki kesadaran atas keberadaannya ditengah-tengah masyarakat, maka dengan melakukan CSR akan membantu masyarakat yang berpotensi, seperti halnya masyarakat kampung industri tenun ikat Bandar Kidul untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan usahanya.

Sesuai dengan penelitian yang sudah peneliti lakukan, dan mendapatkan hasil dari penelitian tersebut. Peneliti menyatakan bahwa Bank Indonesia Kota

Kediri sudah melaksanakan CSR sesuai dengan hukum yang berlaku, baik hukum secara umum maupun hukum yang telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Berbagai peraturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan program pengembangan UMKM di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul menjadikan Bank Indonesia Kota Kediri patuh terhadap hukum.

Pemerintah Kota Kediri dan masyarakat dalam pengembangan UMKM di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul dalam hal tanggung jawab terhadap hukum yang berlaku. Sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Pemerintah Kota Kediri sudah membantu pengusaha tenun ikat Bandar Kidul dengan memberikan bantuan berupa pelatihan, pendampingan, pemasaran melalui pameran-pameran yang diadakan oleh Pemerintah Kota Kediri. Selain daripada itu Pemerintah Kota Kediri sudah sesuai dengan peraturan tentang UMKM, namun dalam pelaksanaan yang lebih khususnya belum dilakukan dengan optimal. Hal ini dibuktikan dengan wawancara yang telah dilakukan peneliti pada saat penelitian berlangsung, menanyakan tentang kesigapan Pemerintah Kota Kediri dalam memberikan bantuan dalam pembangunan ekonomi di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul.

Pemerintah Kota Kediri melalui dinas-dinas yang ada di Kota Kediri memberikan kemudahan dalam proses pengurusan legalitas produk. Legalitas produk tersebut berupa izin usaha industri, surat izin perdagangan, dan lain-lain. Selain itu Disperindag Kota Kediri juga menyiapkan tenaga pendamping guna untuk alat berkomunikasi dengan pemerintah secara langsung, serta

menyelenggarakan pameran dalam jangka waktu tertentu untuk membantu masyarakat perajin tenun ikat untuk memasarkan produknya.

Sesuai dengan pernyataan Ibu Joko Susilo selaku asisten kepala bagian UMKM kantor Bank Indonesia Kota Kediri dari hasil wawancara, beliau mengatakan bahwa pemerintah kota Kediri bersama dengan Bank Indonesia bergotong royong untuk mengembangkan UMKM tenun ikat tersebut, dengan diberikannya pelatihan dan pendampingan. Namun berbeda seperti yang dikemukakan oleh Bapak Erwin Wahyu dari hasil wawancara bahwa peran serta pemerintah Kota Kediri dalam mengembangkan UMKM tenun ikat di Bandar Kidul dirasanya kurang maksimal, beliau menambahkan bahwa masih banyak peran serta Bank Indonesia dalam memberikan bantuan dan programnya. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, peran serta aktor yang terlibat dalam pengembangan UMKM di Kampung industri tenun ikat ini memang lebih banyak dilakukan oleh Bank Indonesia Kota Kediri, dengan memberi bantuan fasilitas dan sarana yang mendukung pengembangan usaha tersebut.

Masyarakat sebagai aktor yang dikembang tumbuhkan oleh Bank Indonesia Kota Kediri dan Pemerintah Kota Kediri; sudah mengikuti alur peraturan yang berlaku, yaitu pelaku usaha sudah memiliki surat izin industri perdagangan, dan keperluan izin mengenai perdagangan sudah dikantongi oleh masyarakat perajin tenun ikat di Bandar Kidul. Lebih dari itu, masyarakat perajin tenun ikat Bandar Kidul dengan terbuka menerima program yang diberikan oleh Bank Indonesia Kota Kediri, dengan hal ini masyarakat mau untuk dikembangkan dan memiliki kesadaran untuk berkembang lebih baik.

Aktor-aktor yang terkait dalam pengembangan UMKM di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul sangat mempengaruhi bertumbuh dan kembangnya industri tenun ikat ini. Dalam pelaksanaannya aktor-aktor yang terkait sudah mematuhi hukum yang berlaku, sesuai dengan hukum pemerintah maupun hukum yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia sendiri. Sehingga pelaksanaan CSR terhadap pengembangan UMKM yang didukung penuh oleh Bank Indonesia Kota Kediri ini sudah bisa dikatakan patuh terhadap hukum yang berlaku.

c. **Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* kepada masyarakat dan sarana dalam pengembangan UMKM**

Sarana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997: 880) mengandung arti yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan; alat, media. Lebih lanjut Minarti (2011: 251) menjelaskan terkait dengan sarana pendidikan merupakan sebuah perlengkapan yang secara langsung dipergunakan untuk proses pendidikan, seperti; meja, kursi, kelas, dan media pengajaran lainnya. Sarana dalam pengembangan UMKM dapat dideskripsikan sebagai perlengkapan yang secara langsung digunakan dalam proses pengembangan.

Sarana dan fasilitas yang digunakan dalam proses pengembangan UMKM di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul oleh Bank Indonesia Kota Kediri seperti; pelatihan, pendampingan, studi banding, pameran, dan lain-lain dan sarana. Sarana yang dimaksud adalah berasal dari swadaya masyarakat sendiri dan

juga difasilitasi oleh Bank Indonesia Kota Kediri. Peningkatan produksi kerajinan tenun ikat Bandar Kidul memerlukan sarana yang memadai guna mendukung pelaksanaan pembuatan tenun ikat dalam jumlah yang banyak. Adapun sarana yang telah diberikan oleh Bank Indonesia Kota Kediri, antara lain:

- 1) Mesin Tenun (ATBM)
- 2) Benang

Sarana tersebut diberikan dengan maksud untuk meningkatkan produksi, mengingat bahwa terjadi banyaknya pemesanan yang masuk namun dengan jumlah mesin yang tidak memadai, para perajin tenun ikat kesulitan untuk memenuhi pesanan dengan cepat dan waktu yang tepat. Dengan pemberian mesin tenun kepada perajin tenun ikat yang ada di Bandar Kidul, ini akan membantu para perajin dalam memenuhi kebutuhan pemesanan yang semakin banyak dengan waktu yang tepat dan serta membantu perajin tenun ikat untuk dapat memproduksi kain tenun ikat dalam jumlah yang banyak. Selain itu, tanggung jawab terhadap masyarakat adalah pengusaha kain tenun ikat dapat membuka lapangan pekerjaan baru, bagi mereka (masyarakat) yang memiliki keahlian menenun dengan mesin tenun tradisional (ATBM). Dengan itu akan mengurangi masyarakat yang menganggur dan meningkatkan produktivitas masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ibu Merry Komala Dewi selaku Manajer Bank Indonesia Kota Kediri bahwa Bank Indonesia tidak hanya memberikan bantuan berupa pelatihan dan pembinaan, namun juga sarana guna untuk proses pelaksanaan pembuatan tenun ikat, yaitu; alat tenun bukan mesin

(ATBM) dan benang. Serupa dengan pernyataan dari Ibu Merry, berikut merupakan ungkapan dari Ibu Siti Ruqayah dari hasil wawancara yang mengatakan bahwa semua akan disediakan oleh Bank Indonesia sesuatu yang berkaitan dengan pengembangan dan peningkatan usaha, beliau menambahkan bahwa tidak hanya fasilitas dan sarana tersebut, sarana-sarana yang menunjang lainnya akan diberikan asalkan usaha tenun ikat tersebut aktif dan maju.

2. **Dampak Pengembangan UMKM di Kampung Industri Tenun Ikat Bandar Kidul melalui *Corporate Social Responsibility* Bank Indonesia Kota Kediri**

a. **Meningkatnya kesejahteraan ekonomi pelaku usaha dan masyarakat**

Pengembangan UMKM di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul ditujukan untuk menyelenggarakan pembangunan di sektor ekonomi dengan memanfaatkan potensi industri yaitu kerajinan tenun ikat yang dimiliki oleh suatu daerah. Pada hakikatnya pengembangan UMKM tenun ikat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara adil dan merata. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan melalui pengembangan UMKM di bidang industri tersebut.

Adanya program-program yang berkaitan dengan pengembangan UMKM tenun ikat dari Bank Indonesia Kota Kediri seperti pembinaan dan pelatihan, pemberian bantuan mesin tenun (ATBM) dan benang, pendampingan, studi banding ke Jogjakarta dan Garut Bandung, serta promosi berupa pameran-pameran yang diadakan baik oleh pemerintah kota Kediri maupun pameran yang

diselenggarakan Bank Indonesia Kota Kediri guna untuk memasarkan produk tenun ikat, hal ini disambut baik oleh pelaku usaha tenun ikat di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul guna untuk pengembangan usaha yang dijalankannya serta juga dapat menjadi upaya percepatan dalam meningkatkan perekonomian pada masyarakat perajin tenun ikat itu sendiri. Dalam hal ini, masyarakat perajin tenun ikat sebagai penerima program pengembangan UMKM merasa sangat terbantu dengan adanya program tersebut, mengingat masih banyaknya jumlah masyarakat miskin dan tidak memiliki kehidupan yang layak.

Dengan adanya program pengembangan UMKM oleh Bank Indonesia Kota Kediri diharapkan mampu menciptakan suatu kondisi yang mana masyarakat mampu secara mandiri di bidang perekonomian, seperti pemenuhan kebutuhan hidupnya secara merata. Seperti yang diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang menyatakan bahwa pengembangan dapat dilakukan dengan cara memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan, meningkatkan ketrampilan teknis dan manajerial, dan membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Adanya pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Bank Indonesia Kota Kediri akan memberikan dampak pada usaha tenun ikat di Bandar Kidul. Dengan demikian, dampak adalah suatu perubahan sebagai aktivitas dan aktivitas itu dapat dilakukan oleh manusia yang mengarah kepada perubahan dalam kehidupan manusia itu sendiri menurut Soemarwoto dalam Purwati (2012: 147). Berbagai macam dampak yang muncul akibat adanya penyelenggaraan pengembangan

UMKM. Dalam hal ini perubahan dapat bersifat positif maupun negatif. Namun, pada penelitian ini peneliti hanya ingin mengetahui dan menjelaskan tentang dampak positif yang terjadi akibat adanya pengembangan UMKM oleh Bank Indonesia Kota Kediri di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul. Salah satu dampak positif akibat pengembangan UMKM industri tenun ikat di Bandar Kidul adalah meningkatnya produksi dan penjualan sehingga mempengaruhi peningkatan pendapatan pelaku usaha.

Serupa dengan penelitian yang sudah peneliti lakukan di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul, menemukan berbagai dampak yang cukup baik bagi masyarakat perajin tenun ikat. Dari hasil wawancara dengan bapak Eko Hariyanto selaku ketua kelompok tenun ikat di Bandar Kidul mengaku bahwa setelah adanya pelatihan dan pemberian bantuan seperti mesin tenun ikat (ATBM) dan benang tenun, produksi usaha kain tenun ikat miliknya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Menurut beliau sebelum adanya pengembangan yang dilakukan oleh Bank Indonesia Kota Kediri, penjualan kain tenun mencapai 170 potong hingga 250 potong dengan minimal harga Rp 180.000 per potongnya maka hasil penjualan Rp 30.600.000 sampai Rp 45.000.000 per bulannya. Namun setelah adanya pengembangan UMKM yang dilakukan oleh Bank Indonesia Kota Kediri, produksi tersebut meningkat hingga mencapai 300 potong hingga 410 potong dengan harga minimal Rp 180.000 dengan nilai pendapatan mencapai Rp 54.000.000 hingga Rp. 73.800.000 dalam satu bulan. Semua peningkatan tergantung permintaan pasar, jadi tidak terpaku pada pendapatan tersebut.

Hasil wawancara lainnya dengan Ibu Siti Ruqayah selaku anggota senior di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul yang juga mengungkapkan hal yang senada dengan bapak Eko Hariyanto, yang mana terjadi peningkatan yang didapat dari usaha kain tenun ikat setelah mendapatkan program pengembangan UMKM dari Bank Indonesia Kota Kediri. Ibu Siti Ruqayah mengungkapkan bahwa pendapatan dari usaha tenun ikatnya tidak kalah besarnya dengan pegawai negeri sipil eselon II. Ibu Siti Ruqayah memiliki 65 mesin tenun ikat dan memiliki 80 orang pegawai. Dalam satu hari usaha tenun ikat ibu Siti dapat menghasilkan 65 potong kain tenun ikat, maka dalam satu bulan bisa memproduksi 1.800-an potong kain tenun ikat. Dengan demikian bisa dihitung berapa banyak pendapatan Ibu Siti dari hasil usaha tenun ikat selama satu bulan jika harga kain tenun ikat Rp 180.000 (harga terendah) jika Ibu Siti bisa menjual 500 potong hingga 1500 potong, maka pendapatan adalah Rp 90.000.000 hingga Rp 270.000.000. Berdasarkan dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan, dapat dikatakan bahwa setelah adanya pengembangan yang dilakukan oleh Bank Indonesia Kota Kediri secara teratur dan bertahap mampu meningkatkan pendapatan pelaku usaha UMKM.

Adanya peningkatan pendapatan tersebut telah sesuai dengan tujuan pengembangan UMKM itu sendiri. Menurut Pamudji (1985: 7) pengembangan yaitu suatu pembangunan yaitu untuk merubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi. Demikian juga mengandung makna sebagai pembaharuan yaitu melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu untuk menjadi lebih sesuai dan cocok dengan kebutuhan, menjadi lebih baik dan bermanfaat.

Berdasarkan dengan kajian teori tersebut dampak dari pengembangan UMKM di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul sudah dirasa cukup baik karena mampu meningkatkan kesejahteraan ekonmi, salah satu indikatornya dapat dilihat melalui meningkatnya pendapatan masyarakat perajin tenun ikat, hal tersebut tentunya bermanfaat dan mampu menjadikan perekonomian masyarakat perajin tenun ikat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, dampak dari pengembangan UMKM tersebut juga telah sesuai dengan capaian rencana Bank Indonesia Kota Kediri dalam meningkatkan pendapatan ekonomi pelaku usaha tenun ikat di Bandar Kidul. Program yang telah dilaksanakan oleh Bank Indonesia Kota Kediri selama 1,5 tahun ini sudah memberikan dampak yang cukup baik, dan masih ada waktu yang tersisa 1,5 tahun lagi dalam pengembangan UMKM oleh Bank Indonesia Kota Kediri, karena memang program tersebut dijalankan selama 3 tahun masa kerja.

b. **Meningkatnya tenaga kerja yang diserap dalam pengembangan UMKM**

Pengembangan UMKM dilandasi oleh tiga hal, seperti yang dikemukakan oleh Kuncoro (2009: 326) yaitu (1) UMKM intensif dalam menggunakan sumberdaya alam lokal, menyerap banyak tenaga kerja, penggunaan jumlah kemiskinan, pemerataan dalam distribusi pendapatan, dan pengembangan ekonomi di pedesaan; (2) merupakan penyumbang terbesar dalam sektor non migas terutama sektor industri pengolahan, garmen, tekstil, kerajinan lainnya; (3) adanya urgensi untuk strukur ekonomi yang berbentuk piramida yang

menunjukkan adanya ketimpangan yang lebar antara pelaku usaha kecil dan besar dalam ekonomika Indonesia.

Dalam hal ini pelaksanaan pengembangan UMKM di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul tidak hanya berdampak pada peningkatan tetapi juga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada disekitar usaha tersebut. Banyaknya pengusaha atau perajin tenun ikat yang berhasil dalam mengembangkan usahanya yang juga dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomiannya, sehingga dengan semakin berkembangnya usaha tersebut, pengusaha tenun ikat membutuhkan pekerja baru. Dengan itu, para pengusaha bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang memiliki keahlian menenun. Sehingga dengan adanya lapangan pekerjaan yang tersedia, hal ini juga akan mampu mengurangi jumlah kemiskinan yang ada di Bandar Kidul dan sekitarnya. Selain itu, akan terjadi pemerataan pendapatan dan pengembangan ekonomi di pedesaan.

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Eko Hariyanto selaku ketua kelompok tenun ikat di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul mengatakan bahwa terjadi penyerapan tenaga kerja dalam 1,5 tahun terakhir pada masa program 3 tahun oleh Bank Indonesia Kota Kediri, yang dimulai pada maret 2015 dan berakhir pada maret 2018. Bapak Eko mengatakan bahwa beliau baru saja membuka usahanya tersebut yaitu pada awal 2015, selang beberapa minggu Kampung industri tenun ikat dipilih Bank Indonesia Kota Kediri untuk menerima pengembangan UMKM. Dengan berbagai pelatihan dan pembinaan oleh Bank Indonesia Kota Kediri, pengusaha tenun ikat semakin hari semakin berkembang

dan membutuhkan pegawai baru untuk membantu produksi kain tenun ikat. penyerapan tenaga kerja tersebut juga karena perajin tenun ikat mendapatkan bantuan mesin tenun (ATBM) dari Bank Indonesia sebanyak 21 mesin yang kemudian dibagikan merata kepada 10 orang perajin yang aktif. Dengan pengembangan UMKM oleh Bank Indonesia Kota Kediri ini, beliau mengatakan bahwa sudah menerima 3 orang pekerja baru, yang diantaranya 2 tenaga kerja laki-laki dan 1 tenaga kerja perempuan.

Pernyataan tersebut juga didukung oleh bapak Djoko Susilo selaku asisten kepala UMKM di kantor perwakilan Bank Indonesia Kota Kediri pada saat wawancara pada tanggal 1 Oktober 2016, seperti yang diungkapkan bapak Eko mengenai program pengembangan UMKM di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul, hal tersebut dibenarkan oleh bapak Joko Susilo, beliau mengatakan bahwa Bank Indonesia mendukung industri tenun ikat guna untuk mengembangkan potensi dan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat perajin tenun ikat. bentuk dukungan Bank Indonesia terhadap pengembangan komoditas tenun ikat dilakukan dengan memberikan bantuan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) yang berupa alat tenun bukan mesin (ATBM) sebanyak 21 dan diberikan secara bertahap. Bank Indonesia bersama dengan pemerintah kota Kediri diharapkan dapat mendorong terciptanya produk tenun ikat Kediri yang lebih berkualitas dan inovatif sehingga mampu bersaing dan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan perajin, penyerapan tenaga kerja, dan dapat mendorong perkembangan perekonomian daerah.

Selain mampu meningkatkan pendapatan ekonomi pelaku usaha tenun ikat, pengembangan UMKM tenun ikat Bandar Kidul juga mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 39 orang tenaga kerja baru setelah Bank Indonesia Kota Kediri memberikan bantu mesin tenun (ATBM) kepada masyarakat perajin tenun ikat di Bandar Kidul. Seperti yang diketahui bahwa kelompok pengusaha tenun ikat setidaknya kurang dan lebih memiliki 139 mesin tenun yang tersebar di sejumlah perajin tenun ikat yang berpusat di Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto. Jumlah tenaga kerja beragam, ada sedikit, ada yang mencapai puluhan. Dari usaha kerajinan tersebut, diketahui bahwa jumlah tenaga kerja yang sudah diserap adalah 210 tenaga kerja. Dengan demikian tentunya juga berkontribusi untuk mengurangi jumlah pengangguran yang ada di wilayah Kediri, karena pada dasarnya tenaga kerja yang diserap tidak hanya dari Kecamatan Mojoroto melainkan juga dari kecamatan yang ada di Kediri. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, pelaku usaha yang ada di Kampung industri tenun ikat memiliki jumlah mesin yang berbeda-beda, ada yang masih 15 ATBM dan bahkan sudah memiliki 65 ATBM dengan puluhan pekerja, hal ini bisa bertambah apabila pelaku usaha melakukan deversifikasi usaha atau penganekaragaman usaha.

Deversifikasi usaha yang dilakukan adalah berupa pengolahan hasil produk tenun ikat, seperti membuat handycraft atau kerajinan tangan; baju, sepatu, jaket, tas, dan lain sebagainya. Hal ini juga dapat mengembangkan kemampuan masyarakat dengan menyerap tenaga kerja yang ada di sekitar lingkungan usaha tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Eko Hariyanto yang menyatakan bahwa dengan melakukan penganekaragaman usaha

berupa pengolahan hasil kerajinan tangan mampu mengembangkan ketrampilan masyarakat, baik yang masih muda maupun ibu atau bapak yang ada disekitar lingkungan usaha. untuk saat ini bapak Eko setidaknya telah mempekerjakan sekitar 20 orang untuk membantu membuat kain tenun ikat dan kerajinan tangan lain.

Gie Kian (2003) menjelaskan bahwa pengembangan UMKM diarahkan pada upaya meningkatkan produktivitas dan daya saingnya, serta secara sistematis diarahkan pada upaya menumbuhkan wirausahawan baru disektor-sektor yang memiliki produktivitas tinggi yang berbasis pengetahuan, teknologi, dan sumberdaya lokal. Berdasarkan kajian teori tersebut maka dampak dari adanya pengembangan UMKM tenun ikat di Bandar Kidul mampu meningkatkan pendapatan ekonomi pelaku usaha serta menyerap tenaga kerja baru, yang pada akhirnya juga berdampak pada pengurangan pengangguran di wilayah Kota Kediri dan sekitarnya. Berdasarkan peran yang telah dilakukan Bank Indonesia Kota Kediri dan Pemerintah Kota Kediri untuk dapat mengembangkan UMKM agar mampu bertahan bahkan tumbuh menjadi usaha berskala besar sehingga manfaat yang didapatkan oleh masyarakat jauh lebih luas lagi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas dan sesuai dengan fokus penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengembangan UMKM di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul melalui *Corporate Social Responsibility* Bank Indonesia Kota Kota Kediri meliputi:
 - a. Pelaksanaan pengembangan UMKM dalam aspek ekonomi di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul oleh *Corporate Social Responsibility* Bank Indonesia Kota Kediri merupakan sebuah bentuk kepedulian untuk berkontribusi secara langsung dalam membantu meningkatkan ekonomi masyarakat perajin tenun ikat dan kelompok masyarakat yang lainnya. Peran dan tugas Bank Indonesia Kota Kediri dalam CSR pengembangan UMKM tenun ikat memberikan pelatihan, pendampingan, studi banding, dan pembinaan yang lainnya guna memperkuat pengetahuan dan ketrampilan. Dari berbagai pelatihan tersebut, memberikan dampak yang positif bagi masyarakat perajin tenun ikat di Bandar Kidul dalam hal peningkatan produksi, pemasaran yang luas, peningkatan pendapatan, penyerapan tenaga kerja. Ini merupakan hasil upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia Kota Kediri, Pemerintah Kota Kediri serta masyarakat perajin tenun ikat di Bandar Kidul yang

bekerja sama dalam meningkatkan dan mengembangkan usaha. Pencapaian tujuan Bank Indonesia Kota Kediri dalam membantu masyarakat perajin tenun ikat meningkatkan ekonomi keluarga dan masyarakat di Bandar Kidul bisa dikatakan berhasil, dapat dibuktikan dengan peningkatan omset setiap bulannya.

b. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan UMKM, meliputi:

1. Bank Indonesia

tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* pengembangan UMKM di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul oleh Bank Indonesia Kota Kediri sudah patuh terhadap hukum yang berlaku, yaitu sesuai dengan hukum tentang UMKM dan sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 14/14/PDG/2012 tentang Program Sosial Bank Indonesia. Dalam hal pemberian kredit dan pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan UMKM diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/22/PBI/2012. Sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan, bahwa Bank Indonesia Kota Kediri sudah melaksanakan CSR sesuai dengan peraturan, meskipun hal tersebut diluar tugas dan tanggung jawabnya.

2. Pemerintah Kota Kediri

Dalam mendukung dan mengembangkan UMKM tenun ikat di Bandar Kidul guna meningkatkan perekonomian lokal. Sesuai dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM dan Surat Keputusan Walikota Kediri pada tanggal 27 Maret 2015 memberikan bantuan berupa pelatihan, pendampingan, studi banding, dan pemasaran. DISPERINDAG juga memberikan akses yaitu kemudahan dalam mengurus legalitas produk dan sistem manajemen informasi pelayanan perizinan.

3. Masyarakat

Tanggung jawab masyarakat perajin tenun ikat terhadap aktor-aktor yang berpartisipasi mendukung dalam proses pengembangan UMKM; yang pertama: tanggung jawab masyarakat perajin tenun ikat terhadap program yang diberikan oleh Bank Indonesia Kota Kediri dan Pemerintah Kota Kediri atas sarana dan pelatihan dalam proses pelaksanaan program pengembangan UMKM yang sedang berjalan. Kedua: tanggung jawab terhadap masyarakat akademisi, bahwa dengan adanya Kampung industri tenun ikat di Bandar Kidul secara tidak langsung akan menjadi pengenalan publik dan merupakan pembuka untuk mencari pekerjaan baru dalam bidang tenun.

- c. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* masyarakat dan sarana dalam pengembangan UMKM oleh Bank Indonesia Kota Kediri, peran masyarakat perajin tenun ikat adalah ikut serta dan berpartisipasi dalam pelaksanaan CSR Bank Indonesia. Peran masyarakat perajin tenun ikat sangat penting karena melalui mereka pencapaian tujuan dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan hidup masyarakat dapat tercapai. Masyarakat perajin tenun ikat bertanggung jawab atas program, sarana, dan fasilitas yang telah diberikan dengan terus mengembangkan usahanya. sarana yang sudah diberikan oleh Bank Indonesia Kota Kediri adalah mesin tenun dan benang yang dibagikan kepada semua anggota di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul.
2. Dampak pengembangan UMKM di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul melalui *Corporate Social Responsibility* Bank Indonesia Kota Kediri, meliputi:
 - a. Dalam kaitan ini, upaya yang dilakukan dalam pengembangan UMKM oleh Bank Indonesia Kota Kediri dan bekerjasama dengan Pemerintah Kota Kediri adalah meningkatkan ekonomi pelaku usaha dengan memberikan pelatihan, pendampingan, studi banding, pameran, dan pembinaan. Dampak dari pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Bank Indonesia terhadap pengembangan UMKM di Kampung industri tenun ikat adalah (1) peningkatan omzet masyarakat, (2) meningkatnya kesempatan

untuk memperoleh akses dalam hal pemasaran, (3) Pemenuhan kebutuhan pokok, (4) Meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah, (5) kemampuan untuk mengatasi hambatan dalam usaha, (6) meningkatkan solidaritas diantara kelompok tenun.

- b. Meningkatnya tenaga kerja yang diserap dalam pengembangan UMKM di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul dapat dilihat dari tiga sisi, yaotu Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan taraf hidup, dan Penyerapan tenaga kerja. Semua hal tersebut sling berkaitan dan memberikan dampak dalam perkembangan UMKM. tenaga kerja yang diserap setelah pelaksanaan program pengembangan UMKM oleh Bnak Indonesia kOta Kediri di Kampung industri tenun ikat pada tahun 2015 sejumlah 10 orang tenaga kerja laki-laki dan 9 orang tenaga kerja perempuan, sedangkan pada tahun 2016 sampai dengan pertengahan tahun tenaga kerja yang diserap sejumlah 10 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Maka terjadi peningkatan dalam hal penyerapan tenaga kerja atau pegawai.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan yang ditulis peneliti dalam kesimpulan diatas, maka penulis akan memberikan beberapa saran atas penilitian yang sudah dilaksanakan, sebagai berikut:

- 1) Dalam pelaksanaan pengembangan UMKM oleh Bank Indonesia Kota Kediri kepada masyarakat Kampung industri tenun ikat di Bandar Kidul,

perlu dilakukan pelatihan-pelatihan yang lain yang bisa meningkatkan kualitas kain tenun yang lebih bagus lagi dan berbeda dengan kain tenun yang lainnya, lebih berinovasi dengan desain model yang lebih baru atau modern serta dengan menambahkan aksesoris pada kain tenun. Adapun perlu adanya keterlibatan yang lebih lagi dari Pemerintah Kota Kediri agar terjadi sinergitas yang lebih baik lagi antar aktor-aktor dalam pengembangan UMKM. Hal ini dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri dengan lebih memperhatikan pengusaha kecil di Kota Kediri, karena pada dasarnya jika pengusaha kecil didukung maka akan berkembang dan memberikan dampak yang baik bagi lingkungan sekitar. Karena pada hakikatnya pengusaha UMKM adalah pendukung ekonomi negara.

- 2) Perlunya ada indikator yang lain dalam menetapkan sebuah derajat dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul. Misalnya adanya sertifikasi atas kualitas kerajinan tenun ikat untuk para perajin tenun ikat agar tenun ikat di Bandar Kidul ini memiliki tempat yang sama dengan kain tenun yang sudah memiliki brand atau merk yang besar.
- 3) Dilakukan debut pemasaran yang lebih banyak lagi, baik oleh Pemerintah Kota Kediri maupun Bank Indonesia Kota Kediri selaku pemberi bantuan sosial atau pemberi program pengembangan UMKM di Kampung industri tenun ikat Bandar Kidul agar produk tenun ikat ini dikenal lebih luas lagi oleh masyarakat lokal pada umumnya dan masyarakat luar daerah, dan

atau luar negeri bahwa kain tenun ikat Kediri memiliki keunikan dan berbeda.



DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Nunuy Nur. 2009. *Peran Kewirausahaan Dalam Memperkuat UKM Indonesia Menghadapi Krisis Finansial Global Peran Kewirausahaan Dalam Memperkuat UKM Indonesia Menghadapi Krisis Finansial Global*. Bandung, Pusat Pengembangan Akuntansi, departemen Akuntansi, Universitas Padjajaran.
- Azhheri, Busyra. 2010. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Resonsinility) dalam Kegiatan pertambangan*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- BAPPENAS. 2002. *Public Good Governance. Sebuah Paparan Singkat: Jakarta: Sekretariat Pengembangan Public Good Governance BAPPENAS*.
- Bahari, Saiful. 1997. *Merintis Kemandirian Ekonomi Rakyat Konsep dan Pengalaman*. Jakarta: Sekertariat Bina Desa/INDHRA.
- Budimanta, A, Prasetijo, A., Rudito, B. 2004. *Corporate Social Responsibility, Jawaban bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini*. Jakarta: ICSD.
- Elkington, J. 1997. *Cannibal with Forks, the Tripple Bottom Line of Twentieth Century Busines*. London: Capstone Publishing Ltd.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hidayatullah, Syarif, dan Thomas, Djaka SWB. 2011. *Model Pengembangan Masyarakat Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal (Studi pada UKM Pengrajin di Kota Malang)* Jurnal Ekonomika, 4 (1) Juni, pp 33-37.
- Ika. 2011. *Konsep Triple Bottom Line dalam Pelaksanaan Kemitraan pada Corporate Social Responsibility (CSR) Studi kasus pada PT TELKOM KANDATEL JEMBER*. Malang: FE Universitas Brawijaya.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT Pustaka CIDESINDO.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Ekonomika Indonesia Dinamika Lingkungan Bisnis di Tengah Krisis Global*. Yogyakarta. Penerbit UPP STIM YKPN.
- Liana, Lie. 2008. *Pembinaan dan pengembangan usaha kecil sebagai sarana memperkokoh struktur perekonomian nasional*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE). 15 (2). 98 106.
- Lexy J. Moleong. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Remaja Rosdakarya.

- Lubis, Djuara dkk. 2006. *Studi Evaluasi dan Perencanaan Pengembangan Masyarakat di Sekitar PT Aneka Tambang Tbk*. Kerjaama Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor dengan PT Aneka Tambang Tbk.
- Marnelly, Romi. 2012. *Corporate Social Responsibility (CSR) : Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia*. Jurnal Aplikasi Bisnis Vol.2 No.2, 52-53
- Miles, Mathew B.A, Michael Huberman, Saldana. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. UI Press. Jakarta.
- Pamudji, S. 1985. *Pembinaan Perkotaan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Partomo, Titik Sartika, dan Abd. Rahman Soedjoeno. 2002. *Ekonomi Skala Kecil/ Menengah dan Koperasi*. Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia.
- Prasojo, Eko. 2004. *People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partipasi Publik*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik vol.IV no. 2 Maret-Agustus: 10-24.
- Purwanti Endang. 2012. *Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha, Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan UMKM di Desa Dayaan dan Kalilondo Salatiga*. Jurnal Among Makarti, Vol. 5 No. 9, Juli 2012.
- Rajagukguk, Roy Hamongan. 2014. *Perencanaan Program Corporate Social Responsibility Bidang Lingkungan PT PERTAMINA (Persero) RU IV*. Cilacap.
- Rifa'i, Bachtiar. 2013. *Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Krupuk Ikan Dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 1 (1)
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance, Pemerintahan yang baik, Bagian Dua*. Bandung: Mandar Maju.
- Soeharto, Edi. 2008. *Komitmen dan Aktivitas Corporate Social Responsibility*.
- Sugiyono. 2011. *Metodologi Peneleitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sugiyono. 2008. *Metode Peneleitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, A.B. 2007. *Corporate Social Responsibility: A Strategic Management Approach*. Jakarta: The Jakarta Consulting Group.
- Suparno. 2009. *Analisis Produk Unggulan Kabupaten Pasuruhan*. Jurnal Ekonomi & Bisnis, 13 (2) Juni, pp 97-103

Soeharto, Edi. 2008. *Corporate Social Responsibility: What is and a Benefit for Corporate*.

(<http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF?CSRIntipesan.Jkt.pdf>)

diakses pada tanggal 4 Oktober 2016)

Sriyana, Jaka. 2010. *Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Studi Kasus di Kabupaten Bantul*. Simposium Nasional 2010: Menuju Purwokerto Dinamis dan Kreatif, pp79-103. Diunduh dari <http://dppm.uui.ac.id> tanggal 27 November 2016

Tambunan, Tulus, T.H. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia Beberapa Isu Penting*. Jakarta: PT Salemba Empat.

Tadikapury, Violetta Jingga. 2011. *Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Bank X Tbk Kanwil X. Makasar*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanudin.

Tejasari, Maharani. 2008. *Peranan Sektor Usaha Kecil dan Menengah Dalam Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Trager, I Nyoman, dkk. 2003. *Corporate Governance dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi.

Untung, Hendrik Budi. 2009. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*. Gresik: Fascho Publishing.

Wijayanti, Tuti. 2002. *Rencana Strategis Kantor Pariwisata Kab. Klaten dalam Pengembangan Obyek Wisata Makam Sunan Pandanaran*. FISIP UNS.

Wrihatnolo, Randy R dan Riant Nugrooho Dwidjiwijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta, Media Komputindo.

UNDANG – UNDANG:

Undang-Undang RI No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai bank sentral

Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang tujuan tunggal Bank Indonesia

Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 14/14/PDG/2012 tentang Program Sosial Bank Indonesia

Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum

Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/19/DPUM tanggal 8 Juli 2015 tentang Pemberian Kredit dan Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Surat Edaran Bank Intern No. 11/140/INTERN tanggal 29 Juni 2009 tentang Logo Bank Indonesia

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 tentang Perekonomian Nasional



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Panduan Wawancara Bank Indonesia

PANDUAN WAWANCARA UNTUK BANK INDONESIA KOTA KEDIRI

1. Desa atau kecamatan dan atau kelompok masyarakat yang menerima bantuan atau *Corporate Social Responsibility* mengenai program yang sudah berjalan di Bank Indonesia yaitu tentang pengembangan ekonomi dan edukasi yaitu melalui pemberdayaan masyarakat dan dukungan terhadap komoditas ketahanan pangan dan komoditas unggulan daerah?
2. Terkait program yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia Kota Kediri bantuan *Corporate Social Responsibility* disalurkan pada tanggal bulan berapa?
3. Bantuan apa saja yang sudah diberikan dalam pengembangan UMKM di Kampung tenun ikat Bandar Kidul?
4. Apakah ada tenaga pendamping yang disediakan dalam pelaksanaan program pengembangan UMKM di Kampung tenun iakt Bandar Kidul?
5. Keterlibatan pengelola (pihak Bank Indonesia) dengan masyarakat dalam hal pelaksanaan program *Corporate Socail Responsibility* tentang pengembangan UMKM yang telah dilakukan?
6. Dana yang tersedia untuk melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* yang telah dilakukan dalam program pengembangan UMKM di Kampung tenun ikat Bandar Kidul?
7. Apakah yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* terkait dengan program yang sedang dilaksanakan?
8. Mengenai aturan hukum yang dipakai oleh Bank Indonesia Kota Kediri terkait program *Corporate Social Responsibility* yang telah dilakukan dan berjalan?

9. Dokumentasi kegiatan yang sudah dilakukan oleh pihak bersangkutan atau Bank Indonesia Kota Kediri dalam memberikan bantuan sosial yang telah dilakukan?
10. Laporan Pertanggung jawaban program yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia kepada masyarakat penerima bantuan *Corporate Social Responsibility*?
11. Terkait dengan program tersebut ; apakah program tersebut masih berjalan setiap tahunnya, sehingga masyarakat memiliki pendamping dalam melaksanakan program yang telah diberikan oleh Bank Indonesia?
12. Apakah manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pengembangan UMKM di Kampung tenun ikat Bandar Kidul, baik Bank Indonesia maupun masyarakat perajin tenun ikat?

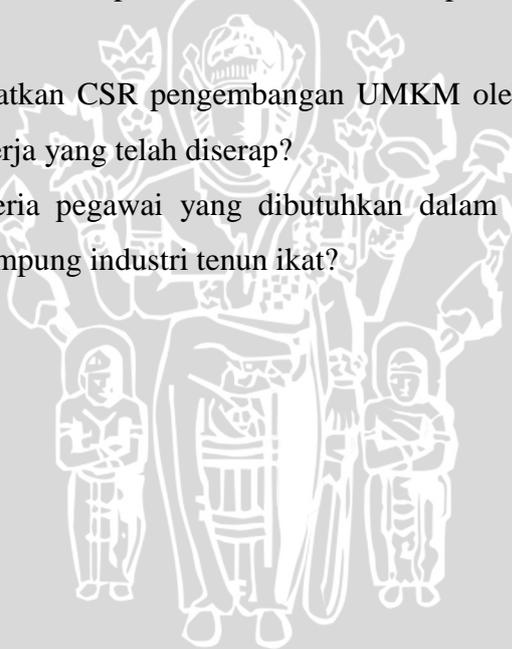


Lampiran 2: Panduan Wawancara Pelaku Usaha

PANDUAN WAWANCARA UNTUK PELAKU USAHA TENUN IKAT BANDAR KIDUL KOTA KEDIRI

1. Terkait program yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia Kota Kediri tentang CSR pengembangan UMKM di Kampung tenun ikat Bandar Kidul disalurkan sejak kapan?
2. Bantuan apa saja yang sudah diberikan Bank Indonesia dalam pelaksanaan program pengembangan UMKM di Kampung tenun ikat Bandar Kidul?
3. Bagaimana tata cara pengelolaan atau proses pengembangan UMKM dilakukan di Kampung tenun ikat Bandar Kidul?
4. Siapakah aktor yang terlibat dalam pengembangan UMKM di Kampung tenun ikat Bandar Kidul?
5. Keterlibatan pengelola (pihak Bank Indonesia) dengan masyarakat dalam hal pelaksanaan program CSR tentang pengembangan UMKM yang telah dilakukan?
6. Apakah ada keterlibatan Pemerintah Kota Kediri terkait CSR pengembangan UMKM yang diberikan Bank Indonesia?
7. Bantuan apa saja yang diberikan Pemerintah Kota Kediri dalam mengembangkan UMKM di Kampung tenun ikat Bandar Kidul?
8. Apakah ada faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* mengenai program CSR pengembangan UMKM di Kampung tenun ikat Bandar Kidul?
9. Apakah ada aturan hukum yang dipatuhi oleh masyarakat Kampung tenun ikat Kota Kediri terkait program *Corporate Social Responsibility* yang telah dilakukan dan berjalan?
10. Apakah program tersebut masih berjalan dan berapa lama program CSR Bank Indonesia untuk pengembangan UMKM di Kampung tenun ikat Bandar Kidul, sehingga masyarakat memiliki pendamping dalam melaksanakan program yang telah diberikan oleh Bank Indonesia?

11. Apa manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan CSR pengembangan UMKM di kampung tenun ikat bagi masyarakat perajin?
12. Apakah Bank Indonesia aktif dalam memberikan bimbingan atau pelatihan kepada masyarakat Kampung tenun ikat?
13. Apakah ada pelaporan setiap bulan atau per tiga bulan ke pihak Bank Indonesia terkait dengan program tersebut?
14. Berapakah produksi dalam satu bulan sebelum dan sesudah mendapatkan CSR Bank Indonesia?
15. Bagaimana pengelolaan untuk pemasaran kain tenun ikat, sudah di pasarkan di luar kota atau luar negeri?
16. Berapakah besar omzet per bulan setelah mendapatkan CSR dari Bank Indonesia?
17. Setelah mendapatkan CSR pengembangan UMKM oleh Bank Indonesia, berapa tenaga kerja yang telah diserap?
18. Bagaimana kriteria pegawai yang dibutuhkan dalam proses pembuatan tenun ikat di Kampung industri tenun ikat?



Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian

DOKUMENTASI FOTO





UNIVERSITAS BRAWIJAYA





Lampiran 4. Curriculum Vitae

Nama : Joko Sugiono

NIM : 125030107111060

Tempat/ Tanggal Lahir : Kediri, 26 September 1993

Pendidikan : 1) SD Negeri 1 Paron, Tamat Tahun 2006
2) SMP Negeri 2 Gurah, Tamat Tahun 2009
3) SMA Negeri 3 Kediri, Tamat Tahun 2012

Pengalaman Organisasi : -

Pubikasi/Karya ilmiah : Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui *Corporate Social Responsibility* (Studi Terhadap Program *Corporate Social Responsibility* Bank di Kampung Industri Tenun Ikat Bandar Kidul Kota Kediri)


KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

<http://fia.ub.ac.id>

 E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 3850 /UN.10.3/P6/2016

Lampiran : -

Perihal : Pra Riset

Kepada : Yth. Kepala Pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri

Jl. Brawijaya No. 2 Kediri 64123, (0354) 682112

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan Pra Riset / Survey bagi mahasiswa:

 Nama : *Joko Sugiono*

 Alamat : Jl. Balai Desa, Desa Paron RT. 014 RW. 005 Kecamatan Ngasem
Kabupaten Kediri 64182

NIM : 125030107111060

Program Studi: Ilmu Administrasi Publik

 Judul Skripsi : Dampak Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia
Terhadap Lingkungan Hidup di Kota Kediri

Lokasi : Bank Indonesia, Kediri

Lamanya : 15 (Lima belas) Hari

Peserta : 1 (Satu) Orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Malang, 23 Februari 2016

 Mengetahui,
an Dekan

Ketua Program Studi Administrasi Publik



Dr. Lely Indah Mindarti, M. Si

NIP. 19690524 200212 2 002